

**KAJIAN  
EKONOMI REGIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Triwulan II - 2006**

**Kantor Bank Indonesia  
Mataram**

---

Penerbit :

**BANK INDONESIA MATARAM**

Bidang Ekonomi, Moneter dan Perbankan

Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter

Jl. Pejanggik No.2 Mataram

Nusa Tenggara Barat

Telp. : 0370-623600 ext. 111

Fax : 0370-631793

E-mail : [b\\_widihartanto@bi.go.id](mailto:b_widihartanto@bi.go.id)

[thommy@bi.go.id](mailto:thommy@bi.go.id)

[trinil@bi.go.id](mailto:trinil@bi.go.id)

---

## KATA PENGANTAR

Perekonomian Nusa Tenggara Barat pada pertengahan tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 1,40%, terutama didorong pertumbuhan dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 1,35%. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II-2006 ini terutama disebabkan karena kontraksi yang terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang secara konsisten mendominasi PDRB NTB. Sementara itu, laju inflasi Kota Mataram terus menunjukkan trend yang menurun. Secara kumulatif (y-t-d) tercatat sebesar 2,24%. Namun secara tahunan (y-o-y) angka inflasi Kota Mataram masih cukup tinggi sebesar 15,54% dan masih berada di atas angka inflasi nasional sebesar 15,53%.

Membayaknya pertumbuhan ekonomi turut berpengaruh pula terhadap kinerja perbankan regional, terlihat dari meningkatnya total asset, dana pihak ketiga dan terutama kredit yang mencapai angka 13,00% (y-t-d), meskipun ada kecenderungan peningkatan rasio NPLs.

Disamping ulasan di atas, buku ini juga mengupas perkembangan makro ekonomi regional, perkembangan inflasi, perkembangan perbankan dan sistem pembayaran, perkembangan keuangan dan investasi serta prospek ekonomi ke depannya yang dapat menjadikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia maupun *stakeholders* di daerah.

Bank Indonesia sangat *concern* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penelitian dan kajian yang dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi termasuk pengendalian harga barang dan jasa.

Ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasamanya kepada semua pihak terutama jajaran Pemerintah Daerah baik Propinsi, Kabupaten ataupun Kota, dinas/instansi terkait, perbankan, akademisi dan pihak lainnya yang telah membantu penyusunan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat bagi kita semua dalam berkarya.

Mataram, Agustus 2006

**BANK INDONESIA MATARAM**

I Made Sudja  
Pemimpin

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GRAFIK & LAMPIRAN		vii
RINGKASAN EKSEKUTIF		ix
BAB I	Perkembangan Ekonomi Makro Regional	1
	1.1 Ringkasan Umum Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB	1
	1.2 PDRB menurut Penggunaan/sisi pengeluaran	3
	1.2.1 Gambaran Umum	3
	1.2.2 Pengeluaran Konsumsi	4
	1.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	6
	1.2.4 Pertumbuhan Net Ekspor (Ekspor – Impor) Regional & Internasional	7
	1.2.5 Kinerja Ekspor - Impor Luar Negeri Propinsi NTB	9
	1.3 PDRB menurut sisi sektoral (penawaran)	11
	1.3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB	11
	1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB ditinjau Secara Tahunan (y-o-y)	11
	1.3.3 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha	12
	1.3.3.1 Kondisi Dunia Usaha	12
	1.3.3.2 Penggunaan Tenaga Kerja	13
	1.3.4 Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral	14
	1.3.4.1 Sektor Pertanian	14
	1.3.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian	16
	1.3.4.3 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	16
	1.3.4.4 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	17
	1.3.4.5 Sektor Industri Pengolahan	18
	1.3.4.6 Sektor Lainnya	19
	1.4 Tenaga Kerja ke Luar Negeri	20
		22
		23

---

BAB II	Evaluasi Perkembangan Inflasi Propinsi Nusa Tenggara Barat	23
	2.1 Gambaran Umum Inflasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat	23
	2.2 Inflasi Inti, Inflasi <i>Volatile Food</i> , Inflasi <i>Administered Price</i>	23
	2.3 Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram	25
	2.3.1 Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram Triwulan I-2006	25
	2.3.2 Trend Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram	36
	2.4 Inflasi Tahunan (y-o-y) Kota Mataram	27
	2.5 Komoditi Penyumbang Inflasi dan Deflasi Terbesar	28
	2.6 Perbandingan Inflasi Kota Mataram dengan Kota Terdekat	30
BAB III	Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran	31
	3.1 Kinerja Perbankan di Propinsi Nusa Tenggara Barat	31
	3.2 Bank Umum	32
	3.2.1 Kelembagaan	32
	3.2.2 Asset	32
	3.2.3 Dana Pihak Ketiga	33
	3.2.4 Kredit	35
	3.2.5 Loan to Deposit Ratio (LDR)	38
	3.2.6 Profitabilitas & Efisiensi Bank Umum	39
	3.3 Bank Umum Syariah	39
	3.4 Perkembangan BPR	40
	3.4.1 Kelembagaan	41
	3.4.2 Asset	41
	3.4.3 Dana Pihak Ketiga	41
	3.4.4 Perkembangan Kredit yang diberikan	42
	3.4.5 Loan to Deposit Ratio (LDR)	43
	3.4.6 Profitabilitas & Efisiensi BPR	44
	3.5 Perkembangan Sistem Pembayaran	44
	3.5.1 Transaksi Keuangan Secara Tunai	45
	3.5.1.1 Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)	45
	3.5.1.2 Uang Palsu	46
	3.5.2 Transaksi Keuangan Secara Non Tunai	47
	3.5.2.1 Transaksi RTGS ( <i>Real Time Gross Settlement</i> )	47
	3.5.2.2 Transaksi Kliring	47

BAB IV	Perkembangan Keuangan Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat	56
BAB V	Perkembangan Investasi di Nusa Tenggara Barat	61
BAB VI	Prospek Perekonomian dan Inflasi Regional	64
	5.1 Prospek Makro Ekonomi Regional ( <i>Economic Outlook</i> )	64
	5.2 Prospek Inflasi	65
	5.3 Rekomendasi	67
BOKS 1	Tanaman Jarak : Sumber Energi Alternatif dan Pemanfaatan Lahan Marginal di NTB	22-a
BOKS 2	Trend Peningkatan Undisbursed Loan di Triwulan II - 2006	48-a
BOKS 3	Survei Opini Pimpinan/Pejabat Bank Umum Triwulan IV-2005 Terhadap Pemberian Kredit	
BOKS 3	Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan <i>Linkage Program</i>	42-a
		44-a

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel	1.1. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan (Sisi Pengeluaran)	3
Tabel	1.2. Realisasi Ekspor Propinsi NTB	9
Tabel	1.3. Negara Tujuan Ekspor Terbesar dan Pelabuhan Muat Ekspor NTB	10
Tabel	1.4. Realiasi Impor NTB Januari s.d. April 2006	10
Tabel	1.5. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Propinsi NTB	11
Tabel	1.6. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan 2000)	12
Tabel	1.7. Nilai Balance Score Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha	13
Tabel	2.1. Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram	25
Tabel	2.2. Inflasi Triwulanan (y-o-y) Kota Mataram	28
Tabel	2.3. Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan II-2006	29
Tabel	2.4. Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan II-2006	29
Tabel	2.5. Perbandingan Inflasi Kota Mataram dengan Kota Terdekat Triwulan II-2006	30
Tabel	3.1. Indikator Utama Perbankan NTB	32
Tabel	3.2. Komposisi Golongan Pemilik Dana	34
Tabel	3.3. Komposisi Penghimpunan dan Sebaran Dana Pihak Ketiga	34
Tabel	3.4. Perkembangan Jumlah Rekening DPK Bank Umum	34
Tabel	3.5. Penyaluran Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Bank Umum	37
Tabel	3.6. Rasio LDR Bank Umum Per Maret 2006	39
Tabel	3.7. Indikator Utama Bank Umum Syariah di NTB	40
Tabel	3.8. Indikator Utama BPR di NTB	40
Tabel	3.9. Perkembangan Kredit dan NPL BPR di NTB	42
Tabel	3.10. Perkembangan aliran uang di KBI Mataram	45
Tabel	3.11. Uang palsu yang ditemukan di Kantor Bank Indonesia Mataram	46
Tabel	3.12. Transaksi RTGS di Kantor Bank Indonesia Mataram	47

Tabel	3.13.	Data perputaran Kliring di KBI Mataram	47
Tabel	4.1.	Realisasi APBD 2005 Propinsi, Kota Mataram & Kabupaten Sumbawa Barat	56
Tabel	4.2.	APBD 2006 Propinsi, Kota Mataram, Kab. Dompu dan Kota Bima	57
	4.3.	Pertumbuhan APBD 2006 Propinsi, Kota Mataram, Kab. Dompu dan Kota Bima	
Tabel	4.4.	Dana Alokasi Umum (DAU) 2006 di Nusa Tenggara Barat	58
Tabel	4.5.	Dana Alokasi Khusus (DAK) 2006 di Nusa Tenggara Barat	58
Tabel	4.6.	Perkiraan Realisasi APBD 2006 (Propinsi, Kota Mataram & Kabupaten Sumbawa Barat)	59
	5.1.	Rekapitulasi Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA & PMDN di NTB (s.d Desember 2004)	
Tabel	5.2.	Rekapitulasi Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA & PMDN di NTB (s.d Desember 2005)	60
Tabel			61
			62



## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1. PDRB & Pertumbuhan Ekonomi NTB	1
Grafik 1.2. Distribusi PDRB Sektoral ADH Konstan Th.2000	2
Grafik 1.3. Distribusi PDRB NTB ADH Konstan Th.2000 Menurut Penggunaan	2
Grafik 1.4. Pertumbuhan Sisi Konsumsi PDRB NTB Triwulanan (y-o-y)	4
Grafik 1.5. Indeks Hasil Survei Konsumen Kota Mataram	5
Grafik 1.6. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6
Grafik 1.7. Komposisi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	6
Grafik 1.8. Pertumbuhan Ekspor Impor NTB	8
Grafik 1.9. PDRB & Pertumbuhan Sektor Pertanian	14
Grafik 1.10. PDRB & Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian	16
Grafik 1.11. PDRB & Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	16
Grafik 1.12. PDRB & Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	17
Grafik 1.13. PDRB & Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	18
Grafik 1.14. Negara Penampung TKI NTB Terbanyak - Triwulan II-2006	20
Grafik 1.15. TKI NTB Berdasarkan Sektor dan Jenis Kelamin - Triwulan II-2006	20
Grafik 1.16. Daerah Asal TKI NTB - Triwulan II-2006	21
Grafik 1.17. Latar Belakang Pendidikan TKI NTB Triwulan II-2006	21
Grafik 2.1. Inflasi Kota Mataram	23
Grafik 2.2. Pergerakan Inflasi Umum, Inflasi Inti, <i>Administered Price &amp; Volatile Food</i> Kota Mataram	24
Grafik 2.3. Inflasi (q-t-q) Kota Mataram Per Komoditi (1)	26
Grafik 2.4. Inflasi (q-t-q) Kota Mataram Per Komoditi (2)	26
Grafik 3.1. Perkembangan DPK Bank Umum	33
Grafik 3.2. Perkembangan Golongan Pemilik DPK Bank Umum	33
Grafik 3.3. Perkembangan Kredit di NTB	35
Grafik 3.4. Perkembangan Outstanding Kredit Menurut Jenis Penggunaan	35

Grafik	3.5.	Pertumbuhan Kredit Menurut Jenis Penggunaan	35
Grafik	3.6.	Perkembangan Outstanding Kredit Sektoral	36
Grafik	3.7.	Pertumbuhan Kredit Sektoral	36
Grafik	3.8.	Komposisi Golongan Debitur Bank Umum Per Maret 2006	36
Grafik	3.9.	Sebaran Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	36
Grafik	3.10.	Pertumbuhan Sebaran Kredit Bank Umum	37
Grafik	3.11.	Perkembangan NPL Bank Umum	37
Grafik	3.12.	Perkembangan Kredit UKM yang disalurkan Bank Umum	38
Grafik	3.13.	Perkembangan LDR Bank Umum	39
Grafik	3.14.	Perkembangan Profitabilitas Bank Umum	39
Grafik	3.15.	Perkembangan Bank Umum Syariah di NTB	40
Grafik	3.16.	Perkembangan Aset BPR Per Wilayah	41
Grafik	3.17.	Perkembangan DPK BPR di NTB	41
Grafik	3.18.	Peningkatan DPK BPR Per Wilayah	41
Grafik	3.19.	Perkembangan Kredit BPR Pemda	42
Grafik	3.20.	Perkembangan Kredit BPR Swasta	42
Grafik	3.21.	Perkembangan NPL Kredit BPR Pemda	43
Grafik	3.22.	Perkembangan NPL Kredit BPR Swasta	43
Grafik	3.23.	Perkembangan LDR BPR di NTB	43
Grafik	3.24.	Perkembangan Profitabilitas & Efisiensi BPR di NTB	44
Grafik	3.25.	Perkembangan Temuan Uang Palsu	46
Grafik			53

## DAFTAR LAMPIRAN

		Hal
Lampiran	1.1. Indikator Ekonomi dan Moneter Propinsi NTB	59
Lampiran	3.1. Perkembangan Asset, DPK & Kredit Perbankan di NTB (Jutaan Rp.)	61
Lampiran	3.2. Perkembangan Rasio-rasio Perbankan di NTB (%)	61
Lampiran	3.3. Perkembangan DPK Perbankan di NTB (Jutaan Rp.)	62
Lampiran	3.4. Perkembangan kredit bank umum berdasarkan lokasi kantor bank	62
Lampiran	3.5. Perkembangan kredit bank umum berdasarkan kolektibilitas	63
Lampiran	3.6. Perkembangan kredit bank umum berdasarkan jenis penggunaan	63
Lampiran	3.7. Perkembangan kredit BU berdasarkan sektor & sub sektor ekonomi	64
Lampiran	3.8. Kredit UMKM	66
Lampiran	3.9. Perkembangan asset BPR	66
Lampiran	3.10. Perkembangan DPK BPR	67
Lampiran	3.11. Perkembangan Kredit BPR	68

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### Perkembangan Ekonomi, Inflasi dan Perbankan di Nusa Tenggara Barat

Kegiatan perekonomian di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan II-2006 dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y) atas dasar harga konstan (ADH) tahun 2000, menunjukkan pertumbuhan yang sangat rendah, hanya sebesar 1,40%, namun sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan tahunan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,21%. Kecilnya angka pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut disebabkan karena kontraksi yang terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian serta rendahnya pertumbuhan sektor pertanian. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang mendominasi perekonomian NTB. Pada triwulan ini, pengaruh turunnya kinerja dari pertambangan non migas sangat signifikan. Hal ini tercermin dari tingginya perbedaan angka pertumbuhan ekonomi jika tanpa pertambangan non migas (y-o-y) NTB yang mencapai 38,71%. Ditinjau secara triwulanan (q-t-q), perekonomian Propinsi NTB pada triwulan ini dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, mencapai 9,11% (ADH Konstan 2000), setelah pada dua periode (triwulan) sebelumnya berturut-turut mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebesar -11,58% dan -9,09%.

Pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB (y-o-y) sebesar 1,40% pada triwulan ini didorong oleh pertumbuhan di semua sektor. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan ini adalah sektor industri pengolahan (9,43%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (9,01%). Dilihat dari besarnya sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor, kontributor terbesar bersumber dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Besarnya sumbangan oleh sektor ini mencapai 1,35% dari total pertumbuhan ekonomi NTB. Sektor lain hanya menyumbang di bawah 1%, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi (0,58%), sektor pertanian (0,50%). Sisanya disumbang oleh sektor lain yang besarnya tidak signifikan. Sementara itu, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor dominan berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi NTB.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi penggunaan atau pengeluaran pada triwulan II-2006 (secara y-o-y) didominasi oleh komponen PMTB (7,20%), diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (6,84%). Komponen lainnya seperti konsumsi lembaga nirlaba dan impor juga mengalami pertumbuhan yang tidak jauh berbeda masing-masing sebesar 5,92% dan 5,21%. Hanya komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan terendah, hanya sebesar 3,99%.

Struktur perekonomian NTB pada triwulan II-2006 berdasarkan harga berlaku, secara sektoral didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian masing-masing sebesar 37,57% dan 21,53%. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian NTB semakin meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 34,48%, sementara peranan sektor pertanian menunjukkan penurunan dari periode sebelumnya sebesar 23,17%. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tertinggi peranannya sejak tahun 2001, menggeser dominasi sektor pertanian pada tahun-tahun sebelumnya. Sektor lain yang juga berperan cukup besar pada triwulan ini adalah sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan. Di sisi lain, ditinjau dari sisi penggunaan, struktur PDRB menurut pengeluaran hingga triwulan II-2006 belum menunjukkan pergeseran yang signifikan. Sektor yang paling dominan tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir, yaitu konsumsi rumah tangga dan ekspor masing-masing sebesar 37,63% dan 36,43%.

Sementara itu, laju inflasi Kota Mataram hingga pertengahan tahun 2006 cenderung terus menunjukkan penurunan sejak akhir tahun 2005. Inflasi tahunan (y-o-y) Kota Mataram pada bulan Juni 2006 telah berada pada level 15,54%. Meskipun masih cukup tinggi, angka tersebut menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2005. Demikian pula inflasi triwulanan (q-t-q) juga menurun hingga menjadi 0,61%. Sedangkan inflasi kumulatif (Januari s.d Juni 2006) pada triwulan ini berada pada posisi 2,24% dan apabila ditinjau secara bulanan (m-t-m), pada periode ini Kota Mataram telah mengalami inflasi sebesar 0,85% setelah sebelumnya mengalami deflasi. Kelompok komoditi yang mengalami inflasi tertinggi secara tahunan adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 33,03%.

Perkembangan inflasi secara triwulanan (q-t-q) di Kota Mataram pada triwulan II-2006 didominasi oleh pergerakan inflasi inti, diikuti oleh inflasi *volatile food* dan inflasi *administered price* dengan peranan masing-masing terhadap inflasi Kota Mataram sebesar 50,99%; 25,47% dan 23,54%. Inflasi *volatile food* pada triwulan II-2006 tercatat sebesar 0,59%, menurun cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan I-2006 yang mencapai 4,32%. Fluktuasi komoditi ini sangat dipengaruhi oleh faktor *seasonal*. Secara triwulanan, karakteristik NTB yang berbasis pertanian memberikan dampak yang besar. Oleh karena itu, komoditi yang mendorong penurunan inflasi *volatile food* pada triwulan ini adalah yang berasal dari hasil produksi pertanian. Tibanya saat musim panen raya selama triwulan ini mendorong *supply* komoditi ini kembali normal sehingga mendorong deflasi sektor tersebut pada triwulan ini. Beberapa komoditi yang mengalami deflasi tersebut antara lain cabe rawit, cabe merah, buncis, tomat sayur, kol putih, ayam hidup, jeruk nipis, kacang kedelai, ikan gurami dan mujair, jeruk, garam, ikan tengiri, teri, lele, mas, cakalang, bandeng, daging sapi dan beberapa komoditi lainnya. Sedangkan komoditi penyumbang inflasi terbesar di Kota Mataram pada triwulan II-2006 (q-t-q) adalah komoditi beras yang menyumbang 0,42% terhadap total inflasi, disusul oleh bawang putih (0,20%), emas perhiasan (0,14%), daging ayam ras (0,13%), kayu balokan (0,06%) dan dokter umum (0,06%). Sementara itu, inflasi *administered price*, pada triwulan ini mengalami sedikit peningkatan, setelah sebelumnya mengalami deflasi (-1,61%), pada triwulan II-2006 kembali terjadi inflasi (0,10%). Peningkatan harga barang dari kebijakan pemerintah terutama terjadi pada bahan bakar untuk industri yang pada bulan Juni 2006 mengalami kenaikan dengan kisaran 2,27% - 12,89%, menyusul kenaikan harga minyak dunia saat ini. Masalah lainnya adalah keterbatasan pasokan BBM di NTB, sehingga selama beberapa waktu, terjadi kelangkaan premium. Masalah di sektor kelistrikan juga diperkirakan turut memberikan dampak terhadap inflasi *administered price*.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional dan penurunan laju inflasi pada triwulan II- 2006 terkait pula dengan kinerja perbankan yang cukup baik, ditandai dengan pertumbuhan kredit (q-t-q) sebesar 5,75% (y-t-d sebesar 13,00%) menjadi sebesar Rp 3,79 triliun, dana pihak ketiga 8,30% (y-t-d sebesar 11,97%) menjadi sebesar Rp 4,55 triliun dan pertumbuhan asset sebesar 5,76% (y-t-d 9,34%) menjadi Rp 6,01 triliun. Meskipun terjadi penurunan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dari 85,20% menjadi 83,19% karena peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang relatif lebih besar dari pada peningkatan penyaluran kredit, terutama karena masuknya sumber dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dan yang diperuntukkan bagi pembayaran kompensasi BBM berupa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tahap II yang pembayarannya dilakukan pada bulan Juni 2006.

Komposisi dana pihak ketiga perbankan, masih didominasi oleh tabungan sebesar 44,78%, namun pangsa cenderung mengalami penurunan, disusul giro yang mencapai sebesar 30,85% yang terus mengalami peningkatan sejalan masuknya dana perimbangan dan kompensasi BBM, dan terakhir deposito sebesar 24,37%.

Disisi lain, turunnya tingkat bunga BI Rate dari 12,75% menjadi 12,50% pada minggu ke-2 di bulan Mei 2006, direspon secara positif oleh perbankan khususnya bank umum yang tampak mulai menurunkan tingkat bunga dananya dan terutama suku bunga kreditnya

pada kisaran hingga 1.5%, yaitu untuk kredit modal kerja dari rata-rata 22,16% menjadi 20,86% dan kredit investasi dari rata-rata 20,02% menjadi 19,61%, sedangkan kredit konsumsi diperkirakan masih relatif stabil.

Sementara itu, meningkatnya *outstanding* (baki debit) penyaluran kredit perbankan sebesar 5,75% dari triwulan sebelumnya atau 13,00% dari posisi akhir 2005, menandakan mulai bergeliatnya sektor riil yang sempat mengalami *shock* (perlambatan) di awal tahun 2006 akibat kenaikan harga BBM, yang berdampak pada tendensi peningkatan rasio NPL (*Non Performing Loan*) atau perbandingan antara jumlah kredit non lancar dengan total kredit hingga triwulan II 2006, menjadi sebesar 2,99% dari 2,81% pada triwulan sebelumnya dan 2,66% pada posisi akhir 2005. Hal ini merupakan cerminan bahwa sektor riil turut mengalami tekanan yang berakibat kemampuan pengembalian pinjamannya turut pula terganggu. Komposisi kredit perbankan meskipun didominasi oleh sektor konsumsi yang mencapai lebih dari separuh total kredit atau sebesar 51,55% dan sisanya terbagi pada kredit modal kerja (37,99%) dan investasi (10,46%), namun pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai sebesar 13,00% (Rp 436 miliar) dari posisi akhir 2005, sebanyak 48,05% disalurkan untuk sektor produktif dan sisanya non produktif sebesar 51,95%. Apabila posisi penyaluran kredit kepada sektor produktif tetap dapat ditingkatkan, akan membawa efek multiplier yang cukup besar dalam memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi di NTB. Secara sektoral, komposisi penyaluran kredit perbankan juga masih didominasi oleh sektor lain-lain (terutama konsumtif) sebesar 51,95%, disusul, sektor perdagangan sebesar 34,19%, jasa-jasa dunia usaha 4,97%, pertanian 4,18% dan sisanya 6 sektor lainnya.

Mengamati perkembangan uang palsu pada enam bulan pertama di tahun 2006, tercatat sebesar Rp 52,56 juta atau telah mencapai 109,42% dari jumlah uang palsu yang ditemukan di Bank Indonesia Mataram pada tahun 2005. Peredaran uang palsu dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan, sehingga masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dalam melakukan transaksi bisnisnya dan disarankan untuk lebih memilih penggunaan transaksi non tunai seperti menggunakan cek, bilyet giro maupun transfer antar bank melalui media ATM (Anjungan Tunai Mandiri), apabila transaksi bisnis yang dilakukan dengan nilai nominal yang relatif besar.

### Prospek Makro Ekonomi Regional (*Economic Outlook*) dan Inflasi

Pada triwulan III-2006, baik secara triwulanan (q-t-q) maupun tahunan (y-o-y), perekonomian NTB diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan positif dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Secara triwulanan, masih stabilnya faktor *seasonal* yang sangat mempengaruhi struktur perekonomian NTB pada triwulan mendatang diperkirakan dapat mendukung peningkatan kegiatan ekonomi di NTB. Sektor pertanian yang merupakan sektor yang memberikan pengaruh yang cukup dominan terhadap kinerja perekonomian NTB, diprediksi akan masih akan tumbuh positif pada triwulan mendatang, karena masih berlangsungnya masa panen raya, sehingga persediaan barang-barang hasil produksi sektor ini cukup banyak. Sementara itu, bila ditinjau secara tahunan (y-o-y), pertumbuhan ekonomi NTB terutama akan didorong oleh pertumbuhan pada sebagian besar sektor ekonomi. Mulai stabilnya kondisi ekonomi makro nasional dan regional yang tercermin dari stabilnya nilai tukar dan tingkat inflasi yang cenderung menurun, terutama dibandingkan dengan kondisi pasca kenaikan BBM pada tahun 2005. Selain sektor pertanian, sektor lain yang mendominasi struktur perekonomian NTB yaitu sektor pertambangan dan penggalian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi pada triwulan mendatang. Dari sisi penyaluran kredit perbankan di NTB, pertumbuhan penyaluran kredit yang disalurkan kepada sektor riil pada triwulan III-2006, masih dipengaruhi oleh perubahan arah kebijakan pemberian kredit perbankan dari kredit konsumtif kepada kredit modal kerja dan investasi. Faktor-faktor tersebut akan mendorong kinerja perekonomian ke arah pertumbuhan dengan kisaran angka 3-4% (y-o-y) pada triwulan III-2006.

Pergerakan inflasi Kota Mataram pada triwulan mendatang dapat diprediksi dari arah kecenderungan pergerakan angka inflasi yang trendnya terus menunjukkan penurunan sejak awal tahun 2006. Tekanan inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan akan lebih stabil pada kisaran angka yang rendah, namun tetap berpotensi sedikit mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya karena pengaruh komponen *administered price* sebagai akibat kebijakan pemerintah menaikkan kembali harga BBM untuk industri yang telah mulai berlaku pada akhir triwulan II-2006 serta adanya rencana penetapan kenaikan harga eceran tertinggi pupuk hingga sebesar 12% yang dapat memicu ekspektasi kenaikan harga di masyarakat. Dari sisi inflasi *volatile food*, apabila kondisi cuaca/iklim stabil dan tidak terjadi gangguan/ shock seperti bencana alam, kegagalan panen karena serangan hama atau gangguan lainnya, pada triwulan mendatang, tekanan inflasi di NTB kemungkinan diperkirakan akan stabil berada diposisi yang rendah. Mengingat karakteristik daerah yang sangat dipengaruhi faktor musiman dan pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor yang tertinggi kontribusinya. Di samping itu, kondisi geografis wilayah NTB yang terpisah oleh lautan dari daerah lainnya, menjadikan ketergantungan daerah ini pada sarana dan prasarana transportasi sangat tinggi, terutama terkait dengan banyaknya kebutuhan barang masyarakat NTB yang didatangkan dari luar daerah. Dibangunnya pelabuhan dan rehabilitasi pelabuhan yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa membawa dampak yang positif terhadap pergerakan harga barang-barang di NTB secara umum.

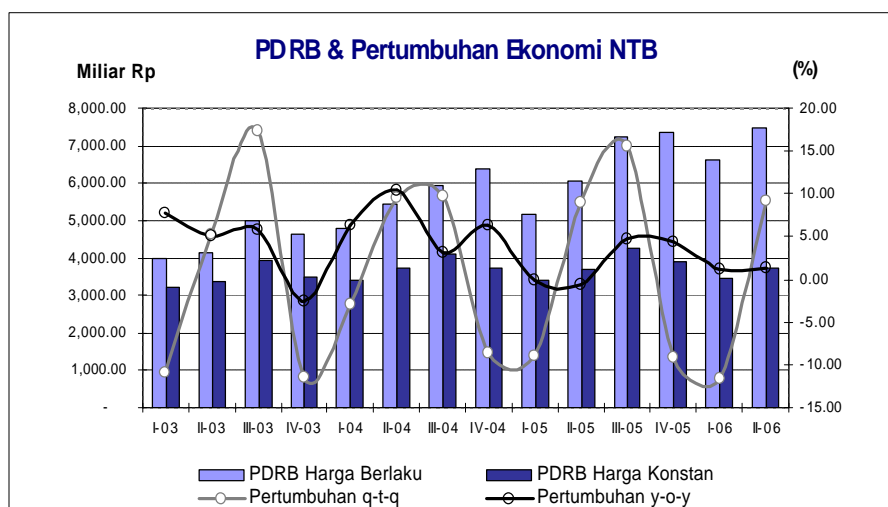
Melihat faktor-faktor tersebut dan kondisi geografis daerah NTB sehingga penetapan kenaikan harga BBM industri sangat berpengaruh terhadap harga barang-barang di NTB, serta penetapan kenaikan harga pupuk yang mendorong kenaikan harga barang hasil produksi pertanian sebagai sektor dominan kedua dalam struktur PDRB NTB, maka secara kumulatif (y-t-d) angka inflasi Kota Mataram pada triwulan mendatang diprediksi akan lebih tinggi dari perkiraan semula dan berada pada kisaran 2,5% ( $\pm 0,5\%$ ). Sedangkan secara tahunan (y-o-y), angka inflasi masih dominan dipengaruhi oleh inflasi *administered price* karena kebijakan kenaikan harga BBM, sehingga inflasi y-o-y masih berada dalam kisaran angka yang cukup tinggi sebesar 13% ( $\pm 1\%$ ). Inflasi yang cukup tinggi masih akan terjadi pada beberapa kelompok, terutama kelompok transportasi dan komunikasi, kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan angka inflasi yang lebih rendah dari triwulan II-2006. Sementara itu, secara triwulanan (q-t-q), inflasi Kota Mataram sangat dipengaruhi oleh faktor *seasonal* sesuai dengan karakteristik geografis wilayah NTB. Dengan asumsi faktor musiman bersifat normal dan tidak ada faktor eksternal lainnya yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian NTB, serta prediksi iklim/cuaca masih cukup baik dan mendukung kegiatan di sektor pertanian sebagai basis perekonomian NTB, inflasi q-t-q Kota Mataram akan berada pada kisaran yang rendah yaitu 1% ( $\pm 1\%$ ).

## BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

### 1.1. RINGKASAN UMUM PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI NTB

Kegiatan perekonomian di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan II-2006 dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y) atas dasar harga konstan (ADH) tahun 2000, menunjukkan pertumbuhan yang sangat rendah, hanya sebesar 1,40%, sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan tahunan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,21%. Kecilnya angka pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut disebabkan karena kontraksi yang terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian serta rendahnya pertumbuhan sektor pertanian. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang mendominasi perekonomian NTB. Pada triwulan ini, pengaruh turunnya kinerja dari pertambangan non migas sangat signifikan. Hal ini disebabkan tercermin dari tingginya perbedaan angka pertumbuhan ekonomi jika tanpa pertambangan non migas (y-o-y) NTB yang mencapai 38,71%. Ditinjau secara triwulanan (q-t-q), perekonomian Propinsi NTB pada triwulan ini dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, mencapai 9,11% (ADH Konstan 2000), setelah pada dua periode (triwulan) sebelumnya berturut-turut mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebesar -11,58% dan -9,09%.

Grafik 1.1



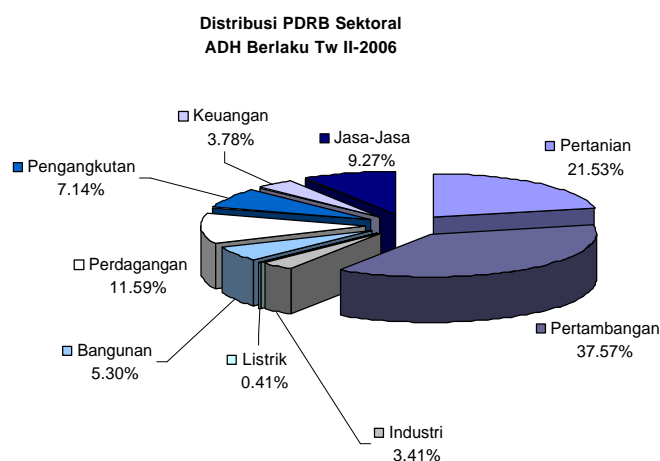
Sumber : Data BPS Propinsi NTB, diolah

Grafik 1.1 di atas menunjukkan perkembangan PDRB dan laju pertumbuhan perekonomian Propinsi NTB selama 3 tahun terakhir. Dari grafik tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi NTB menggambarkan pola yang meningkat pada setiap triwulan II dan III setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena karakteristik wilayah NTB yang sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, mengingat wilayah ini merupakan basis berbasis pertanian. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tampak bahwa PDRB NTB berdasarkan harga berlaku menunjukkan trend yang meningkat, hingga pada triwulan II-2006 mencapai Rp7,46 triliun. Sedangkan nilai PDRB NTB berdasarkan harga konstan cenderung stabil dalam kurun waktu tersebut, berkisar antara Rp3 triliun sampai dengan Rp4 triliun dan pada triwulan ini mencapai Rp3,75 triliun. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB triwulanan (q-t-q) terlihat berfluktuasi namun memiliki pola yang sama.



Pada triwulan ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pola normalnya, terjadi percepatan pertumbuhan yang cukup berarti hingga mencapai 9,11%, setelah pada dua triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -11,58% dan -9,09%. Kontraksi tersebut didorong oleh penurunan nilai tambah yang terjadi pada 7 sektor ekonomi dalam struktur PDRB NTB. Ditinjau secara tahunan (y-o-y), trend PDRB NTB menunjukkan fluktuasi dalam kisaran angka yang tidak terlalu lebar (tidak setajam fluktuasi pertumbuhan ekonomi triwulanan). Pada triwulan ini, meskipun relatif rendah, perekonomian NTB mengalami pertumbuhan sebesar 1,40% (y-o-y). Namun angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahunan yang dicapai pada triwulan sebelumnya sebesar 1,21%.

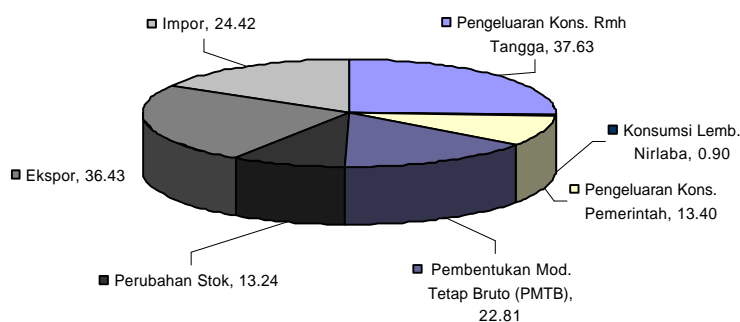
Grafik 1.2



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Struktur perekonomian NTB pada triwulan II-2006 berdasarkan harga berlaku, secara sektoral didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian masing-masing sebesar 37,57% dan 21,53%. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian NTB semakin meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 34,48%, sementara peranan sektor pertanian menunjukkan penurunan dari periode sebelumnya sebesar 23,17%. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang selama ini selalu mendominasi struktur PDRB NTB. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tertinggi peranannya sejak tahun 2001, menggeser dominasi sektor pertanian pada tahun-tahun sebelumnya. Sektor lain yang juga berperan cukup besar pada triwulan ini adalah sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan.

Grafik 1.3  
Distribusi PDRB NTB Menurut Penggunaan ADH Berlaku Tw II-2006



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Di sisi lain, ditinjau dari sisi penggunaan, struktur PDRB menurut pengeluaran hingga triwulan II-2006 belum menunjukkan pergeseran yang signifikan. Sektor yang paling dominan tidak mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir, yaitu konsumsi rumah tangga dan ekspor masing-masing sebesar 37,63% dan 36,43%. Pada triwulan ini, tampaknya terdapat kecenderungan semakin berkurangnya *share* konsumsi rumah tangga, tercermin dari *share* konsumsi rumah tangga yang menurun dari triwulan sebelumnya yang mencapai 50,37%, berbeda dengan ekspor yang semakin meningkat *share*-nya dari sebesar 35,74%.

Secara tahunan (y-o-y), pada triwulan ini, hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang sejak dua triwulan terakhir mengalami kontraksi sebesar -5,31% pada triwulan IV-2005 dan -7,07% pada triwulan I-2006. Pada triwulan II-2006 pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masing-masing sebesar 9,43% dan 9,01%. Dalam 5 tahun

terakhir, kedua sektor ini terus berkembang dan selalu memberikan pertumbuhan dan kontribusi positif bagi perekonomian NTB. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada triwulan ini sekaligus merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar mencapai 1,35% dari total pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 1,40%. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya memberikan kontribusi sebesar 0,46%. Sektor pengangkutan dan pertanian juga turut memberikan sumbangan cukup besar pada periode ini, masing-masing sebesar 0,58% dan 0,50%. Sisanya disumbangkan oleh sektor lainnya yang juga turut memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi NTB, dengan kisaran angka 0,20% sampai dengan 0,37%.

Disisi penggunaan, komponen PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,20%. Komponen konsumsi seluruhnya mengalami pertumbuhan positif, yang tertinggi terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga sebesar 6,84%. Kedua komponen tersebut sekaligus sebagai penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi penggunaan/pengeluaran. Pada triwulan ini komponen konsumsi rumah tangga merupakan kontributor tertinggi dengan besar sumbangan 3,14%, disusul oleh sektor komponen PMTB sebesar 1,64%. Sementara itu, komponen ekspor dan perubahan stok mengalami pertumbuhan negatif/kontraksi masing-masing sebesar -1,86% dan -20,86%.

## 1.2. PDRB MENURUT PENGGUNAAN/SISI PENGELUARAN

### 1.2.1. Gambaran Umum

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi penggunaan atau pengeluaran pada triwulan II-2006 (secara y-o-y) didominasi oleh komponen PMTB, diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Komponen lainnya seperti konsumsi lembaga nirlaba dan impor juga mengalami pertumbuhan yang tidak jauh berbeda. Hanya komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan terendah, hanya sebesar 3,99%. Namun demikian, ekspor luar negeri yang didominasi oleh ekspor konsentrat tembaga menurun kinerjanya selama dua triwulan terakhir pada tahun 2006 ini, sehingga berdampak cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian NTB, mengingat komponen tersebut terkait dengan kinerja sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang mendominasi perekonomian NTB. Perbedaan yang mencolok tampak jika membandingkan angka pertumbuhan ekonomi yang termasuk pertambangan non migas (1,40%) dengan tanpa pertambangan non migas (38,71%).

Tabel 1.1

Pertumbuhan Sisi Pengeluaran (y-o-y) ADH Konstan Th.2000 (%)	2004				2005				2006	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pengeluaran Kons. Rmh Tangga	4.51	4.98	5.37	4.39	3.55	3.51	5.12	6.50	6.46	6.84
Konsumsi Lemb. Nirlaba	8.27	15.07	7.63	7.12	5.40	4.00	5.91	6.14	4.80	5.92
Pengeluaran Kons. Pemerintah	4.46	3.79	4.58	4.53	3.77	4.88	3.62	2.36	3.34	3.99
Pembentukan Mod. Tetap Bruto (PMTB)	5.78	8.16	7.02	9.56	6.80	5.98	5.93	-0.33	6.91	7.20
Perubahan Stok	149.09	-29.07	310.15	-27.39	29.06	-682.67	-17.47	-245.65	-29.33	-20.86
Ekspor	1.77	11.69	-4.46	15.32	-11.83	-24.85	7.56	15.02	-0.65	-1.86
Impor	18.37	-1.21	6.21	13.90	11.41	35.02	9.13	-1.20	2.66	5.21
Pertumb. Ek. Trmsk Pertambangan Non Migas	6.24	10.43	3.20	6.33	-0.14	-0.67	4.77	4.29	1.21	1.40
Pertumb. Ek. Tidak Trmsk Pertambangan Non Migas	6.25	6.18	4.98	4.51	4.32	5.61	4.81	4.03	3.67	38.71

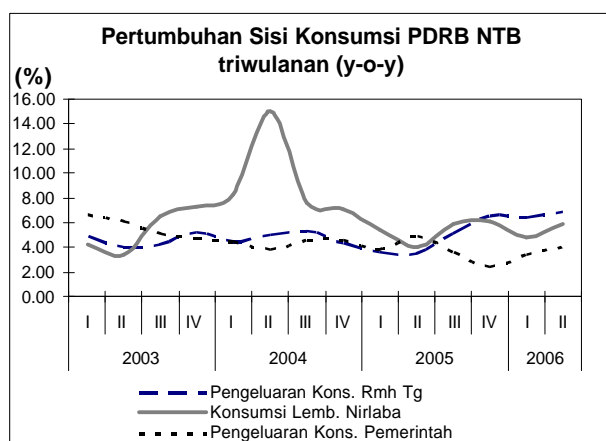
Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Pertumbuhan komponen dari sisi pengeluaran yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan ini mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan (y-o-y) pada triwulan sebelumnya. Komponen PMTB merupakan komponen yang tertinggi pertumbuhannya mencapai 7,20%, diikuti oleh konsumsi rumah tangga dengan angka pertumbuhan sebesar 6,84%. Sedangkan konsumsi lembaga nirlaba dan impor pada triwulan ini mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 5,92% dan 5,21%. Sementara itu, konsumsi pemerintah sebagai komponen dengan pertumbuhan terkecil, sebesar 3,99%. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan salah satu bentuk investasi (investasi fisik), trendnya cenderung terus menurun selama tahun 2005 dan bahkan mengalami pertumbuhan negatif di akhir tahun pada awal hingga pertengahan tahun 2006 mulai menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kegiatan sektor riil. Selain itu, indikasi peningkatan PMTB pada triwulan ini adalah terjadinya peningkatan aktivitas impor barang, terutama impor barang-barang modal, seperti kendaraan, mesin-mesin dsb. Sedangkan perubahan stok dan ekspor pada triwulan ini masih mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -20,86 dan -1,86%. Menurunnya aktivitas ekspor tersebut terutama terjadi pada ekspor luar negeri. Penurunan ini erat kaitannya dengan situasi perekonomian saat ini masih terasa berat dengan berbagai indikator makro ekonomi.

### 1.2.2. Pengeluaran Konsumsi

Grafik 1.4 menggambarkan pertumbuhan PDRB Propinsi NTB secara tahunan (y-o-y) dari sisi konsumsi. Pergerakan pertumbuhan komponen pengeluaran/konsumsi cenderung tidak signifikan, terlihat stabil dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kecuali komponen konsumsi lembaga nirlaba yang mengalami fluktuasi pada pertengahan tahun 2004, namun memasuki tahun 2006 telah kembali pada pola normalnya. Pada triwulan II-2006 ini seluruh komponen konsumsi memiliki kecenderungan untuk meningkat hingga periode mendatang.

Grafik 1.4



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Baik pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba dan pengeluaran konsumsi pemerintah, pada triwulan II-2006 ini seluruhnya mengalami pertumbuhan y-o-y yang semakin meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan yang dicapai pada triwulan sebelumnya. Hal ini mencerminkan daya beli masyarakat mulai pulih dan menjadi lebih baik seiring dengan penurunan laju inflasi baik secara nasional maupun di wilayah regional NTB yang cenderung stabil pada angka yang rendah sejak memasuki tahun 2006. Faktor seasonal seperti panen raya pada triwulan ini juga mempengaruhi peningkatan penghasilan masyarakat yang sebagian besar berkecimpung di bidang pertanian. Demikian pula dengan pemberian bantuan terutama untuk masyarakat miskin

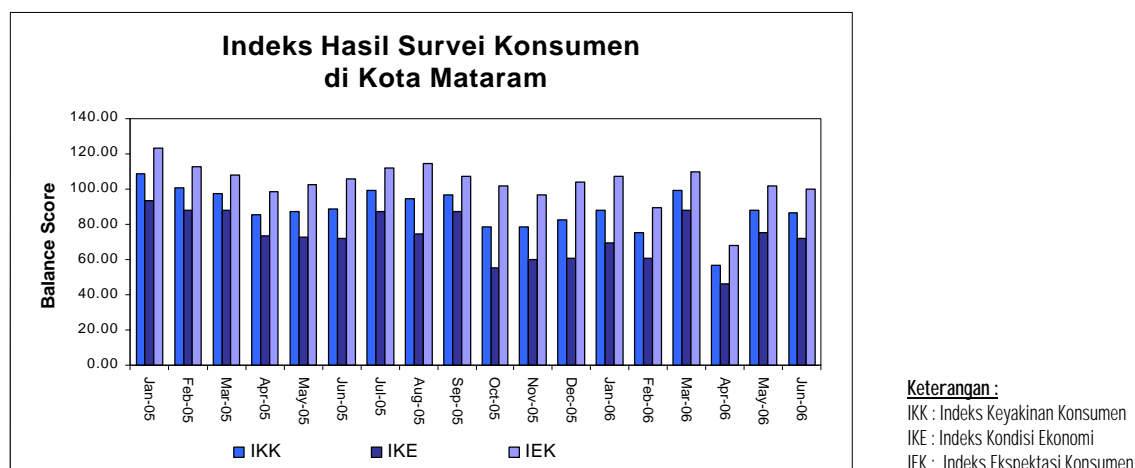
pada triwulan ini dalam bentuk dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap kedua dan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) serta subsidi biaya kesehatan untuk masyarakat ekonomi golongan bawah. Melihat sebagian besar masyarakat NTB masih berada pada tahapan pemenuhan kebutuhan konsumsi, sehingga peningkatan pendapatan yang diperoleh cenderung dialokasikan untuk menambah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain itu, dimulainya tahun ajaran baru memberikan dorongan pula terhadap pengeluaran rumah tangga untuk keperluan sekolah anak.

Seiring dengan kecenderungan pertumbuhan konsumsi pada triwulan II-2006, konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi pemerintah juga tumbuh masing-masing sebesar 5,92% dan 3,99%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan pada triwulan I-2006. Indikator meningkatnya konsumsi lembaga nirlaba berkaitan dengan meningkatnya aktivitas sosial dari lembaga nirlaba yang berada di NTB. Sementara itu, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah adalah peningkatan fungsi pelayanan publik, ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pegawai pemerintah termasuk kepolisian dan ABRI pada triwulan ini jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diindikasikan oleh meningkatnya belanja aparatur pemerintah berupa upah dan gaji pegawai pemerintah sebagai dampak dari peningkatan jumlah pegawai. Khusus untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, kecenderungannya hampir merata sehingga tidak mempunyai pola tertentu setiap triwulannya.

Pertumbuhan seluruh komponen konsumsi pada triwulan ini didorong pula oleh kredit yang disalurkan perbankan di NTB. Kecenderungan perbankan NTB dalam hal penyaluran kredit yang masih didominasi oleh kredit konsumsi hingga triwulan ini (51,55% dari total kredit perbankan NTB) juga merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan komponen konsumsi. Angka pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada kredit konsumsi pada triwulan II-2006 ditinjau secara tahunan dengan membandingkannya pada periode yang sama tahun sebelumnya memperlihatkan peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai 17,99%. Meskipun secara perlahan telah terjadi pergeseran yang ditandai dengan penurunan realisasi kredit konsumsi dan peningkatan kredit modal kerja dan investasi, namun selama ini pangsa kredit konsumsi masih merupakan yang terbesar.

Meskipun konsumsi masyarakat pada umumnya menunjukkan pertumbuhan, namun berdasarkan hasil survei konsumen yang diselenggarakan atas kerjasama Bank Indonesia Mataram dengan BPS Propinsi NTB, ternyata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami sedikit penurunan, baik bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, maupun dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 1.5



Sumber Data : BPS Propinsi NTB. diolah

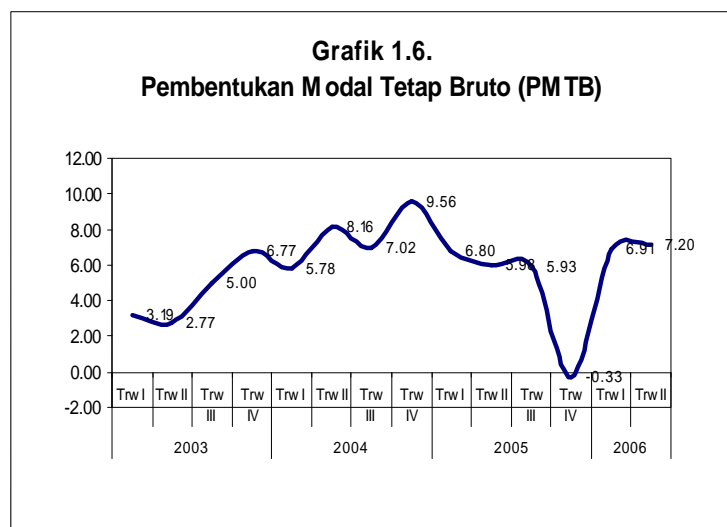
Dari survei tersebut diketahui bahwa keyakinan konsumen berada pada kondisi pesimis (nilai saldo bersih berada dibawah 100), menggambarkan sikap pesimis para konsumen dalam menyikapi perkembangan perekonomian ke depan. Angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari hasil survei konsumen pada triwulan II-2006 (Juni 2006) adalah 86,08. Demikian pula dengan Indeks Ekspektasi Umum (IEK) menunjukkan angka 99,83, dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) sebesar 72,33.

Kondisi pesimis konsumen didasari pada kenyataan bahwa diantara enam komponen yang menjadi dasar penghitungan indeks, hanya komponen penghasilan, baik keadaan saat ini maupun ekspektasi 6 bulan ke depan yang disikapi secara positif (indeks 103,50 dan 129,00). Ketersediaan lapangan kerja saat ini dan perkiraan enam bulan yang akan datang makin menyempit. Kondisi ekonomi enam bulan

yang akan datang juga diprediksi akan semakin memburuk. Akibatnya rencana konsumsi untuk pembelian barang tahan lama semakin dihindari, atau dengan kata lain saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk mengalokasikan anggaran rumah tangga untuk keperluan tersebut.

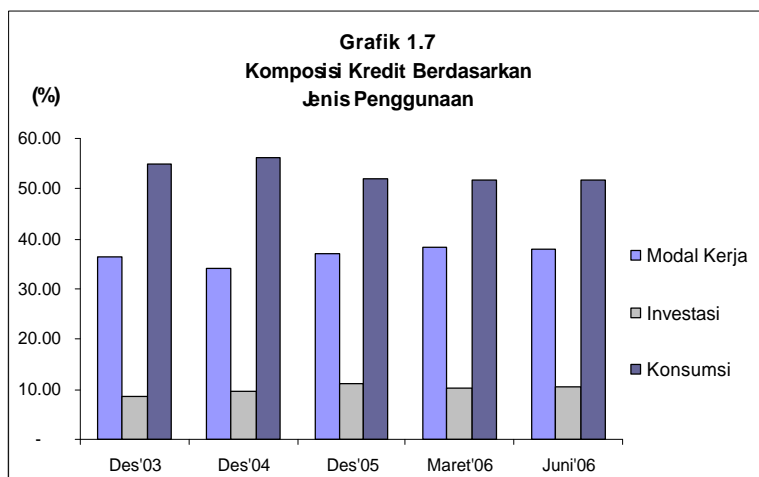
### 1.2.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Grafik 1.6 menggambarkan perkembangan pertumbuhan PMTB secara tahunan (y-o-y). Sejak tahun 2003, pertumbuhan PMTB NTB menunjukkan kecenderungan peningkatan namun pada triwulan IV-2005 terjadi penurunan yang sangat tajam dan menyentuh titik terendah selama 3 tahun terakhir, saat terjadi pertumbuhan negatif sebesar -0,33%. Memasuki tahun 2006 hingga posisi triwulan II-2006, komponen PMTB terus menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Pada triwulan ini, pertumbuhan PMTB NTB mencapai 7,20%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan y-o-y pada triwulan sebelumnya sebesar 4,35%. Peningkatan ini terutama didukung oleh peningkatan kegiatan sektor riil. Selain itu, indikasi peningkatan PMTB pada triwulan ini adalah terjadinya peningkatan aktivitas impor barang. Kondisi tersebut menandakan terjadinya pemulihan meskipun secara perlahan, dari kondisi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya, saat masih sangat dipengaruhi oleh dampak kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM yang berakibat pada meningkatnya biaya-biaya produksi di sektor riil, disamping daya beli masyarakat juga mengalami stagflasi akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa.



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Sementara itu, data realisasi investasi swasta baik PMDN dan PMA belum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2006, hingga posisi triwulan II-2006, belum terdapat realisasi investasi, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (sumber : BKPM Propinsi NTB).



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Dilihat dari sisi penyaluran kredit perbankan (yang sebagian besar disalurkan oleh bank umum) pada triwulan ini, terjadi peningkatan jumlah kredit investasi yang disalurkan oleh perbankan di NTB untuk kegiatan investasi, meskipun tidak cukup signifikan untuk mendorong kegiatan investasi di daerah ini. Dibandingkan dengan posisi Maret 2006, kredit investasi meningkat sebesar 2,36%. Sedangkan jika dibandingkan dengan

triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-o-y) terjadi penurunan sebesar -4,45%.

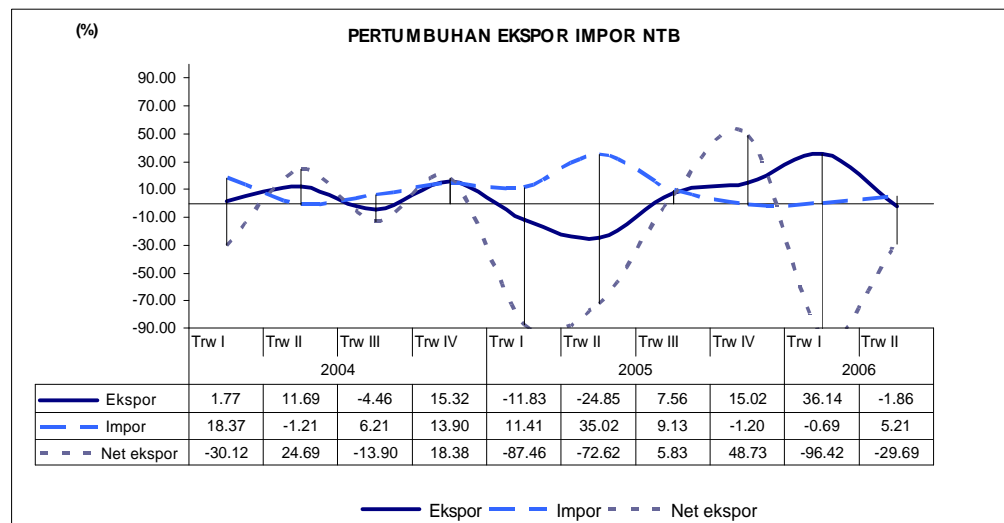
Sejak pertengahan tahun 2004, secara perlahan terjadi pergeseran penyaluran kredit dari kredit konsumsi kepada kredit kepada sektor riil/usaha-usaha produktif yang berupa kredit investasi dan kredit modal kerja. Dari Grafik 1.7 dapat dilihat bahwa meskipun pangsa kredit konsumsi terhadap total kredit yang disalurkan perbankan NTB adalah yang terbesar, rata-rata berada di atas 50%, namun kecenderungannya terus menurun, dari sebesar 56,51% pada tahun 2004 menjadi 51,55% pada akhir triwulan II-2006. Sementara pangsa kredit perbankan yang disalurkan bank umum di NTB kepada berupa modal kerja dan investasi mengalami peningkatan dari 43,75% pada tahun 2004 menjadi 48,45% pada triwulan II-2006. Sektor yang saat ini banyak diminati adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa dunia usaha. Perubahan komposisi kredit dari jenis konsumtif ke sektor produktif ini turut berperan dalam pembentukan investasi di NTB.

#### 1.2.4. Pertumbuhan Net Ekspor (Ekspor – Impor) Regional & Internasional

Kegiatan ekspor dan impor yang dibahas dalam konsep PDRB ini meliputi transaksi barang dan jasa baik antar regional (daerah) maupun dengan dunia internasional (luar negeri). Pada triwulan II-2006, nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan ekspor NTB terlihat menurun. Kegiatan ekspor pada triwulan ini mengalami kontraksi sebesar -1,86% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-o-y). Namun demikian, angka tersebut diperkirakan dapat menjadi lebih besar dari perkiraan sementara (data BPS per April 2006). Demikian pula data ekspor yang ditunjukkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang didominasi oleh ekspor konsentrat tembaga dari PT Newmont Nusa Tenggara. Dari data tersebut, pada triwulan II-2006 (sampai dengan Juni 2006), volume ekspor PT. Newmont Nusa Tenggara mengalami penurunan secara y-o-y sebesar -15,30%. Penurunan dari aktivitas tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi NTB mengingat dominasi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB NTB (pangsanya mencapai 99% terhadap total ekspor NTB), karena penghitungan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000. Namun demikian, meskipun terjadi penurunan kuantitas komoditi yang diekspor, nilai ekspornya menunjukkan peningkatan, yang disebabkan karena naiknya harga komoditi tersebut di pasar internasional. Pangsa ekspor konsentrat ini hampir seluruhnya merupakan konsumsi luar negeri, sehingga lebih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global seperti harga konsentrat dunia dan permintaan dari luar negeri.

Ditinjau dari PDRB NTB berdasarkan sisi penggunaan, secara y-o-y, faktor yang mempengaruhi penurunan kegiatan ekspor pada triwulan II-2006 adalah pertumbuhan negatif yang cukup signifikan pada ekspor triwulanan (q-t-q) triwulan IV-2005 dan triwulan I-2006 masing-masing sebesar -10,56% dan -39,15%, sehingga akibat kontraksi tersebut belum mampu mengangkat peningkatan ekspor secara year to year.

Grafik 1.8



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Sementara itu, perdagangan antar daerah (ekspor regional) menunjukkan peningkatan, karena pada akhir triwulan, hasil panen produk-produk pertanian cukup berhasil terutama produk-produk yang diperdagangkan antar daerah. Namun peningkatan ekspor regional ini belum mampu mendorong pertumbuhan kinerja ekspor NTB secara keseluruhan.

Disisi lain, setelah selama dua triwulan mengalami pertumbuhan negatif, yaitu pada triwulan IV-2005 (-1,20%) dan triwulan I-2006 (-0,69%), pada triwulan ini komponen impor tumbuh sebesar 5,21%. Dari Grafik 1.8, impor NTB terlihat relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada triwulan ini. Meningkatnya aktivitas impor tersebut lebih dipengaruhi oleh impor antar daerah, sementara kontribusi nilai impor NTB dari luar negeri cenderung tidak signifikan. Meningkatnya impor dari luar daerah tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang semakin membaik, tercermin dari nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil. Faktor musiman di NTB turut pula mendorong peningkatan daya beli masyarakat karena adanya panen raya produk-produk pertanian seperti bahan makanan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Meskipun sangat dipengaruhi faktor *seasonal*, NTB selalu mengalami surplus/net ekspor, karena nilai ekspor yang lebih tinggi dari nilai impornya. Namun angka pertumbuhannya tampak cenderung berfluktuasi. Dari Grafik 1.8 terlihat pertumbuhan net ekspor bergerak fluktuatif, yang terendah (kontraksi) terjadi pada triwulan I-2005 dan triwulan I-2006, meskipun masih mengalami net ekspor, namun nilainya mengalami penurunan hingga -87,46% dan -96,42% (y-oy). Memasuki tahun 2006, meskipun angkanya masih negatif, trend angka pertumbuhan net ekspor tampak cenderung meningkat. Net ekspor NTB pada triwulan II-2006 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -29,69%. Hal ini didorong oleh menurunnya nilai ekspor NTB sementara aktivitas impornya meningkat. Tampaknya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong ekspor daerah seperti upaya peningkatan hasil produksi dan kualitas barang ekspor NTB, substitusi barang impor dengan produksi barang yang dapat dibuat/dihasilkan dari daerah NTB, promosi dengan mengikuti berbagai pameran produk yang diselenggarakan di beberapa negara belum dapat mendorong secara signifikan peningkatan nilai ekspor NTB.

## 1.2.5. Kinerja Ekspor - Impor Luar Negeri Propinsi NTB

Berdasarkan data ekspor impor dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB, volume ekspor luar negeri NTB pada triwulan II-2006 (sampai dengan bulan Mei) mengalami penurunan sebesar -26,43% dibandingkan dengan ekspor pada periode yang sama tahun sebelumnya (triwulan II-2005). Realisasi volume ekspor yang tercatat dari data Pemberitahuan Ekspor Barang yang berasal dari pengiriman barang-barang dari NTB ke luar negeri melalui beberapa pelabuhan dan bandar udara di Indonesia pada triwulan II-2006 sebesar 204,85 ton, menurun dari triwulan II-2005 sebesar 278,46 ton. Namun nilai ekspor NTB yang hampir seluruhnya didominasi oleh komoditi konsentrat tembaga mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditi tersebut di pasar internasional. Pada triwulan ini, nilai ekspor NTB mencapai US\$ 322.93 juta, meningkat sebesar 19,34% dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar yang mencapai US\$ 270.61 juta.

Volume : Ton  
Nilai : US \$

Tabel 1.2

REALISASI EKSPOR PROPINSI NTB PERIODE Tw II-2005 & Tw II-2006								
No.	Komoditi	TW II-2005		TW II-2006		Pangsa (%)	Pertumbuhan	
		Volume	Nilai	Volume	Nilai		Volume	Nilai
1	Konsentrat tembaga	278,265.94	269,665,358.30	200,154.98	321,689,292.06	99.61	-28.07	19.29
2	Ikan hias	1.66	12,142.55	0.53	3,554.05	0.00	-68.07	-70.73
3	Abalone	-	-	1.51	7,533.71	0.00		
4	Paprika	3.50	4,275.93	11.05	19,009.09	0.01	215.71	344.56
5	Kepiting	-	-	0.20	790.18	0.00		
6	Ikan segar	-	-	0.32	1,113.73	0.00		
7	Tripang	-	-	0.27	450.00	0.00		
8	Mutiara bulat	0.08	709,304.00	0.06	685,565.40	0.21	-25.00	-3.35
9	Lada	1.00	1,462.18	-	-			
10	Buah Nagasari	0.30	90.00	-	-			
11	Batu Apung	3.00	4,102.90	17.00	3,174.11	0.00	466.67	-22.64
12	Mangan	-	-	4,413.78	106,804.47	0.03		
13	Cumi-cumi	-	-	0.47	1,326.00	0.00		
14	Padan Bali	1.96	3,392.22	-	-		-100.00	-100.00
15	Kerajinan							
1	Gerabah	58.09	76,641.18	63.67	88,325.64	0.03	9.61	15.25
2	Kerajinan kayu	28.61	19,806.51	10.99	63,188.64	0.02	-61.59	219.03
3	Kerajinan bambu	2.18	452.13	7.31	18,883.54	0.01	235.32	4076.57
4	Kerajinan batu	81.61	35,238.50	66.77	16,381.73	0.01	-18.18	-53.51
5	Kerajinan tenun	-	-	0.03	10,006.92	0.00		
6	Kerajinan buah kering	5.95	47,516.02	78.58	169,180.61	0.05	1220.67	256.05
7	Kerajinan keramik	1.80	6,290.60	3.00	8,082.55	0.00	66.67	28.49
8	Kerajinan alang-alang	-	-	12.00	3,734.96	0.00		
9	Kerajinan emas mutiara	0.00	5,565.00	0.00	381.92	0.00		-93.14
10	Tenun ikat	0.03	12,000.00	-	-		-100.00	-100.00
11	Besi	-	-	0.30	1,285.71	0.00		
12	Perunggu	-	-	0.21	19,346.00	0.01		
13	Rotan	1.00	1,500.00	3.30	10,793.20	0.00	230.00	619.55
14	Bad Cover	-	-	0.40	4,158.84	0.00		
15	Carment	-	-	0.60	921.05	0.00		
	Jumlah Kerajinan (1 s.d 15)	179.27	205,009.94	247.16	414,671.31	0.13	37.87	102.27
	<b>Total</b>	<b>278,456.71</b>	<b>270,605,138.02</b>	<b>204,847.33</b>	<b>322,933,284.11</b>	<b>100.00</b>	<b>-26.43</b>	<b>19.34</b>

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB

Mengamati perkembangan ekspor NTB sampai dengan triwulan II-2006, ekspor terbesar ditujukan kepada negara Jepang (US\$ 321.69 juta) , Korea (US\$ 55.27 juta), Philipina (US\$ 21.53 juta), India (US\$ 14.94 juta), dan sisanya ke negara-negara lainnya seperti Jerman, Inggris, Hongkong, Spanyol, Amerika, Perancis, Malaysia, Singapura, Belanda, Belgia, Polandia, dan lain-lain. Produk utama yang diekspor adalah konsentrat tembaga yang secara konsisten mendominasi dengan nilai ekspor tertinggi (pangsanya mencapai 99,51%).



Secara tahunan, dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, pangsa produk ini sedikit menurun dari tahun posisi triwulan II-2005. Nilai ekspor konsentrat tembaga pada triwulan II-2006 mencapai US\$ 321,69 juta atau 99,61% dari total ekspor. Selebihnya adalah produk mutiara, mangan dan produk-produk kerajinan. Dari kerajinan, kerajinan buah kering, gerabah dan kayu merupakan produk unggulan.

Tabel 1.3

Negara Tujuan Ekspor terbesar dan Pelabuhan Muat Ekspor NTB s.d Triwulan II- 2006					
Negara	Nilai (US\$)	Pangsa (%)	Pelabuhan/ Bandara	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
Jepang	230,657,702.67	71.43	Benete - Sumbawa, NTB	321,689,292.06	99.61
Korea	55,271,891.68	17.12	Tanjung Perak - Surabaya	417,845.42	0.13
Philipina	21,533,170.14	6.67	Selaparang - NTB	78,150.16	0.02
India	14,939,014.30	4.63	Soekarno Hatta	641,192.00	0.20
Negara lainnya (16 negara)	531,505.32	0.16	Laju - Bima	106,804.47	0.03
<b>Total</b>	<b>322,933,284.11</b>	<b>100.00</b>	<b>Total</b>	<b>322,933,284.11</b>	<b>100.00</b>

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB

Sebagaimana pada periode-periode sebelumnya, ekspor produk dari NTB pada triwulan ini sebagian besar dikirimkan melalui pelabuhan Benete – Sumbawa, yaitu pengiriman konsentrat tembaga dari PT. Newmont Nusa Tenggara yang berlokasi di Pulau Sumbawa. Di samping pelabuhan tersebut, ada juga komoditi ekspor yang dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya, Bandar Udara Selaparang – NTB, Bandara Soekarno Hatta dan Laju - Bima. Dari data tersebut, terlihat bahwa ekspor dari sektor pertanian (dalam arti luas) relatif kecil, padahal potensi yang dimiliki NTB disektor ini sangat besar, yang tidak terlepas dari karakteristik NTB yang berbasis pertanian. Potensi tersebut belum dapat digarap secara maksimal, seperti potensi peternakan sapi dan kerbau dari NTB, hasil laut lainnya di luar mutiara dan rumput laut (ikan kerapu, kakap, udang, dan sebagainya) dan juga hasil perkebunan. Belum adanya pelabuhan laut internasional di NTB menyebabkan hasil ekspor non migas tidak dapat dikapalkan langsung ke negara tujuan. Dominasi komoditi ekspor pada 1 jenis komoditi (konsentrat tembaga) di NTB ini membawa konsekuensi jangka panjang yang kurang baik, karena sangat dipengaruhi oleh pergerakan ekspor komoditi tersebut. Oleh karena itu, perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak sangat diperlukan dalam rangka pengoptimalan potensi komoditi utama lain untuk ekspor non migas dari NTB, sekaligus sebagai upaya menciptakan lapangan kerja lebih besar.

Tabel 1.4

Realisasi Impor NTB Januari s.d April 2006				
No.	Negara Asal	Komoditi	Importir	Nilai (Rp)
1	Australia	Newmont employee back pack	PT. Newmont Nusa Tenggara	12,259,159
2	Singapura	Capsium seeds	PT. Agrindo Nusantara	12,577,369
3	Singapura	Spareparts for motor cycle	CV. Blue Coral Diving	13,350,955
4	Singapura	Spareparts for motor cycle	CV. Blue Coral Diving	5,059,189
<b>Total</b>				<b>43,246,672</b>

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB

Sementara itu, realisasi impor NTB dari luar negeri pada triwulan II-2006 (sampai dengan April 2006) tidak signifikan nilainya dibandingkan dengan nilai ekspor luar negeri NTB. Berdasarkan PIB dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Mataram yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB, pada triwulan ini realisasi impor NTB hanya sebesar Rp 43,25 juta, antara lain berupa produk *Newmont employee back pack*, *capsium seeds* dan *spareparts for motor cycle* dari Australia dan Singapura. Pada umumnya barang impor NTB digunakan untuk sektor yang produktif seperti untuk kegiatan pariwisata. Secara net, perdagangan luar negeri Propinsi NTB pada triwulan ini mengalami surplus perdagangan yang sangat besar.

### 1.3. PDRB MENURUT SISI SEKTORAL (PENAWARAN)

#### 1.3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB

Selama 5 tahun terakhir dan sampai dengan pertengahan tahun 2006, rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB mencapai 4,07%. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan rata-rata tertinggi dicapai oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 10,84%. Sektor lainnya hanya berada pada kisaran rata-rata pertumbuhan sebesar 2,09% sampai 6,42%. Melihat kondisi pada pertengahan tahun 2006, terdapat 6 sektor yang mengalami pertumbuhan di atas rata-rata selain sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor bangunan. Hanya 3 sektor yang tumbuh di bawah rata-rata yaitu sektor jasa-jasa; sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan.

Tabel 1.5  
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB

SEKTOR	Pertumbuhan (y-o-y)						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (s.d Tw II-06)	Rata-rata
Pertanian	-0.02	0.61	4.63	2.73	2.81	1.77	2.09
Pertambangan	20.40	3.49	0.25	8.88	(3.98)	(6.19)	3.81
Industri	5.67	5.88	6.49	6.35	7.29	6.83	6.42
Listrik	9.06	7.04	3.13	8.07	4.06	5.53	6.15
Bangunan	4.47	4.59	5.86	5.61	5.31	7.04	5.48
Perdagangan	6.62	5.27	5.14	6.78	6.22	7.13	6.19
Pengangkutan	4.27	6.64	5.80	6.70	7.22	6.80	6.24
Keuangan	7.35	10.23	20.89	16.14	5.70	4.72	10.84
Jasa-Jasa	0.59	1.72	1.58	5.16	4.01	1.34	2.40
<b>PDRB</b>	<b>7.32</b>	<b>3.34</b>	<b>3.87</b>	<b>6.41</b>	<b>2.17</b>	<b>1.30</b>	<b>4.07</b>

Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

#### 1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB ditinjau Secara Tahunan (y-o-y)

Pada triwulan II-2006, pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB secara tahunan (y-o-y) sebesar 1,40%, didorong oleh pertumbuhan di semua sektor. Dibandingkan dengan pertumbuhan secara y-o-y pada triwulan sebelumnya, terlihat adanya perlambatan pertumbuhan. Hal ini didorong oleh turunnya pertumbuhan sektor ekonomi yang merupakan sektor dominan dalam perekonomian NTB. Sektor-sektor

yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan ini adalah sektor industri pengolahan (9,43%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (9,01%).

Tabel 1.6  
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan Th.2000)

SEKTOR	TRW IV-2005				TRW I-2006				TRW II-2006			
	NILAI	DISTR	GROWTH	SUMBG	NILAI	DISTR	GROWTH	SUMBG	NILAI	DISTR	GROWTH	SUMBG
	(Miliar Rp)	(%)	y-o-y (%)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	y-o-y (%)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	y-o-y (%)	(%)
Pertanian	957.61	24.63	3.85	0.95	851.10	24.76	1.63	0.40	911.25	24.30	1.90	0.50
Pertambangan	1,064.34	27.38	4.97	1.35	866.53	25.21	-5.31	-1.43	984.95	26.26	-7.07	-2.21
Industri	191.02	4.91	2.49	0.12	158.50	4.61	4.22	0.19	179.50	4.79	9.43	0.46
Listrik	12.06	0.31	3.73	0.01	11.33	0.33	5.20	0.02	12.09	0.32	5.87	0.02
Bangunan	269.05	6.92	5.13	0.35	226.96	6.60	8.64	0.53	241.53	6.44	5.44	0.37
Perdagangan	549.50	14.13	3.03	0.43	479.70	13.96	5.26	0.71	554.76	14.79	9.01	1.35
Pengangkutan	286.38	7.37	7.44	0.53	273.05	7.94	6.27	0.47	288.04	7.68	7.33	0.58
Keuangan	176.88	4.55	4.77	0.22	177.09	5.15	5.41	0.27	174.32	4.65	4.03	0.20
Jasa-Jasa	380.73	9.79	3.15	0.31	392.92	11.43	0.48	0.06	403.86	10.77	2.21	0.26
Total	3,887.57	100.00	4.29	4.29	3,437.19	100.00	1.21	1.21	3,750.32	100.00	1.40	1.40

Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Dilihat dari besarnya sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor, kontributor terbesar bersumber dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Besarnya sumbangan oleh sektor ini mencapai 1,35% dari total pertumbuhan ekonomi NTB. Sektor lain hanya menyumbang di bawah 1%, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi (0,58%), sektor pertanian (0,50%). Sisanya disumbang oleh sektor lain yang besarnya tidak signifikan. Sementara itu, pada triwulan ini, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor dominan berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi NTB.

### 1.3.3. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

#### 1.3.3.1. Kondisi Dunia Usaha

Pertumbuhan secara triwulanan yang terjadi di beberapa sektor sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan melalui kerja sama antara Bank Indonesia Mataram dengan BPS Propinsi NTB setiap triwulan. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi secara triwulanan (q-t-q), hampir seluruh sektor menunjukkan pertumbuhan. Secara umum, ditinjau secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB pada triwulan II-2006 ini sangat dipengaruhi oleh faktor *seasonal* sesuai dengan karakteristik daerah ini.

Dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha, diperoleh gambaran bahwa pada umumnya para responden yang berasal dari kalangan dunia usaha menyatakan bahwa kegiatan usaha pada triwulan ini mengindikasikan terjadinya peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih/NSB (balance score) 16,67, meningkat dari sebelumnya sebesar -28,33.

Tabel 1.7  
 Nilai Balance Score Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

Sektor	TRW IV-05		TRW I-06		TRW II-06	
	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis
<b>Umum</b>	<b>-5.00</b>	<b>15.00</b>	<b>-28.33</b>	<b>10.00</b>	<b>16.67</b>	<b>13.33</b>
Pertanian	-9.52	28.57	28.57	19.05	52.38	4.76
Pertambangan	-100.00	-50.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
Industri	0.00	-25.00	-75.00	-25.00	-25.00	0.00
Listrik	-50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
Bangunan	0.00	0.00	-100.00	0.00	-	-
Perdagangan	9.09	18.18	-63.64	9.09	-	27.27
Pengangkutan	14.29	28.57	-85.71	14.29	-	28.57
Keuangan	100.00	50.00	100.00	50.00	-	50.00
Jasa-Jasa	-40.00	0.00	-40.00	0.00	-	20.00

Sumber Data : Hasil Survei SKDU BI-BPS Prop.NTB

Peningkatan kegiatan usaha pada triwulan ini tercermin pada meningkatnya permintaan pasar, produksi dan nilai penjualan/pendapatan. Peningkatan kegiatan usaha terutama terjadi pada sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran, dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya persediaan dari hasil panen raya (disemua subsektor di sektor pertanian) baik di sub sektor bahan makanan, hasil perikanan, peternakan dan perkebunan, dengan peningkatan terbesar terjadi pada subsektor tanaman bahan makanan. Tibanya tahun ajaran baru bagi siswa sekolah dan meningkatnya kunjungan wisatawan ke NTB mendorong peningkatan aktivitas di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu peningkatan juga didukung oleh optimisme responden terhadap kondisi keuangan dan situasi bisnis yang semakin meningkat.

Sementara itu, persepsi responden terhadap situasi bisnis pada triwulan II-2006 mengindikasikan optimisme, tercermin dari Saldo Bersih (SB) 13,33, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan SB 10,00.

Dari hasil survei, terdapat hanya ada 1 (satu) sektor yang mengindikasikan penurunan kegiatan usaha pada triwulan ini, yaitu sektor industri pengolahan. Turunnya kegiatan sektor tersebut lebih didorong oleh penurunan produksi sebagai akibat situasi perekonomian yang tidak menentu dan menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, terbatasnya bahan baku dan kurangnya permintaan dalam negeri merupakan faktor yang membatasi kinerja perusahaan disektor ini.

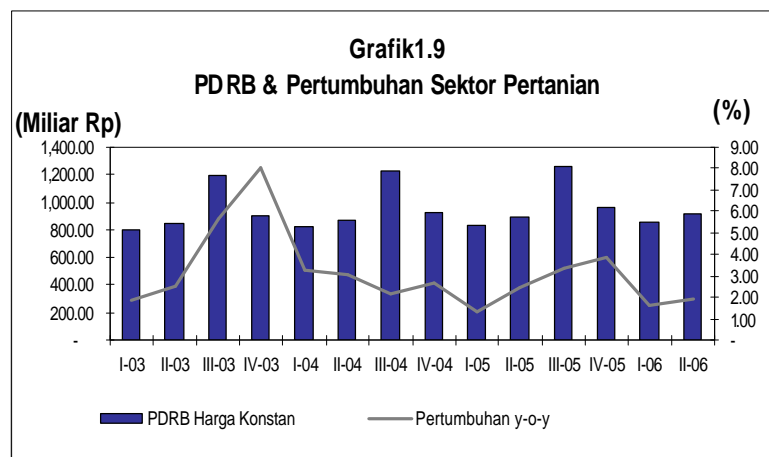
### 1.3.3.2. Penggunaan Tenaga Kerja

Pada triwulan ini, penggunaan tenaga kerja secara umum di NTB cenderung stabil, ditunjukkan oleh sebagian besar responden (86,67%) dunia usaha yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengurangi atau menambah jumlah karyawannya (tetap). Hanya sebagian kecil yang berkeinginan mengurangi (3,33% dari jumlah responden) atau menambah (10% dari jumlah responden) jumlah tenaga kerjanya. Optimisme penambahan tenaga kerja teridentifikasi berasal dari sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sikap pesimis pengurangan tenaga kerja terjadi pada sektor pertambangan dan sektor listrik, gas dan air bersih dilatarbelakangi berbagai masalah yang terjadi di sektor tersebut akhir-akhir ini.

### 1.3.4. Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral

#### 1.3.4.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada triwulan ini, ditinjau secara tahunan (y-o-y) hanya tumbuh sebesar 1,90%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,63%. Peningkatan pada sektor ini disebabkan karena peningkatan pada hampir semua sub sektornya, kecuali sub sektor kehutanan yang masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar -6,16%. Selama 3 tahun terakhir, sub sektor ini terus mengalami pertumbuhan negatif, kecuali pada triwulan II-2005 tumbuh positif sebesar 2,14%. Masih maraknya kasus *illegal logging* di NTB dirasakan sangat menghambat pertumbuhan sub sektor ini. Tingginya kebutuhan kayu dan menurunnya pasokan kayu dari luar daerah serta belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kayu dari daerah merupakan pemicu tingginya penebangan liar di NTB.



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Titik *illegal logging* di NTB berada di wilayah sekitar Gunung Tambora, Lombok bagian selatan dan beberapa kawasan di wilayah Sumbawa.

Dari sektor pertanian, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sub sektor perikanan sebesar 3,85%, diikuti oleh sub sektor peternakan sebesar 3,04%, tanaman perkebunan sebesar 1,29% dan yang terendah adalah tanaman bahan makanan sebesar 1,14%. Menurut Dinas Pertanian NTB,

pada tahun 2006, produksi pertanian NTB diperkirakan akan dapat mencapai lebih dari 1,5 juta ton dengan luas areal tanam sekitar 330.766 ha. Nilai tersebut merupakan nilai produksi tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2005 dan hingga April 2006, NTB tercatat mengalami surplus beras dan bahkan bisa mengirimkan beras ke daerah lain seperti Kalimantan dan NTT. Untuk mendukung upaya pencapaian target produksi tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah seperti perluasan area dan peningkatan indeks pertanian. Sedangkan dalam rangka meningkatkan produktifitas, beberapa aspek perlu diprioritaskan seperti penggunaan benih unggul yang bersertifikat, pemupukan dan pengairan. Demikian pula upaya revitalisasi penyuluhan pertanian juga perlu dilakukan.

Pertumbuhan pada sub sektor perkebunan didorong oleh berlangsungnya musim panen tembakau pada triwulan ini. Dari sisi permintaan, permintaan terhadap produk tembakau Virginia NTB terus meningkat. Hingga saat ini mutu tembakau Virginia omprongan Lombok diakui sebagai yang terbaik di Indonesia. Bahkan NTB merupakan pemasok 60% dari kebutuhan tembakau Virginia nasional. Usaha perkebunan tembakau ini cukup besar pengaruhnya dalam menggerakkan roda perekonomian NTB dan dapat menyerap tenaga kerja hingga 126 ribu orang di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Hingga saat ini, luas areal penanaman tembakau Virginia di NTB mencapai 18 ribu hingga 20 ribu hektar setiap tahunnya. Pada tahun 2005, dari areal seluas 18.746 hektar dapat dihasilkan 36.500 ton daun kerosok dengan nilai jual sekitar Rp 484 miliar. Faktor lain yang juga mendorong pertumbuhan di sub sektor perkebunan adalah dimulainya pengembangan agribisnis kakao di Lombok Timur dan penanaman jambu mete sebagai salah satu produk ekspor NTB. Tanaman jarak yang sedang dikembangkan di NTB juga mestinya akan turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan di sub sektor ini, karena alternatif bahan bakar dengan bahan alam (bio energi) telah menjadi prioritas pemerintah pada saat ini dan ke depan, mengingat kondisi

geografis di NTB (termasuk daerah yang cocok untuk pengembangan tanaman jarak) dan potensi lahan yang sangat luas, terutama di Pulau Sumbawa.

Sementara itu, dari sub sektor tanaman bahan makanan juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,14% pada triwulan ini. Pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya supply beras yang telah mengalami masa panen raya. Faktor cuaca yang sangat mendukung turut berpengaruh terhadap keberhasilan musim panen ini. Di samping itu, permintaan atas produksi hasil tanaman palawija, terutama jagung juga meningkat. Saat ini jagung NTB sangat diminati oleh negara Philipina dan Malaysia. Namun demikian, belum seluruh permintaan tersebut dapat dipenuhi karena produksi jagung di NTB belum terlalu banyak. Selain itu, NTB membutuhkan sekitar 1,2 juta ton per tahun untuk kebutuhan pakan ternak. Dari kebutuhan tersebut, baru dapat dipenuhi sekitar 500 ribu ton, sehingga saat ini kekurangannya didatangkan dari luar daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut, sejak tahun 2006 di NTB diadakan program sejuta jagung, yang akan didukung oleh tiga agro sistem yaitu potensi lahan kering, lahan sawah yang dimanfaatkan pada musim kemarau dan daerah irigasi. Jagung yang dibudidayakan adalah varietas lamuru dan hibrida. Selain jagung, kedelai juga memiliki potensi yang cukup besar. Lahan pengembangannya terkonsentrasi di empat kabupaten, yaitu Lombok Tengah, Sumbawa, Bima dan Dompu. Demikian pula dengan kacang tanah yang pengembangannya hampir merata di seluruh wilayah NTB.

Secara umum, pertumbuhan di sub sektor perikanan didukung oleh potensi kelautan yang sangat besar yang dimiliki NTB. Luas areal penangkapan ikan mencapai 31.143 km<sup>2</sup>, dengan potensi produksi sebesar 102.804 ton, potensi lestari sebesar 98.450 ton dan potensi pemanfaatan sebesar 81.610 ton (82,90%). Saat ini potensi sumber daya perikanan budidaya laut di NTB mencapai 83.000 ton, terdiri dari rumput laut dan ikan seperti kerapu dan udang. Rumput laut merupakan salah satu komoditi yang diandalkan dengan produksi yang relatif tinggi dan stabil. Areal pengembangannya mencapai 41.000 ha. Hasil ekspornya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk lain. Hasil produksi perikanan lainnya adalah mutiara. Saat ini, permintaan terhadap mutiara terus meningkat, tercermin dari tingginya permintaan terhadap produk ini. Pada tahun 2005, produksi biji mutiara mencapai 1,8 ton. Potensi mutiara di NTB belum digarap secara optimal. Potensi areal budidaya mutiara di NTB mencapai 25.000 ha, dengan potensi produksi sebesar 3,72 ton dan pemanfaatannya sebesar 1,35 ton (48,39%). Sementara itu, potensi pengembangan ikan kerapu, lobster dan hasil ikan lainnya di NTB mencapai 17.000 ha, dengan produksi sebesar 30.000 ton dan tingkat pemanfaatan sebesar 171,20 ton (0,57%). Khusus untuk komoditi udang, potensi areal budidayanya seluas 25.245 ha, yang baru dimanfaatkan sekitar 20% dengan produksi sebesar 6.954 ton. Potensi areal perikanan budidaya payau (tambak) tersebar di enam kabupaten di NTB, yaitu di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat dan Dompu. Dari data Dinas Perikanan dan Kelautan NTB diketahui bahwa 60% ekspor udang Indonesia ke sejumlah negara tujuan berasal dari NTB. Hal ini didukung oleh kualitas udang NTB yang cukup baik dan areal budidaya udang dan tempat penangkapan udang disekitar perairan NTB cukup baik, tidak ada gangguan pencemaran terutama kandungan zat-zat kimia.

Dalam rangka percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah daerah telah dan akan melakukan beberapa upaya, antara lain : pembangunan pelabuhan perikanan (Teluk Awang dan Teluk Bima), loka budidaya laut Sekotong, program pemetaan kawasan perikanan, pembangunan pasar lelang mutiara di kawasan Sekotong, Lombok Barat, program pemberdayaan masyarakat terutama bagi nelayan dan pembudidaya ikan, program sistem pengawasan berbasis masyarakat, program KKN di desa-desa pesisir dan pulau kecil dan program penyuluhan pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan dengan melibatkan koordinasi pondok pesantren, Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid yang sekaligus merupakan gerakan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir.

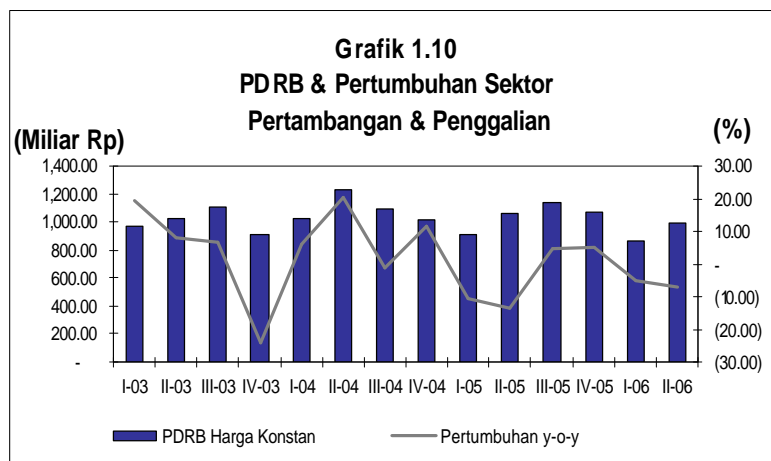
Sementara itu, tingginya permintaan hewan ternak merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan yang terjadi di sub sektor peternakan. Hasil peternakan yang banyak dibutuhkan adalah kerbau dan sapi. Permintaan ternak kerbau dari negara luar seperti

Venezuela untuk menunjang kegiatan pertaniannya cukup tinggi. Negara ini tidak membatasi pesanan ternak kerbaunya, melainkan tergantung *supply* yang dapat dipasok oleh peternak NTB yang memenuhi persyaratan kesehatan. Dengan demikian, menimbulkan peluang bagi peternak NTB untuk bisa menjual kerbaunya ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi. Selama ini NTB mengirim ternaknya ke Malaysia dan Timor Leste rata-rata 3.000 ekor per tahun. Potensi ternak terutama sapi dan kerbau di NTB mencapai 450 ribu ekor sapi dan 250 ribu ekor kerbau, sebagian dikirim ke daerah lain seperti Jakarta dan Jawa Barat.

Ditinjau dari jumlah kredit yang disalurkan perbankan NTB kepada sektor pertanian pada triwulan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan II-2006, kredit kepada sektor pertanian meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 16,91%. Dana yang bergulir ini turut memberikan peranan terhadap pertumbuhan sektor pertanian NTB pada triwulan ini.

### 1.3.4.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan II-2006 mengalami pertumbuhan negatif (*y-o-y*) sebesar -7,07%. Pada triwulan ini sektor ini memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi NTB sebesar -2,21%. Kontraksi yang terjadi pada triwulan ini lebih besar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -5,31%. Pertumbuhan yang terjadi di sektor ini pada triwulan II-2006, didorong oleh menurunnya volume produksi komoditi konsentrat tembaga yang dihasilkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara.



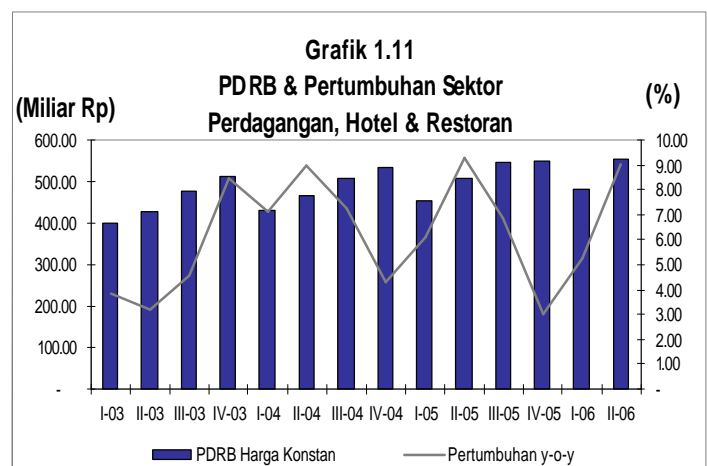
Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Tingginya tingkat ketergantungan daerah NTB terhadap komoditi ini tercermin dari besarnya pangsa ekspor konsentrat tembaga terhadap total ekspor NTB yang mencapai 99%. Demikian pula *share* sektor pertambangan dan penggalian yang mendominasi total PDRB NTB (pada triwulan II-2006 *share*-nya mencapai 37,57%- ADH Berlaku). Oleh karena itu, pergerakan pertumbuhan di sektor ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Pada triwulan ini, berdasarkan data dari

PT. Newmont Nusa Tenggara terjadi penurunan volume produksi yang cukup signifikan sebesar -15,30%, dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

### 1.3.4.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Dari Grafik 1.11 terlihat bahwa perkembangan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran cenderung berfluktuasi dan dipengaruhi oleh faktor musiman. Pertumbuhan sektor ini mengalami peningkatan di awal hingga



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

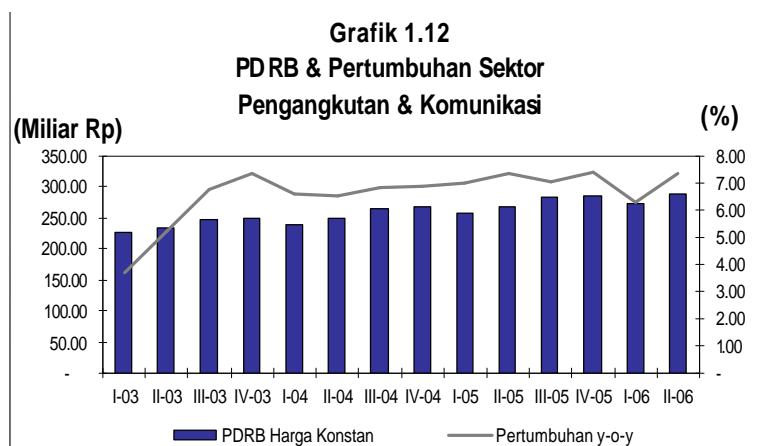
pertengahan tahun dan selanjutnya akan menurun pada triwulan II dan IV setiap tahunnya. Demikian pula yang terjadi pada triwulan ini, secara tahunan (y-o-y), sektor ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 9,01%. Sumbangan yang diberikan pada triwulan ini merupakan yang tertinggi diantara sektor-sektor lainnya, yang mencapai 1,35%. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh pertumbuhan pada sub sektornya, yaitu sub sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 1,24% dan sub sektor hotel dan restoran sebesar 0,11%. Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran didorong oleh peningkatan permintaan terhadap barang-barang sandang seperti barang kebutuhan sekolah seiring dengan tibanya tahun ajaran baru. Disamping itu, tampak adanya indikasi peningkatan penjualan barang-barang kebutuhan konsumsi masyarakat terkait dengan meningkatnya persediaan hasil panen raya pada triwulan ini. Disisi lain, peningkatan jumlah kredit yang disalurkan perbankan kepada sektor perdagangan, hotel dan restoran pada triwulan ini sangat besar memberikan andil terhadap pertumbuhan sektor ini, dimana pertumbuhan kreditnya secara y-o-y mencapai 27,74%.

Pertumbuhan sub sektor hotel dan restoran dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan ke NTB yang cenderung semakin membaik. Setiap tahun, secara umum dalam situasi normal, angka kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 sampai dengan 2005, jumlah wisatawan (mancanegara dan nusantara) yang berkunjung terus meningkat. Pada tahun 2006, kunjungan wisatawan asing dan domestik ditargetkan mencapai 290 ribu orang dan sejumlah 40 ribu diantaranya diharapkan dari wisatawan asing. Dari data dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lombok Barat saja terlihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok Barat pada tahun 2005 mencapai 222.730 orang, meningkat 11% dibandingkan tahun 2004 sebanyak 200.240 orang. Dari jumlah tersebut, wisatawan asing mendominasi sekitar 60% (134.531 orang). Wisatawan mancanegara terbanyak berasal dari Eropa seperti Jerman, Belanda, Italia, Inggris, disusul dari kawasan Asean, Asia Pasifik dan Amerika. Tempat terfavorit di Lombok Barat yang dikunjungi adalah Senggigi (81,36%), Gili Terawangan (10,74%), dan tempat lainnya seperti Gili Meno, Gili Air, Tanjung, Narmada, Sekotong dan Bayan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh pula terhadap peningkatan jumlah tamu yang menginap dihotel dan aktivitas penjualan makanan oleh restoran. Pada pertengahan triwulan II-2006, diselenggarakan pertemuan Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia di Mataram. Pertemuan tersebut berdampak positif terhadap kepariwisataan NTB, karena sekaligus digunakan sebagai ajang promosi obyek pariwisata NTB, terutama untuk wisatawan dalam negeri. Hal ini berdampak baik terhadap sub sektor hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi dan perdagangan.

Dalam rangka meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke NTB, pada bulan April 2006 dilakukan *road show* pengembangan potensi wisata NTB oleh Badan Promosi Wisata Lombok Sumbawa ke Jakarta dan Bandung. Kedua daerah tersebut merupakan daerah potensial sumber wisatawan domestik. Saat ini 80% kunjungan wisatawan ke NTB didominasi oleh wisatawan domestik. Meningkatnya aktivitas kepariwisataan diharapkan akan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian NTB, terutama di bidang kerajinan khas NTB seperti gerabah, kain tenun dan mutiara.

#### 1.3.4.4. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi hingga triwulan ini masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 7,33%. Sumbangan yang diberikan oleh sektor ini terhadap perekonomian NTB mencapai 0,58%, merupakan yang tertinggi kedua setelah sumbangan dari sektor perdagangan, hotel dan



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah



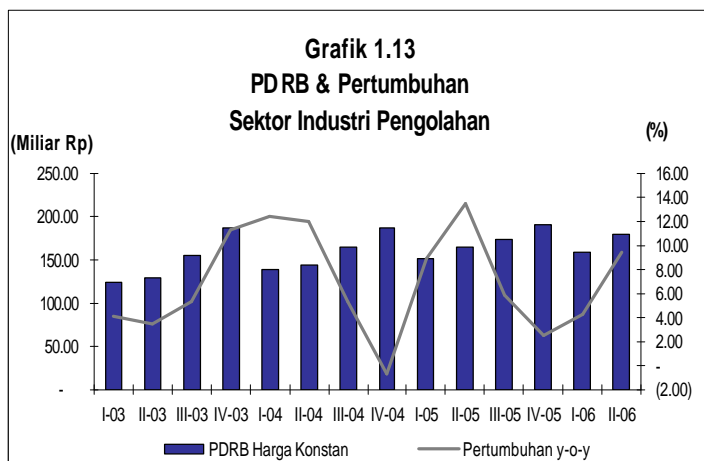
restoran. Selama 3 tahun terakhir, angka pertumbuhan sektor ini secara konsisten berada di atas 5% (dapat dilihat pada Grafik 1.12).

Pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan ini didorong oleh pertumbuhan angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara. Terkait dengan penggunaan jasa angkutan darat dan laut yang terjadi pada triwulan ini, dipicu oleh masih banyaknya kebutuhan barang-barang kebutuhan masyarakat NTB yang didatangkan dari luar daerah. Selain itu kegiatan perdagangan antar daerah melalui darat dan laut juga meningkat sehubungan dengan tibanya panen raya di triwulan ini. Dari angkutan udara, persaingan tarif penerbangan (dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya) masih merupakan faktor pendorong lebih dipilihnya alat transportasi tersebut oleh masyarakat yang ingin mengadakan perjalanan jauh. Apalagi pada akhir triwulan ini, masa liburan siswa sekolah telah dimulai. Selama ini, banyak siswa NTB yang melanjutkan sekolah ke luar daerah. Faktor lainnya seperti diselenggarakannya pameran hasil produksi dan kerajinan NTB dalam *event* Mataram Expo turut memberikan dorongan terhadap pertumbuhan sektor ini.

Sementara itu, antusiasnya masyarakat yang berminat menggunakan layanan CDMA karena tarifnya yang lebih murah dari GSM mendorong perkembangan di sub sektor komunikasi di Kota Mataram. Perluasan jaringan tersebut sedang diarahkan pula ke Pulau Sumbawa. PT Telkom dalam hal ini sebagai penyedia jasa telah berencana membangun tower flexi di wilayah Sumbawa.

#### 1.3.4.5. Sektor Industri Pengolahan

Grafik 1.11 menggambarkan perkembangan sektor industri pengolahan selama 3 tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan sektor ini cenderung berfluktuasi. Selama tahun 2005, pertumbuhan terendah terjadi pada triwulan IV-2005, setelah yang terjadi pada triwulan IV-2004. Pada triwulan II-2006, pertumbuhan sektor ini cukup tinggi, mencapai 9,43% dan memberikan kontribusi sebesar 0,46%. Beberapa kegiatan yang berskala nasional yang diselenggarakan di NTB merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya permintaan terhadap hasil produksi industri kecil dan menengah di NTB.



Sumber Data : BPS Propinsi NTB, diolah

Industri kecil dan menengah di Kota Mataram telah banyak mengalami perkembangan. Dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram, sejak tahun 2000 hingga pertengahan tahun 2006, jumlah unit usaha industri formal berjumlah 1.062 buah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.392 orang dengan nilai investasi mencapai Rp36,3 miliar, nilai produksi sekitar Rp202,9 miliar dan penggunaan bahan baku senilai Rp99,2 juta. Sementara untuk industri non formal, meliputi 175 sentra terdiri dari 3.348 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 10.959 orang

dan nilai investasi sebesar Rp6,8 miliar, nilai produksi sekitar Rp22,5 miliar dan nilai bahan baku sekitar Rp10,2 miliar.

Saat ini salah satu produk unggulan industri kecil NTB dari hasil kerajinan kayu (cukli) karena kekhasannya dalam hal desain/rancang, telah berhasil menembus pasar eropa antara lain Inggris, Perancis, Jerman dan Belanda. Selain itu, kerajinan lain berupa kotak antik, pengolahan rumput laut, kerajinan emas, perak dan mutiara, tenun, kerang, dodol nangka, kacang mete, kerupuk, telur asin, tahu, tempe dan keripik nangka juga banyak diminati masyarakat.

Disisi lain, besarnya pangsa kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor industri pengolahan sangat memberikan dorongan positif terhadap perkembangan sektor ini. Pada triwulan II-2006, pangasanya mencapai 23,47% dari total kredit yang disalurkan perbankan NTB.

#### 1.3.4.6. Sektor Lainnya

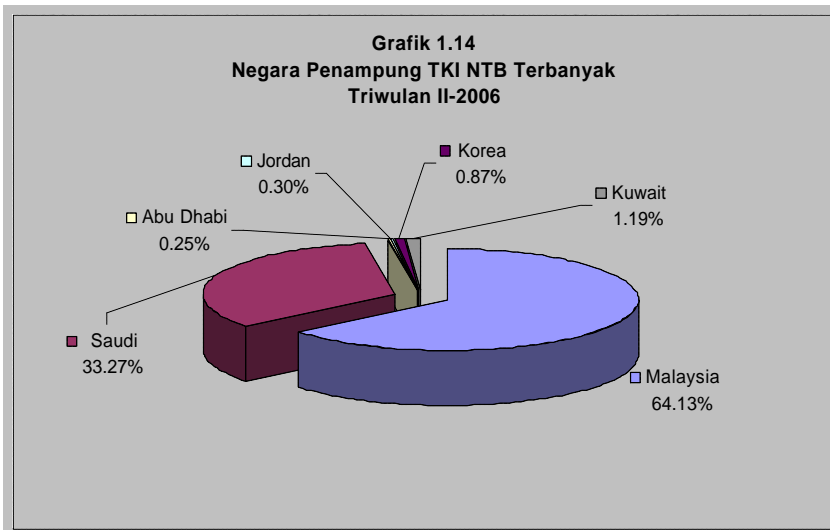
Sektor lainnya seperti bangunan; listrik, gas & air bersih; keuangan; persewaan & jasa perusahaan serta jasa-jasa juga memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian NTB, meskipun nilainya relatif kecil. Pada triwulan II-2006, sektor bangunan tumbuh cukup tinggi, sebesar 5,44%, namun sumbangan yang diberikan relatif masih rendah, sebesar 0,37%. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sektor ini secara konsisten mengalami pertumbuhan di atas 4%, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu sektor yang berpotensi untuk terus berkembang. Salah satu indikator pertumbuhan di sektor bangunan adalah realisasi proyek-proyek swasta, terutama menjamurnya pembangunan ruko-ruko dan bangunan/perumahan baru di Mataram. Pembangunan gedung-gedung tersebut diharapkan dapat menjadi mata rantai guna mendukung terwujudnya rencana pengembangan Kota Mataram sebagai pusat perbelanjaan dalam konsep belanja wisata yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Disamping pengaruh dari realisasi pembangunan proyek-proyek pihak swasta, pertumbuhan ini didorong pula oleh meningkatnya pendanaan dari perbankan NTB, hingga mencapai 34,38% (y-o-y). Meskipun angka NPL sektor konstruksi cenderung tinggi (per Juni 2006 sebesar 8,58%), prospek perkembangannya yang cukup baik pada sektor ini membuatnya cukup menarik untuk dibiayai perbankan. Hal ini terbukti dari tetap konsistennya pertumbuhan sektor ini meskipun pada periode sebelumnya terjadi kenaikan harga bahan bangunan.

Sementara itu, sektor listrik, gas dan air bersih juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan ini, yaitu sebesar 5,87%, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi NTB paling rendah, hanya sebesar 0,02%. Pertumbuhan di sektor ini terutama didorong oleh pertumbuhan sub sektor listrik. Adanya ekspansi PT. PLN di Lombok Timur yang melayani kebutuhan listrik untuk 18.600 orang di wilayah tersebut setelah tidak beroperasinya lagi KLP Sinar Rinjani yang selama ini memasok kebutuhan listrik di Lombok Timur, turut mendorong pertumbuhan (y-o-y) sub sektor listrik ini. Peningkatan pemasokan energi listrik juga terjadi di Kabupaten Bima, tepatnya di wilayah Kecamatan Wera yang melayani 2.500 pelanggan PT. PLN. Pada akhir triwulan II-2006, sub sektor listrik ini mengalami kendala akibat terjadinya kelangkaan BBM, namun masalah tersebut tidak terlalu berdampak signifikan. Keterbatasan pasokan BBM jenis solar yang merupakan bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel di Mataram menyebabkan PT. PLN sempat mengalami hambatan dalam operasionalnya menyediakan pelayanan kebutuhan listrik masyarakat sehingga dilakukan pemadaman selama beberapa hari.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada triwulan ini tumbuh sebesar 4,03%. Dengan pertumbuhan tersebut, sektor ini hanya mampu menyumbang 0,20% terhadap perekonomian NTB. Pertumbuhan sektor bangunan turut mendorong pula pertumbuhan sektor ini, karena didorong oleh meningkatnya jasa sewa bangunan sebagai kontributor terbesar terhadap sektor ini. Sedangkan sektor jasa-jasa pada triwulan ini hanya tumbuh sebesar 2,21% dan memberikan sumbangan yang sangat kecil (0,26%).

#### 1.4. TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI

Tenaga Kerja Indonesia di NTB memiliki peranan yang cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, pemasukan dari TKI ini setiap tahun jumlahnya cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari potensi NTB yang telah dikenal sebagai salah satu daerah potensial pengirim TKI. Dampak positif lain dari potensi tersebut adalah memberikan peluang bagi berkembangnya lembaga PJTKI.



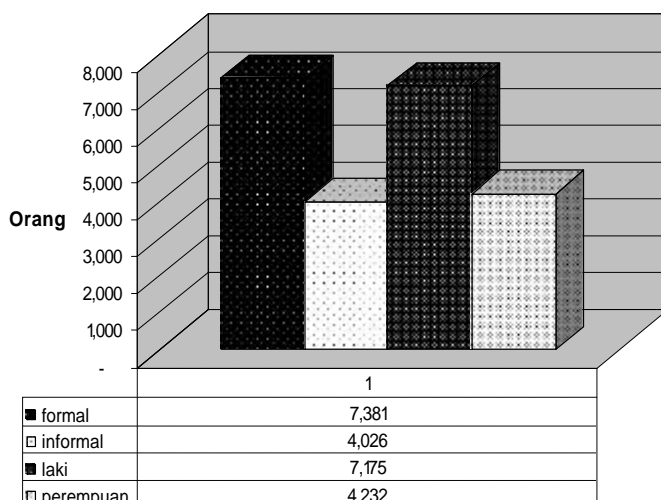
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, diolah

Meskipun di sisi lain berdampak negatif antara lain semakin berkurangnya tenaga produktif di sektor pertanian atau bangunan serta dampak sosial lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, pada triwulan II-2006, terdapat sekitar 16.606 orang lowongan bekerja di luar negeri. Dari lowongan tersebut, hanya dipenuhi sebanyak 68,69%. Jumlah TKI dari NTB yang ditempatkan bekerja di luar negeri pada

periode ini hanya sebanyak 11.407 orang. Malaysia merupakan negara penampung TKI asal NTB terbesar, dimana sebanyak 7.315

orang (64,13%) dipekerjakan di negara ini. Saudi Arabia menempati urutan kedua yang mempekerjakan TKI NTB yang menampung sekitar 3.795 orang (33,27%), dan sisanya dari negara Kuwait, Abu Dhabi, Jordan dan Korea.

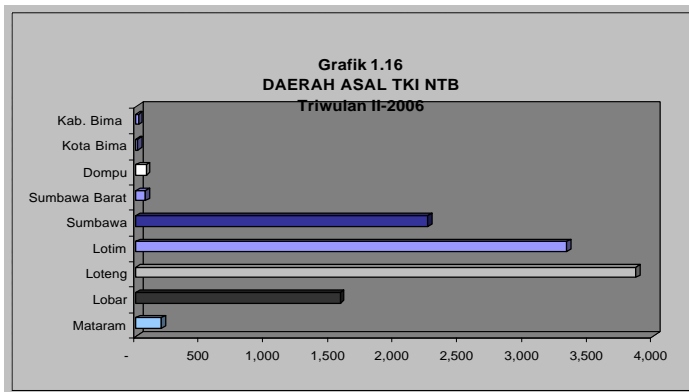
**Grafik 1.15**  
**TKI NTB Berdasarkan Sektor & Jenis Kelamin**  
**Triwulan II-2006**



Dari penempatan TKI tersebut, menurut Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, pada triwulan II-2006, jumlah *remittance* yang mengalir ke NTB mencapai Rp 109,61 miliar. Malaysia sebagai negara terbesar penampung TKI NTB memberikan kontribusi *remittance* tertinggi sebesar Rp 80,69 miliar (73,61%) dan dari Arab Saudi sebesar Rp27,09 miliar (24,72%). Selain kedua negara tersebut, Kuwait, Singapura, Jepang, Jordan dan UEA serta beberapa negara lainnya juga berperan menyumbangkan *remittance* meskipun tidak cukup signifikan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari perbankan di NTB yang memberikan jasa transfer *remittance* dari TKI NTB, pada triwulan II-2006 jumlah *remittance* yang masuk lebih besar. Total *remittance* yang tercatat di perbankan NTB mencapai Rp 174,32

miliar. *Remittance* TKI pada tahun 2006 berasal dari TKI yang bekerja tersebar di berbagai negara yang didominasi oleh negara-negara Timur Tengah dan Malaysia.



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, diolah

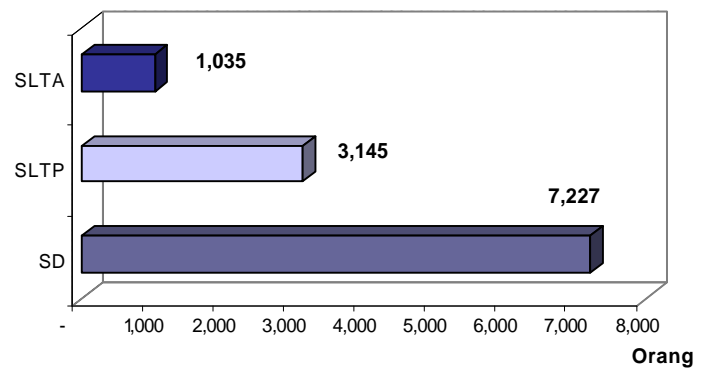
pengemudi. Namun penempatan jumlah TKI NTB pada triwulan ini berbeda dengan jumlah kebutuhannya, dimana jumlah tenaga kerja laki-laki yang ditempatkan sebanyak 62,90 % dan sisanya 37,10% adalah perempuan. Pada triwulan ini, jumlah TKI NTB yang bekerja di sektor formal lebih banyak dibandingkan sektor informal. Di sektor formal dipekerjakan sekitar 7.381 orang (64,71%), sedangkan yang bekerja di sektor informal hanya 4.026 orang (35,29%).

Dilihat dari daerah asalnya, TKI di NTB, terbanyak berasal dari Lombok Tengah (32,06%), disusul oleh TKI dari Lombok Timur (28,25%) dan berikutnya dari Sumbawa (21,51%), Lombok Barat (15,55%) dan hanya sebagian kecil yang berasal dari Mataram, Sumbawa Barat, Kota dan Kab. Bima dan Dompu.

Pada umumnya, TKI yang dikirim ke luar negeri memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, tercermin dari mayoritas pendidikannya adalah lulusan SD (62,47%), SLTP (31,82%) dan SLTA (5,71%). Masalah rendahnya tingkat pendidikan TKI tersebut menyebabkan pengetahuan dan keterampilan para TKI menjadi sangat terbatas dan pada saat bekerja akhirnya banyak yang mengalami kendala/kesulitan.

Sementara itu, lowongan bekerja di luar negeri untuk pekerja laki-laki yang biasanya lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, pada triwulan ini menunjukkan sebaliknya. Lowongan bekerja untuk wanita justru lebih banyak dengan perbandingan 45,91% dan 54,09%. Hal ini disebabkan karena lowongan yang tersedia pada periode ini lebih membutuhkan pembantu rumah tangga dibandingkan dengan bidang lainnya seperti petani perkebunan, konstruksi, *cleaning service*, peternakan dan

**Grafik 1.17**  
**Latar Belakang Pendidikan TKI NTB**  
**Triwulan II-2006**



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, diolah

**BOKS - 1****TANAMAN JARAK : SUMBER ENERGI ALTERNATIF DAN PEMANFAATAN LAHAN MARGINAL DI NTB**

Upaya mencari sumber energi alternatif yang berasal dari tanaman seperti biodiesel, bioetanol, biogas dan sebagainya sedang giat dilakukan. Masalah keterbatasan sumber minyak dan tingginya harga minyak dunia mendorong pemikiran kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian para ahli diketahui bahwa tanaman jarak merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan sumber energi biodiesel. Indonesia merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman jarak, terutama di daerah-daerah bagian timur seperti NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku dan Papua, karena tanaman jarak pagar dapat berkembang dengan baik pada lahan-lahan kering/marginal yang banyak terdapat di kawasan tersebut.

NTB merupakan salah satu daerah yang memiliki cukup luas lahan marginal/kering. Dari 1,8 juta ha lahan marginal di NTB, sekitar 625 ribu ha akan ditanami pohon jarak pagar. Dari jumlah tersebut, diharapkan produksi per ha dapat mencapai 2 juta ton, yang sebagian akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain. Setiap tahun produksi jarak ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2004, produksinya hanya sekitar 20 ton, pada tahun 2005 meningkat menjadi 50 ton dan pada tahun 2006 (hingga awal Mei 2006) telah mencapai 150 ton. Pada tahap pertama, pembibitan yang sudah dilakukan bekerja sama dengan Dinas Perkebunan NTB sedikitnya 137 ribu bibit jarak telah mulai ditanam masyarakat.

Pengembangan tanaman jarak ini memberikan peluang bagi NTB untuk menjadi pusat budidaya jarak nasional. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari penanaman jarak ini, antara lain :

- Menyerap cukup banyak tenaga kerja/mengurangi jumlah pengangguran di NTB
- Mendorong peningkatan PDRB NTB, terutama di sub sektor perkebunan
- Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pendapatan, baik dari hasil penjualan bibit jarak maupun minyak jarak
- Mengembalikan fungsi lingkungan, khususnya menghijaukan kembali kawasan gundul, mengembalikan fungsi lahan kritis sekaligus menjaga kelestarian sumber mata air

Dalam rangka mensukseskan upaya ini, Gubernur Propinsi NTB telah mencanangkan program gerakan massal menanam jarak pagar. Pemerintah Propinsi NTB juga merencanakan membangun jaringan pemasaran melalui kerja sama dengan PLN yang kemungkinan bersedia menampung minyak jarak untuk memenuhi kebutuhan PLN. Di samping itu, telah dilakukan survei oleh pemerintah daerah terhadap sejumlah kendaraan yang menggunakan mesin diesel di NTB dan diketahui bahwa kebutuhan jarak sangat besar, sehingga menurut pemerintah daerah, dari aspek pemasaran kemungkinan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

Karena teknologinya sederhana, berbiaya rendah (selama 30 tahun akan terus berproduksi tanpa mengeluarkan biaya perawatan), relatif mudah dilakukan dan memiliki prospek yang cukup baik, sejumlah investor asing dari Afrika Selatan, Inggris dan Jerman menunjukkan minatnya menjadi penyalur jarak dari NTB.

Pengembangan tanaman jarak di lahan kering telah diuji coba dengan mengambil lokasi di Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Lombok Barat. Pola tanam yang dikembangkan adalah tumpang sari jarak dengan jagung, yang ternyata bisa memberikan hasil yang lebih menguntungkan, karena lahan dapat lebih dimanfaatkan pemanfaatannya. Pada tahun ke-1, tanaman jarak belum bisa berproduksi. Dengan penanaman berselang jagung, maka pendapatan dari panen jagung dilakukan lebih awal dapat membiayai produksi tanaman jarak pada tahun I. Pada tahap I (tahun ke-1), dalam 1 ha dapat ditanami 1000 tanaman jarak dan 58.700 tanaman jagung. Penghitungan sederhana laba yang diperoleh dari hasil penanaman dengan pola tumpang sari ini dapat dilihat sebagai berikut :

Penanaman Tahap I - Tahun 1 (untuk setiap ha)		
	Jagung	Jarak
Biaya produksi	Rp 3,000,000.00	Rp 1,000,000.00
Jumlah produksi (kg)	10,250	4,680
Harga per kg	Rp 850	Rp 500
Nilai produksi	Rp 8,712,500.00	Rp 2,340,000.00
Laba	Rp 5,712,500.00	Rp 1,340,000.00
Tahun ke-4 s.d 5 (untuk setiap ha)		
Nilai produksi		Rp 7,500,000.00 *)

Sumber : Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Kering (LPPSLK) – Mataram, NTB.

\*) Pada tahun ke-4 s.d 5, setiap pohon dapat menghasilkan 15 kg per tahun, sehingga nilai produksinya menjadi 15 kg x 1.000 pohon x Rp500,00 = Rp7.500.000,00.

Pada tahun ke-5, lahan yang kosong dapat ditanami tambahan tanaman jarak karena pengurangan populasi tanaman jagung (penanaman tahap II), sehingga dalam 1 ha lahan kering, populasi tanaman jarak menjadi 2000 pohon dan populasi tanaman jagung berkurang 15,33% menjadi 49.700 pohon.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan pola tumpang sari tanaman jarak dan jagung akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi petani dibandingkan penanaman jarak tanpa pola tanam tumpang sari. Namun pertanyaan yang sering muncul dan sulit dijawab adalah siapa yang bersedia memulai usaha penanaman jarak tersebut secara massal dan siapa penampung yang bersedia membeli seluruh hasil produksi jarak petani. Jika masalah ini belum terjawab, tentunya rencana program pengembangan tanaman jarak akan sulit dilaksanakan dan masih memerlukan pemikiran dan koordinasi yang lebih baik dari berbagai pihak terkait.

Oleh karena itu, sebagai langkah awal dari upaya mensukseskan program gerakan massal menanam jarak pagar, upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah :

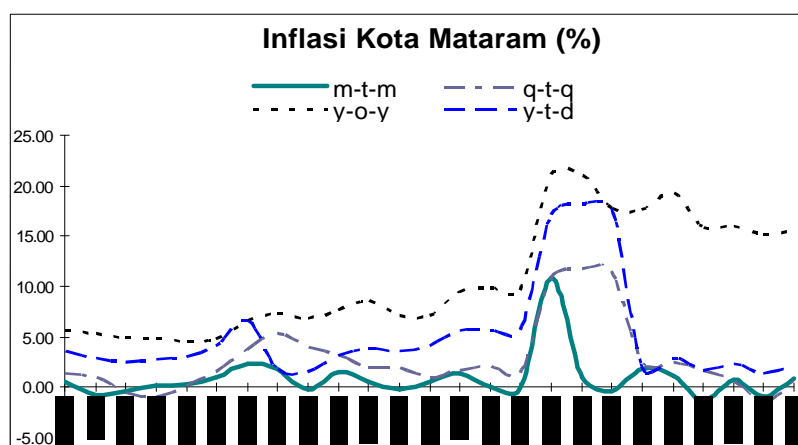
- Melakukan pemetaan lahan pengembangan tanaman jarak
- Secara kontinyu melakukan kegiatan sosialisasi proyek pengembangan jarak.
- Perlu juga dipikirkan mengenai kepastian harga ditingkat petani kepada pengumpul
- Kepastian hasil produksi akan selalu ditampung oleh pembeli seperti Pertamina/BUMN atau perusahaan daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah yang berkesinambungan untuk keikutsertaan petani jarak dalam jangka panjang.
- Sebagai proyek nasional, perlu adanya bantuan di awal dalam hal pendanaan untuk pembibitan unggul jarak yang menghasilkan minyak jarak paling optimal, setidaknya hingga panen perdana. Karena itu, perlu disediakan alokasi anggaran khusus dari APBD untuk merealisasikan proyek percontohan budidaya tanaman jarak pagar di NTB.
- Dengan menghasilkan minyak jarak berarti Pemerintah Daerah telah membantu Pemerintah Pusat dalam mengatasi krisis BBM. Apabila setengah saja dari lahan yang berpotensi di NTB yang ditanami pohon jarak, dengan asumsi konservatif, setidaknya dapat dihasilkan 292,5 juta liter/tahun atau sekitar Rp658 miliar/tahun (dengan asumsi harga per liter Rp2.250,00).
- Pemanfaatan minyak jarak dapat diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat setempat terlebih dahulu, seperti nelayan, petani dan masyarakat setempat, yang secara otomatis mengurangi biaya distribusi
- Perlu juga dipikirkan pendirian kilang-kilang minyak jarak di dekat lokasi penanaman jarak, yang tentunya akan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi bagi daerah setempat
- Perlu segera didesain mekanisme dari sejak cara penanaman hingga ke proses kilang minyak jarak dan distribusi minyak jarak serta langkah-langkah sosialisasi proyek nasional tersebut.

## BAB II EVALUASI PERKEMBANGAN INFLASI NUSA TENGGARA BARAT

### 2.1 GAMBARAN UMUM INFLASI DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mengamati perkembangan laju inflasi Kota Mataram hingga pertengahan tahun 2006, trendnya cenderung terus menunjukkan penurunan sejak akhir tahun 2005. Inflasi tahunan (y-o-y) Kota Mataram pada bulan Juni 2006 telah berada pada level 15,54%. Meskipun masih cukup tinggi, angka tersebut menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2005. Demikian pula inflasi triwulanan (q-t-q) juga menurun hingga menjadi 0,61%. Sementara itu, inflasi kumulatif (Januari s.d Juni 2006) pada triwulan ini berada pada posisi 2,24% dan apabila ditinjau secara bulanan (m-t-m), pada periode ini Kota Mataram telah mengalami inflasi sebesar 0,85% setelah sebelumnya mengalami deflasi.

**Grafik 2.1.**



Sumber : Data BPS Pusat, diolah

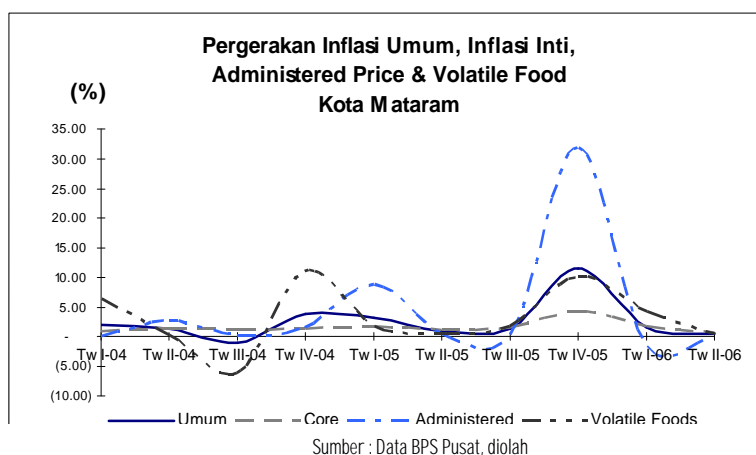
Grafik 2.1 menggambarkan trend pergerakan inflasi selama 3 tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, sejak pertengahan tahun 2004 hingga akhir tahun 2005 trend inflasi cenderung meningkat, terutama saat terjadi gejolak kenaikan yang sangat tajam yang diakibatkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM menjelang akhir tahun 2005, sehingga menyebabkan inflasi tahunan mencapai angka tertinggi pada bulan Oktober 2005 (21,05%) dan berlanjut terus hingga Desember 2005 (17,73%). Namun memasuki tahun 2006, hingga pertengahan tahun, kecenderungannya mulai menunjukkan penurunan, seiring dengan berkurangnya dampak kebijakan pemerintah tersebut dan mulai stabilnya kondisi perekonomian, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat pada triwulan ini, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya dan juga dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi.

### 2.2 INFLASI INTI, INFLASI *VOLATILE FOOD*, INFLASI *ADMINISTERED PRICE*

Perkembangan inflasi secara triwulanan (q-t-q) di Kota Mataram pada triwulan II-2006 didominasi oleh pergerakan inflasi inti, diikuti oleh inflasi *volatile food* dan inflasi *administered price* dengan peranan masing-masing terhadap inflasi Kota Mataram sebesar 50,99%; 25,47% dan 23,54%. Namun demikian, inflasi *administered price* dan *volatile food* mendominasi penyebab berfluktuasinya inflasi yang terjadi pada triwulan III hingga IV pada tahun 2005, dapat dilihat dari grafik 2.2.

Grafik 2.2

Baik inflasi inti dan inflasi *volatile food* pada posisi Juni 2006 trendnya mengalami penurunan sejak awal tahun. Inflasi inti Kota Mataram pada triwulan ini sebesar 0,85%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,87%, sebagai dampak kebijakan uang ketat oleh Bank Indonesia dalam meredam inflasi. Kondisi ini didukung oleh ekspektasi masyarakat terhadap harga barang secara umum yang diperkirakan akan menurun.



Sementara itu, inflasi *volatile food* pada triwulan II-2006 sebesar 0,59%, mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan I-2006 yang mencapai 4,32%. Fluktuasi komoditi ini sangat dipengaruhi oleh faktor *seasonal*. Secara triwulanan, karakteristik NTB yang berbasis pertanian memberikan dampak yang besar. Oleh karena itu, komoditi yang mendorong penurunan inflasi *volatile food* pada triwulan ini adalah yang berasal dari hasil produksi pertanian, baik dari sub sektor tanaman bahan makanan, peternakan dan perikanan. Kondisi curah hujan dan gelombang laut yang baik cukup berpengaruh dan mendukung nelayan meningkatkan hasil ikan yang diperoleh. Selain itu, tibanya saat musim panen raya selama triwulan ini mendorong *supply* komoditi ini kembali normal sehingga mendorong deflasi yang cukup signifikan dari sektor tersebut pada triwulan ini. Beberapa komoditi yang mengalami deflasi tersebut antara lain cabe rawit, cabe merah, buncis, tomat sayur, kol putih, ayam hidup, jeruk nipis, kacang kedelai, ikan gurami dan mujair, jeruk, garam, ikan tengiri, teri, lele, mas, cakalang, bandeng, daging sapi dan beberapa komoditi lainnya.

Sedangkan inflasi *administered price*, yaitu kenaikan harga barang-barang tertentu yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada triwulan ini mengalami sedikit peningkatan, setelah sebelumnya mengalami deflasi (-1,61%), pada triwulan II-2006 kembali terjadi inflasi (0,10%). Peningkatan harga barang dari kebijakan pemerintah terutama terjadi pada bahan bakar untuk industri yang pada bulan Juni 2006 mengalami kenaikan dengan kisaran 2,27% - 12,89%, menyusul kenaikan harga minyak dunia saat ini. Kenaikan BBM industri tertinggi terjadi pada jenis premium sebesar 12,89%, seiring meningkatnya kebutuhan di pasar internasional. Sedangkan jenis lainnya seperti minyak tanah sebesar 9,13%, minyak solar sebesar 9,11%, minyak diesel sebesar 8,67% dan minyak bakar naik sebesar 2,27%. Perhitungan harga BBM tersebut ditetapkan berdasarkan Perpres No.55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran BBM Dalam Negeri. Masalah lainnya adalah keterbatasan pasokan BBM di NTB, sehingga selama beberapa waktu, terjadi kelangkaan premium. Masalah di sektor kelistrikan juga diperkirakan turut memberikan dampak terhadap inflasi *administered price*. Pada akhir triwulan ini, NTB dinyatakan sebagai daerah dengan kelistrikan siaga, yang berarti listrik di NTB dapat dipenuhi apabila tidak ada mesin pembangkit listrik yang mengalami kerusakan.



### 2.3. INFLASI TRIWULANAN (Q-T-Q) KOTA MATARAM

#### 2.3.1. Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram Triwulan II-2006

Inflasi triwulanan (q-t-q) Kota Mataram yang tercatat pada akhir triwulan II-2006 cukup rendah dan memiliki rentang angka yang kecil. Inflasi triwulanan pada periode ini sebesar 0,61%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,63%. Penurunan inflasi triwulanan pada triwulan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi seluruh kelompok komoditi dengan kisaran angka dari 0,16% sampai dengan 3,34%. Tidak seperti triwulan sebelumnya, dimana terjadi deflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar -0,51%, pada triwulan ini, kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok sandang dan kelompok kesehatan, masing-masing sebesar 3,34% dan 1,72%. Kelompok sandang juga sekaligus merupakan komoditi penyumbang inflasi triwulanan tertinggi kedua pada periode ini dengan sumbangan sebesar 0,15%. Sementara itu, komoditi lainnya hanya mengalami inflasi di bawah 1%, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,68%); bahan makanan (0,46%); makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,35%); dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan (0,16%). Pada triwulan ini hanya ada satu kelompok komoditi yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, dengan angka deflasi sebesar -0,03%. Kelompok tersebut memberikan sumbangan yang negatif terhadap angka inflasi Kota Mataram. Dilihat dari besarnya sumbangan yang diberikan, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan sumbangan tertinggi sebesar 0,17%, disusul oleh kelompok sandang sebesar 0,15%; bahan makanan sebesar 0,14%; dan kelompok lainnya hanya menyumbang di bawah 0,1%.

Tabel 2.1

Inflasi Triwulanan q.t.q Kota Mataram

KOMODITI	TRW-01/06		TRW-02/06	
	INFLASI (q-t-q)	Sumbangan	INFLASI (q-t-q)	Sumbangan
	(%)	(%)	(%)	(%)
Bahan Makanan	3.57	1.04	0.46	0.14
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	3.65	0.65	0.35	0.06
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	-0.51	-0.13	0.68	0.17
Sandang	0.09	0.00	3.34	0.15
Kesehatan	0.57	0.02	1.72	0.07
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	0.30	0.01	-0.03	0.00
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0.20	0.03	0.16	0.02
	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

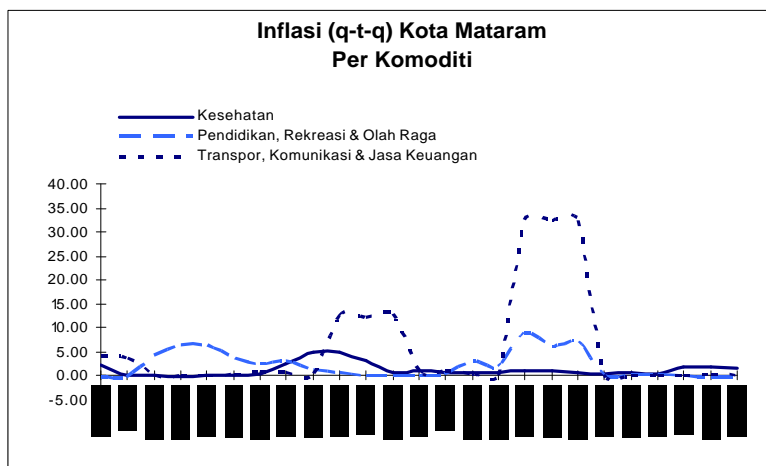
Tingginya sumbangan inflasi dari kelompok sandang terutama disebabkan karena kenaikan harga emas perhiasan dan seragam sekolah, dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,14% dan 0,01%. Kenaikan harga emas perhiasan lebih disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi biaya produksi. Sedangkan kenaikan harga seragam sekolah terkait dengan tibanya tahun ajaran baru bagi para siswa sekolah, sehingga permintaan terhadap seragam sekolah mengalami peningkatan pada periode ini. Sementara itu, dari kelompok kesehatan, faktor penyebab yang mendorong tingginya sumbangan inflasi adalah dari peningkatan tarif dokter umum sebesar 0,06%. Tarif dokter umum di Mataram pada triwulan ini mengalami penyesuaian.

### 2.3.2. Trend Inflasi Triwulanan (q-t-q) Kota Mataram

Grafik 2.3 menggambarkan trend inflasi triwulanan menurut jenis komoditi di Kota Mataram.

Pergerakan angka inflasi kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan cenderung stabil hingga akhir tahun 2004. Namun pada awal tahun 2005 terjadi *shock*. Shock faktor ini bersumber dari kelompok *administered price* yang dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM tahap pertama pada awal Maret 2005 dengan kenaikan sekitar 30%. Kenaikan yang sangat tinggi, berkisar 90%-100% terjadi kembali pada akhir tahun 2005, yang menyebabkan terjadinya lonjakan inflasi secara signifikan. Angka tersebut bahkan menyentuh titik tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun dari grafik terlihat bahwa dampak tersebut tidak berlangsung lama. Memasuki tahun 2006 hingga pertengahan tahun, angka inflasi dari kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan menurun tajam dan berada dalam kisaran angka yang rendah dan stabil. Pada bulan Juni 2006, inflasi kelompok ini hanya mencapai 0,16%.

Grafik 2.3



Sumber : Data BPS Pusat, diolah

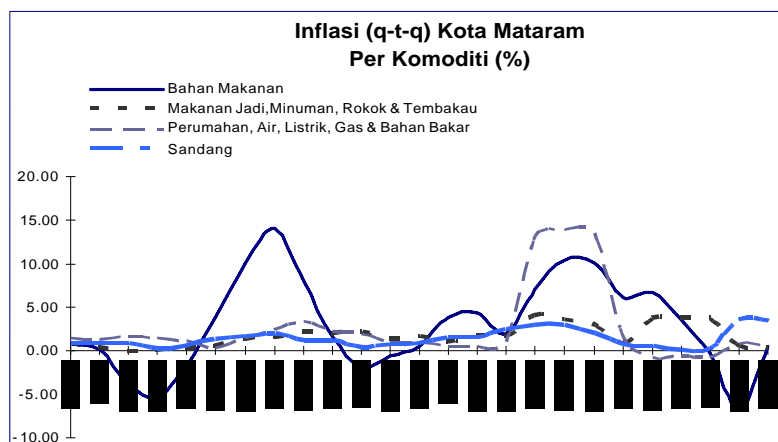
Sementara itu, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dan kesehatan tidak memperlihatkan fluktuasi yang signifikan dan masih dalam batasan *range* yang rendah (dibawah 10%). Pada triwulan ini, kelompok komoditi kesehatan tampak sedikit mengalami peningkatan sebesar 1,72%, sedangkan inflasi yang rendah ditunjukkan oleh kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, yaitu sebesar -0,03%.

Mengamati perkembangan inflasi kelompok lainnya yang digambarkan oleh

Grafik 2.4, kelompok bahan makanan terlihat paling berfluktuasi. Faktor *seasonal* sangat berpengaruh terhadap pola yang ditunjukkan oleh kelompok bahan makanan. Karakteristik wilayah NTB berdampak terhadap sisi *supply* bahan makanan, seperti faktor cuaca/curah hujan yang mempengaruhi musim tanam/panen dan hasil produk pertanian, karena hanya sebagian kecil saja yang menggunakan saluran irigasi/air waduk.

Grafik 2.4

Demikian pula di sub sektor perikanan, hasil penangkapan ikan oleh nelayan yang rata-rata masih menggunakan peralatan tradisional juga sangat rentan terhadap gelombang laut/pasang-surut. Pada triwulan II-2006 ini, kondisi cuaca yang baik serta gelombang laut yang cukup mendukung mendorong penurunan inflasi kelompok bahan makanan. Masa panen raya yang



Sumber : Data BPS Pusat, diolah

sedang berlangsung mendorong meningkatnya persediaan hasil-hasil pertanian. Kondisi peternakan yang semakin membaik tanpa dipengaruhi berbagai isu penyakit di sebagian besar wilayah Pulau Sumbawa juga turut mempengaruhi *supply* daging hasil peternakan seperti daging sapi, kerbau dan kambing.

Pergerakan inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar tampak stabil pada kisaran angka yang rendah, namun terjadi fluktuasi yang tajam pada akhir tahun 2005. Faktor yang dominan mempengaruhi inflasi kelompok ini adalah kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM pada saat itu, sehingga kenaikan harga yang terjadi mencapai posisi tertinggi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Dampak selanjutnya terjadi pada kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*). Namun sebagaimana yang dialami kelompok lainnya, memasuki tahun 2006, telah mengalami penurunan dan kembali pada trend normalnya. Setelah sempat mengalami deflasi pada triwulan sebelumnya, pada triwulan ini kembali mengalami inflasi meskipun tidak signifikan, hanya sebesar 0,68%. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada kelompok barang sandang dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, yang relatif stabil kondisinya, dengan sedikit fluktuasi pada akhir tahun 2005 hingga awal tahun 2006. Inflasi triwulanan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada triwulan ini hanya sebesar 0,35%, sedangkan kelompok barang sandang pada periode ini mengalami inflasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok komoditi lainnya hingga mencapai 3,34%, lebih besar dari inflasi yang terjadi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,09%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan sandang karena adanya tahun ajaran baru dan ekspektasi kenaikan gaji PNS pada awal triwulan III-2006 yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat di kelompok barang tersebut.

#### 2.4. INFLASI TAHUNAN (Y-O-Y) KOTA MATARAM

Ditinjau secara tahunan (y-o-y), angka inflasi pada triwulan II-2006 masih berada pada level yang cukup tinggi, sebesar 15,54%, meskipun menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 15,92%. Kelompok komoditi yang mengalami inflasi tertinggi secara tahunan adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 33,03%. Inflasi pada kelompok ini selalu berada pada posisi tertinggi, sebagai komoditi yang secara langsung dipengaruhi kebijakan pemerintah (*administered price*). Meskipun masih tinggi, pada periode ini inflasi kelompok ini telah menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 34,19%. Walaupun mengalami inflasi tertinggi, kelompok ini memberikan sumbangan terbesar kedua sebesar 4,29%, setelah kelompok bahan makanan (4,87%). Berikutnya kelompok yang mengalami inflasi cukup tinggi setelah kelompok transport adalah kelompok bahan makanan dengan inflasi sebesar 16,67%. Sedikit dibawah level inflasi kelompok bahan makanan adalah kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar dengan inflasi sebesar 14,83%. Kontribusi yang diberikan kelompok ini cukup tinggi (3,71%). Sementara itu, kelompok lainnya mengalami inflasi di bawah 10%, yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga (9,59%); kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (8,85%); kelompok sandang (8,03%) dan yang terendah adalah kelompok kesehatan (3,80%). Masing-masing kelompok tersebut menyumbang dengan kisaran dibawah angka antara 0,17% sampai dengan 1,71%.

Tabel 2.2  
Inflasi Triwulanan y.o.y Kota Mataram

KOMODITI	TRW-01/06		TRW-02/06	
	INFLASI (y-o-y)	Sumbangan	INFLASI (y-o-y)	Sumbangan
	(%)	(%)	(%)	(%)
Bahan Makanan	16.67	4.89	16.67	4.87
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	10.20	1.96	8.85	1.71
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	15.30	3.82	14.83	3.71
Sandang	5.46	0.26	8.03	0.39
Kesehatan	3.00	0.13	3.80	0.17
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	9.85	0.43	9.59	0.40
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	34.19	4.43	33.03	4.29
	<b>15.92</b>	<b>15.92</b>	<b>15.54</b>	<b>15.54</b>

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Dari kelompok transportasi dan komunikasi, komoditi yang mengalami inflasi tertinggi adalah solar (104,76%), bensin (87,50%), angkutan dalam kota (33,33%), tarif taksi (28,33%), angkutan antar kota (25%) dan tarif sewa motor (17,86%). Bensin merupakan penyumbang inflasi tertinggi dari kelompok ini dengan kontribusi sebesar 3,53%. Angka inflasi tahunan kelompok komoditi tersebut diperoleh dengan membandingkan inflasi saat ini dengan triwulan II-2005, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan harga komoditi tersebut masih terkait dengan kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Faktor lain yang mendorong tingginya inflasi di kelompok ini adalah terbatasnya persediaan bahan bakar di beberapa wilayah di NTB karena terganggunya pasokan BBM dari Pertamina selama beberapa waktu. Kelangkaan BBM khususnya premium dan solar sempat terjadi sehingga menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Keterbatasan stok premium mendorong Pertamina untuk mengurangi pasokan ke masing-masing SPBU diseluruh Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan BBM tersebut juga dirasakan turut mempengaruhi kinerja di sektor kelistrikan, sehingga menyebabkan frekuensi pemadaman lampu di beberapa daerah meningkat. Sementara itu, dari bahan makanan, inflasi tertinggi terjadi pada komoditi beras sebesar 8,17%, sekaligus sebagai penyumbang inflasi tertinggi dengan kontribusi sebesar 2,01% dari total inflasi tahunan. Kenaikan harga beras pada periode ini dibandingkan dengan tahun lalu terutama dipengaruhi oleh naiknya harga pupuk sehingga berdampak terhadap biaya produksi petani. Pada pertengahan triwulan II-2006, harga pupuk yang merupakan bahan penunjang pertanian merangkak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi). Adanya sinyal dari pemerintah tentang kenaikan harga pupuk sebesar 12% langsung direspon pasar dengan menaikkan harga pupuk di daerah ini, terutama ditingkat pengecer hingga 15%, meskipun persediaan/stok pupuk di NTB relatif normal. Kenaikan ini erat pula kaitannya dengan akan tibanya musim tanam pada periode ini.

## 2.5. KOMODITI PENYUMBANG INFLASI DAN DEFLASI TERBESAR

Dari tabel 2.3 dapat dilihat 10 komoditi penyumbang inflasi terbesar di Kota Mataram pada triwulan II-2006 (q-t-q). Sumbangan terbesar berasal dari komoditi beras yang menyumbang 0,42% terhadap total inflasi, disusul oleh bawang putih (0,20%), emas perhiasan (0,14%), daging ayam ras (0,13%), kayu balokan (0,06%), dokter umum (0,06%) dan seterusnya.

Tabel 2.3

No.	Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan II 2006	Sumbangan thd Inflasi
	Sub Komoditi	(%)
1	Beras	0.42
2	Bawang Putih	0.20
3	Emas Perhiasan	0.14
4	Daging Ayam Ras	0.13
5	Kayu Balokan	0.06
6	Dokter Umum	0.06
7	Salak	0.04
8	Telur Ayam Ras	0.03
9	Keramik	0.03
10	Apel	0.03
11	Besi Beton	0.03

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Faktor-faktor yang mendorong tingginya sumbangan inflasi secara triwulanan komoditi dari kelompok bahan makanan dan sandang telah dibahas sebelumnya. Dari tabel diatas, sebagian besar komoditi sumbangan inflasinya didorong oleh faktor *cost push inflation*. Terkait dengan komoditi kayu, sumbangan inflasi dari komoditi ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat permintaan terhadap kayu NTB yang setiap tahun mengalami peningkatan, terutama dari negara-negara Eropa dan Asia Tenggara. Disamping itu, permintaan oleh pasar dalam negeri juga cukup besar. Sebagian permintaan tersebut ditujukan untuk diolah lagi menjadi produk-produk kerajinan kayu, seperti patung, relief, lemari dan sebagainya, yang banyak diminati karena tetap menonjolkan ciri khas daerah dan artistik. Selama ini, kebutuhan

kayu di NTB dipenuhi dengan produksi kayu yang berasal dari IPKTM (Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik) dan juga dari pemasukan kayu dari luar daerah, terutama dari Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun demikian persediaan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan. Dalam dua tahun terakhir, pemasukan kayu mengalami keterbatasan. Hal ini didorong oleh kemampuan daya beli masyarakat yang rendah dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam hal produksi kayu. Tingginya tingkat permintaan terhadap kayu inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong tingginya *illegal logging* dan banyaknya jumlah industri pengolahan kayu yang tidak berizin di NTB.

Karakteristik wilayah NTB yang berbasis pertanian yang sangat dipengaruhi faktor musiman, menjadi penyebab utama deflasi yang terjadi pada beberapa komoditi, terutama produk-produk hasil pertanian, dari sub komoditi bahan makanan, peternakan dan perikanan. Setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kenaikan harga, pada triwulan II-2006 ini meningkatnya persediaan akibat dari berlangsungnya musim panen raya mendorong penurunan harga komoditi tersebut.

Tabel 2.4

No.	Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan II-2006	Sumbangan thd Inflasi
	Sub Komoditi	(%)
1	Cabe Rawit	-0.48
2	Cabe Merah	-0.13
3	Tomat Sayur	-0.09
4	Ayam Hidup	-0.04
5	Daging Sapi	-0.03
6	Jeruk	-0.02
7	Kol Putih/Kubis	-0.01
8	Mujair	-0.01
9	Garam	-0.01
10	Teri	-0.01

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Dari Tabel 2.4. beberapa komoditi yang mengalami deflasi adalah cabe rawit (-0,48%), cabe merah (-0,13%), tomat sayur (-0,09%), ayam hidup (-0,04%), daging sapi (-0,03%) dan seterusnya.

## 2.6. PERBANDINGAN INFLASI KOTA MATARAM DENGAN KOTA TERDEKAT

Tabel 2.5

Perbandingan Inflasi Triwulan II 2006	Inflasi y-o-y (%)
Kupang	17.19
Kediri	16.80
Jember	15.99
Malang	15.55
Mataram	15.54
Nasional	15.53
Surabaya	13.70
Denpasar	11.57

Sumber : Data BPS Pusat, diolah

Pada triwulan II-2006 ini, laju inflasi tahunan di Kota Mataram berada pada level 15,54%, sedikit lebih tinggi dari laju inflasi nasional sebesar 15,53%. Apabila dibandingkan dengan wilayah regional terdekat, inflasi kota Mataram pada triwulan ini masih cukup tinggi meskipun angkanya sedikit menurun dari periode sebelumnya. Kota Kupang pada periode ini mengalami inflasi tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya sebesar 17,19%. Berikutnya adalah Kota Kediri dengan inflasi sebesar 16,80%, disusul Jember (15,99%), Malang (15,55%). Sementara itu,

inflasi di Kota Surabaya dan yang terendah terjadi di Denpasar (11,57%). Hal ini lebih dipengaruhi oleh karakteristik wilayah NTB (Lombok dan Sumbawa) yang dikelilingi oleh lautan yang memisahkannya dengan daerah lain di Indonesia, sehingga sebagian besar kebutuhan konsumsi masyarakat diimpor melalui perdagangan antar daerah yang sangat dipengaruhi oleh besarnya biaya transportasi dan ketersediaan jalur distribusi barang. Pada triwulan ini, distribusi barang terutama yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan daerah lainnya sedikit mengalami gangguan, pasca bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan sarana jalan raya untuk angkutan umum. Di samping itu, sangat tingginya pengaruh faktor musiman di NTB disebabkan oleh karakteristik perekonomian daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

## BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Performa perbankan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan II 2006 relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingginya pertumbuhan penyaluran kredit yang disertai peningkatan risiko kredit masih mewarnai kinerja perbankan secara regional. Rasio *loan to deposit* (LDR) tercatat pada 83,19% sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 85,20%. Sedangkan memburuknya risiko kredit diindikasikan oleh rasio *non performing loan* (NPL) yang mencapai 2,99% dengan kecenderungan terus meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,81%.

Transaksi non tunai di NTB yang menggunakan fasilitas *real time gross settlement* (RTGS) cenderung meningkat, pada triwulan II 2006 tercatat 2,728 lembar transaksi RTGS atau meningkat 45,80% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini menyiratkan optimisme semakin dinamisnya kegiatan ekonomi di NTB. Aliran uang di KBI Mataram mencatat uang keluar (*net outflow*) sebesar 230 miliar rupiah, tingginya permintaan uang tunai ini dipicu oleh realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II di bulan Juni dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II pada bulan April.

Di sisi lain, perbandingan jumlah uang yang tidak layak edar terhadap aliran uang yang masuk (*inflow*) menurun dari sebesar 24,58% pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 14,21% pada triwulan berjalan. Jumlah uang palsu pecahan besar (Rp 100.000 dan Rp 50.000) menurun drastis, di KBI Mataram meski sempat melonjak pada akhir 2005 hingga triwulan I 2006 yang mencapai Rp 36,680,000 dengan jumlah 463 lembar uang palsu, namun untuk triwulan berjalan hanya tercatat Rp 15,880,000 dengan jumlah 190 lembar uang palsu.

### 3.1. Kinerja Perbankan di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Pada posisi triwulan II 2006, sektor perbankan di NTB menunjukkan kinerja yang secara relatif stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-t-q) ataupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-o-y) dengan perbaikan pada beberapa indikator perbankan. Peningkatan terjadi pada posisi aset serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) walaupun terjadi sedikit penurunan pada pertumbuhan penyaluran kredit. Hingga Juni 2006, pertumbuhan kredit perbankan telah mencapai angka 13,00% padahal dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya, pertumbuhan kredit telah mencapai 17,45% atau terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan.

Aktivitas ekonomi di NTB pada triwulan berjalan cenderung stagnan dengan peningkatan PDRB sebesar 1,4% dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini berimbas pada penyaluran kredit yang juga relatif stabil.

Kenaikan harga produksi serta menurunnya permintaan pasar pada sektor-sektor tertentu telah memicu peningkatan risiko kredit yang direfleksikan pada peningkatan rasio NPL yang berkelanjutan. NPL posisi triwulan II 2006 tercatat sebesar 2,99% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 3.1 - Indikator utama perbankan Nusa Tenggara Barat

KETERANGAN *)	Dec-02	Dec-03	Dec-04	Jun-05	Dec-05	Mar-06	Jun-06	q-t-q	y-o-y
I. Asset	3.30	3.76	4.66	5.08	5.50	5.68	6.01	5.76	18.39
1. Bank Umum	3.16	3.58	4.43	4.83	5.23	5.41	5.72	5.76	18.37
2. BPR	0.14	0.18	0.23	0.25	0.27	0.28	0.29	5.76	18.90
II. DPK	2.55	2.90	3.46	3.51	4.07	4.20	4.55	8.30	29.68
1. Bank Umum	2.48	2.81	3.34	3.38	3.92	4.06	4.40	8.44	30.09
2. BPR	0.07	0.09	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	4.61	19.12
III. Kredit	1.58	1.94	2.64	3.10	3.35	3.58	3.79	5.75	22.23
1. Bank Umum	1.48	1.81	2.48	2.91	3.15	3.37	3.56	5.77	22.24
2. BPR	0.10	0.13	0.16	0.19	0.20	0.22	0.23	5.37	22.16
IV. LDR	61.72	66.70	76.25	88.26	82.43	85.20	83.19	(2.01)	(5.07)
1. Bank Umum	59.37	64.25	74.23	86.19	80.34	83.03	80.99	(2.04)	(5.21)
2. BPR	148.47	141.78	131.67	141.73	139.41	144.69	145.34	0.65	3.62
V. NPLs (gross)	3.00	3.52	2.51	2.57	2.66	2.81	2.99	0.18	0.42
1. Bank Umum	2.19	2.65	1.89	1.87	2.05	2.21	2.32	0.12	0.45
2. BPR	14.91	15.59	12.15	13.54	12.30	12.30	13.39	1.09	(0.15)

\*)dalam triliun Rp, kecuali LDR &amp; NPL (%)

### 3.2. Bank Umum

Kinerja bank umum pada triwulan II 2006 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-t-q) ataupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-o-y) menunjukkan perbaikan, terlihat dari peningkatan beberapa indikator utamanya yaitu total aset, penghimpunan dana pihak ketiga, meskipun penyaluran dana dalam bentuk kredit sedikit menurun dan rasio NPL sedikit memburuk yang disebabkan karena kondisi usaha debitur yang menurun.

#### 3.2.1. Kelembagaan

Jumlah institusi bank umum yang beroperasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat masih sama dengan triwulan sebelumnya yaitu sebanyak 15 bank yang terdiri dari 5 bank pemerintah & 10 bank swasta, dengan 1 (satu) kantor pusat (PT. Bank NTB) dan 32 kantor cabang lainnya yang juga disebut dengan kategori sebagai bank pelapor. Sedangkan berdasarkan kegiatan usahanya terbagi menjadi 28 kantor cabang konvensional dan 4 kantor cabang syariah.

Akibat penutupan KCP PT. Bank Danamon di Kota Bima sebagai dampak dari *redesign* dan faktor efisiensi pada triwulan I 2006, diikuti dengan penutupan 1 mesin ATM sehingga jumlahnya turun menjadi 100 buah mesin ATM.

#### 3.2.2. Aset

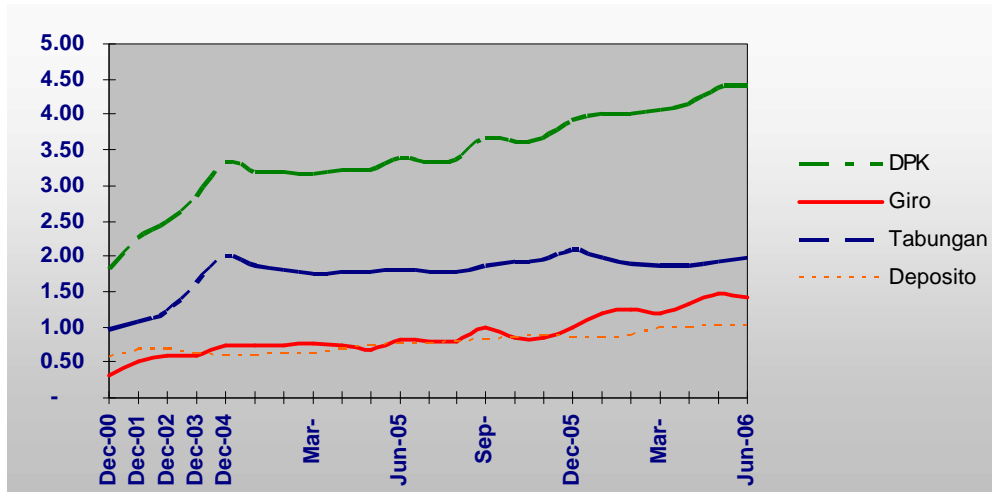
Sejalan dengan peningkatan DPK, total aset bank umum pada posisi triwulan II 2006 meningkat 5,75% (q-t-q) menjadi sebesar Rp 5,72 triliun. Penyebaran aset masih belum merata, Ibukota Propinsi NTB yaitu Kota Mataram (termasuk Kabupaten Lombok Barat) mendominasi dengan komposisi total aset bank umum sebesar 59,70%, disusul Kabupaten Sumbawa (termasuk Sumbawa Barat) sebesar



11,71%, Kabupaten Bima (termasuk Kota Bima) sebesar 11,33%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 7,11%, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 6,68% dan terkecil di Kabupaten Dompu yaitu hanya sebesar 4,01%.

### 3.2.3. Dana Pihak Ketiga

Grafik 3.1 - Perkembangan DPK bank umum (triliun Rp)

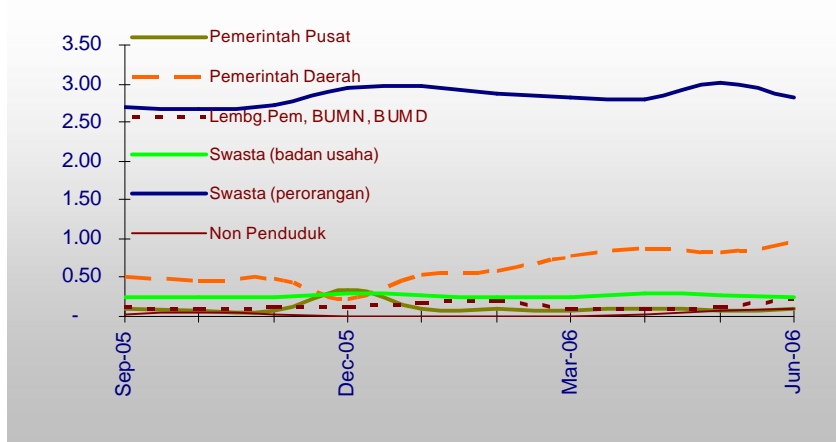


Total DPK bank umum pada posisi triwulan I 2006 tercatat sebesar Rp 4,40 triliun meningkat 8,44% (q-t-q), dengan komposisi terbesar yang dihimpun dalam bentuk tabungan sebesar 44,87%, disusul giro sebesar 31,94% dan terkecil dalam bentuk deposito sebesar 23,19%.

Pertambahan DPK dipicu oleh peningkatan giro yang diperkirakan berasal dari dana perimbangan (dana alokasi umum/DAU dan dana alokasi khusus/DAK) yang digunakan untuk pembiayaan APBD regional (Propinsi, Kota/Kabupaten), sedangkan deposito relatif stabil karena suku bunga deposito masih menarik sejalan dengan masih tingginya BI Rate sebesar 12,25% dan suku bunga penjaminan pada triwulan berjalan.

Kepemilikan DPK masih didominasi oleh swasta perorangan dengan kecenderungan penurunan di triwulan II 2006. Meningkatnya

Grafik 3.2 - Perkembangan golongan pemilik DPK BU (miliar Rp)



biaya hidup tanpa diimbangi peningkatan pendapatan mendorong penurunan posisi DPK swasta perorangan.

Sementara itu, DPK yang berasal dari sektor pemerintah daerah mengalami peningkatan akibat adanya aliran dana perimbangan yang digunakan untuk membiayai APBD propinsi maupun daerah tingkat II.

Pemda Tk.II mendominasi penempatan dana pada giro dengan komposisi 51,19% dari total giro di bank umum. Mengingat pada umumnya kegiatan bisnis menggunakan media cek/bilyet giro, dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi NTB secara umum masih bergantung kepada dana APBD. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan dan deposito lebih didominasi oleh sektor swasta terutama dari perseorangan masing-masing sebesar 94,23% dan 77,93%.

Dominasi bank pemerintah dalam penghimpunan dana pihak ketiga masih belum tergoyahkan. Pada posisi triwulan II 2006, bank swasta hanya mampu meraih 21,56% dari total DPK bank umum, sisanya dikuasai oleh bank pemerintah terutama DPK dalam bentuk giro sebanyak 94,71%.

Seperti pada triwulan sebelumnya, sebaran penghimpunan dana berdasarkan lokasi

kantor bank pelapor masih terkonsentrasi di Kota Mataram/Kab.Lombok Barat yang mencapai lebih dari 60% dari jumlah dana yang masuk ke bank umum, menandakan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi masih terpusat di Ibukota Propinsi. Ke depan, dengan dibangunnya bandara internasional Lombok maka aktivitas kegiatan ekonomi di Lombok Tengah diperkirakan akan meningkat sehingga memerlukan antisipasi infrastruktur perbankan yang memadai di Lombok Tengah.

**Tabel 32 - Komposisi golongan pemilik dana (%)**

Keterangan	DPK	Giro	Tab.	Dep.
<b>I. Penduduk</b>	<b>98.01</b>	<b>99.64</b>	<b>95.94</b>	<b>99.80</b>
A Sektor Pemerintah	28.40	79.50	0.02	12.94
1. Pemerintah Pusat	2.11	6.44	-	0.23
2. Pemerintah Daerah	21.57	60.33	0.00	9.90
(i) Pemda Tk I	5.19	9.13	-	9.80
(ii) Pemda Tk II	16.38	51.19	0.00	0.10
3 Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD	4.73	12.73	0.02	2.81
B Sektor Swasta	69.61	20.14	95.92	86.86
1. Perusahaan, yayasan, koperasi	5.24	7.79	1.66	8.67
2. Perseorangan	63.90	11.12	94.23	77.93
3. Lainnya	0.47	1.23	0.03	0.26
<b>II. Bukan Penduduk</b>	<b>1.99</b>	<b>0.36</b>	<b>4.06</b>	<b>0.20</b>

**Tabel 3.3 - Komposisi penghimpunan dan sebaran dana pihak ketiga (%)**

Keterangan	DPK	Giro	Tabungan	Deposito
<b>Penghimpunan dana</b>				
Bank Pemerintah (termasuk BPD)	78.44	94.71	75.43	61.89
Bank Swasta Nasional	21.56	5.29	24.57	38.11
<b>Sebaran dana (%)</b>				
1) Kodya Mataram/Lombok Barat	62.39	49.54	58.64	87.33
4) Kab. Sumbawa/Sumbawa Barat	13.61	18.19	14.52	5.52
3) Kab/Kota Bima	9.02	11.52	10.28	3.13
5) Kab. Lombok Timur	7.20	9.82	8.22	1.61
6) Kab. Lombok Tengah	5.16	7.85	5.51	0.80
2) Kab. Dompu	2.63	3.09	2.83	1.62

Perkembangan kesadaran menabung di Nusa Tenggara Barat dalam 5 tahun terakhir relatif stabil, terlihat dari rasio jumlah penabung dengan pendekatan jumlah rekening tabungan di bank umum terhadap jumlah penduduk yang bergerak di kisaran 20-22%.

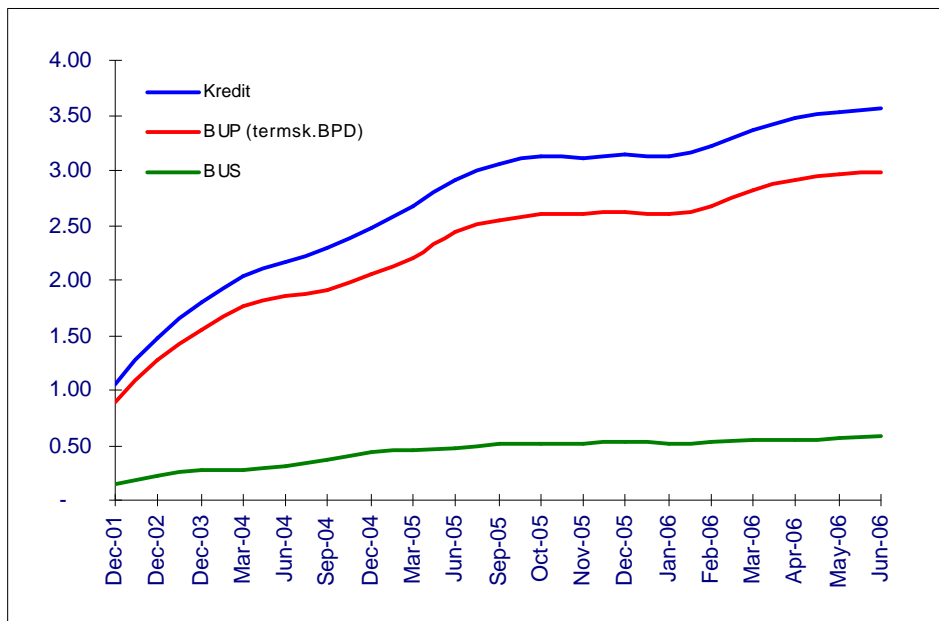
**Tabel 3.4 - Perkembangan jumlah rekening DPK Bank Umum**

Keterangan	Dec-02	Dec-03	Dec-04	Dec-05	Mar-06	Jun-06
Giro	13,243	13,620	13,452	12,955	13,941	13,921
Tabungan	824,590	920,700	891,814	921,358	927,701	870,685
Deposito	12,325	9,859	8,560	8,765	9,183	9,206
Jumlah Penduduk &)	3,929,774	4,005,360	4,076,040	4,147,102	4,147,102	4,184,239
Rasio Kesadaran menabung *)	20.98	22.99	21.88	22.22	22.37	20.81

\*) *Jml rek.tab./jml penduduk*  
& ) 2005 & 2006 angka proxy

3.2.4. Kredit

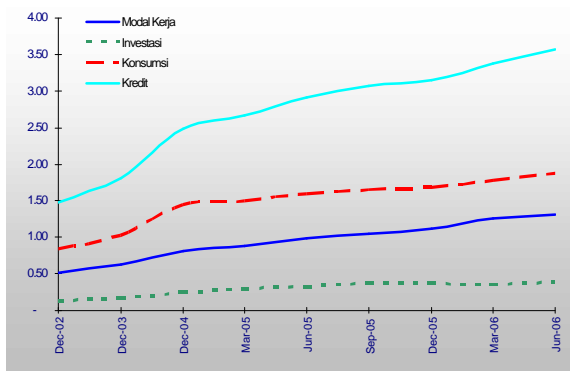
Grafik 3.3 - Perkembangan kredit di NTB (triliun Rp)



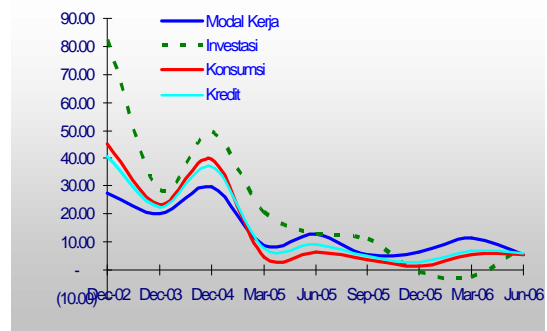
Pertumbuhan kredit di NTB hingga triwulan II 2006 menunjukkan kecenderungan terus meningkat sebagai respon positif atas penurunan suku bunga kredit bank umum (kredit modal kerja dari rata-rata 22,16% menjadi 20,86% dan kredit investasi dari rata-rata 20,02% menjadi 19,61%) akibat penurunan BI Rate dari 12,75% menjadi 12,50% di pertengahan triwulan berjalan.

Dominasi penyaluran kredit masih dipegang oleh bank umum milik pemerintah yang cenderung lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit dibandingkan bank umum milik swasta yang lebih konservatif dan cenderung mengalami stagnasi. Karakteristik penyaluran kredit di NTB menunjukkan preferensi bank umum untuk menyalurkan kredit untuk konsumsi yang dipandang lebih rendah risikonya.

Grafik 3.4 - Perkembangan outstanding kredit jenis penggunaan (triliun Rp)



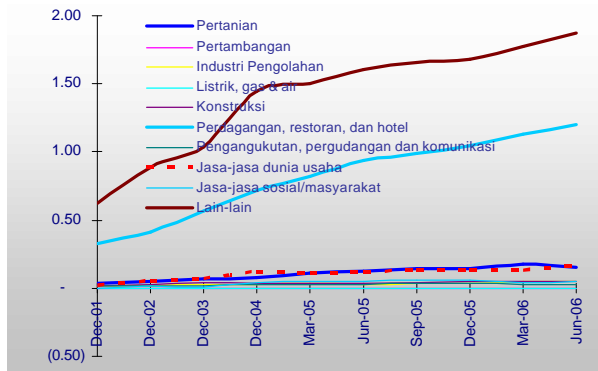
Grafik 3.5 - Pertumbuhan kredit menurut jenis penggunaan (%)



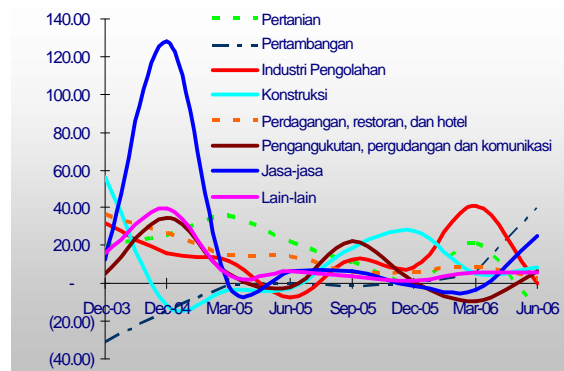
Namun demikian, pada posisi triwulan II 2006 komposisi kredit konsumsi mengalami penurunan dari 52,44% pada triwulan I-2006 menjadi 52,34% pada triwulan berjalan. Trend peningkatan ditunjukkan pada kelompok kredit investasi yang meningkat menjadi

10,70% pada triwulan berjalan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,44%, sementara itu pertumbuhan kredit konsumsi melambat relatif lebih rendah dibandingkan kredit investasi.

Grafik 3.6 - Perkembangan outstanding kredit sektoral (triliun Rp)

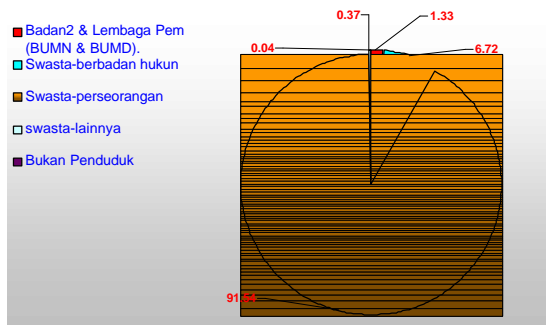


Grafik 3.7 - Pertumbuhan kredit sektoral (%)

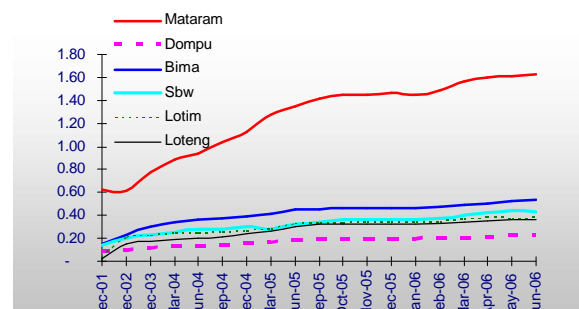


Dari sisi sektoral, kredit terkonsentrasi pada sektor lain- lain (konsumsi) diikuti oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel. Hingga triwulan II 2006 kredit yang disalurkan untuk konsumsi sebesar Rp 1,87 triliun dari Rp 3,56 triliun kredit yang disalurkan oleh bank umum. Namun demikian, pada triwulan berjalan sektor tambang dan sektor jasa- jasa mulai bergerak dengan tingkat pertumbuhan kredit masing-masing sebesar 39% dan 25%. Khusus sektor pertanian, kredit yang disalurkan mengalami kontraksi sebesar -13,04% mengingat dana yang diperlukan petani dicukupi dari hasil panen raya di triwulan II (*seasonal factors*).

Grafik 3.8 - Komposisi golongan debitur bank umum per Juni 2006 (%)



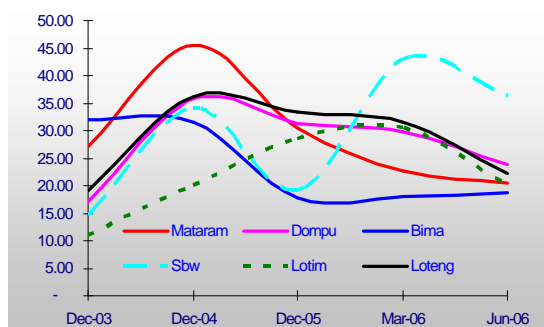
Grafik 3.9 - Sebaran perkembangan penyaluran kredit bank umum (triliun Rp)



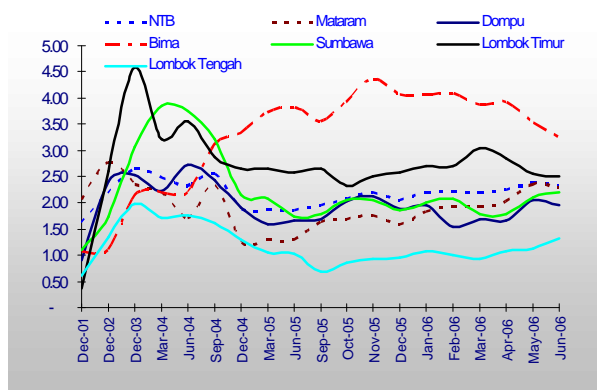
Serupa dengan triwulan sebelumnya, mayoritas kredit sebesar 91,54% lebih banyak oleh perseorangan, disusul oleh kelompok swasta yang berbadan hukum sebanyak 6,72% dan sisanya terbagi oleh kelompok swasta lainnya dan golongan bukan penduduk.

Penyaluran kredit bank umum masih terpusat di Ibukota Propinsi NTB yaitu Kota Mataram, dari Rp 3,56 triliun kredit bank umum sebanyak 45,7% disalurkan di Kota Mataram yang merupakan pusat aktivitas ekonomi NTB. Pada triwulan berjalan, hanya Bima yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan kredit bank umum, sedangkan Mataram (termasuk Lombok Barat), Dompu, Sumbawa (termasuk Sumbawa Barat), Lombok Timur dan Lombok Tengah cenderung menurun perlahan.

Grafik 3.10 - Pertumbuhan sebaran kredit bank umum (%)



Grafik 3.11 - Perkembangan NPL bank umum (%)



Tabel 3.5 - Penyaluran kredit berdasarkan lokasi kantor bank umum

Keterangan	NTB	Mataram	Dompu	Bima	Sbw	Lotim	Loteng
Kredit	3,562	1,626	219	535	437	380	365
Pangsa	100.00	45.65	6.13	15.01	12.27	10.68	10.26
NPL	2.32	2.29	1.95	3.23	2.20	2.49	1.33
<b>Jenis Penggunaan</b>							
Modal kerja	1,316	619	91	200	151	151	104
NPL	2.32	3.15	3.05	5.02	3.00	4.33	2.89
Investasi	381	166	40	46	76	13	41
NPL	3.25	4.13	1.08	4.41	3.10	2.26	1.09
Konsumsi	1,864	841	88	289	210	216	220
NPL	1.29	1.30	1.22	1.80	1.30	1.22	0.64
<b>Sektor Ekonomi</b>							
Pertanian	150	23	73	20	7	14	14
NPL	2.40	3.14	1.48	3.27	6.17	3.91	1.50
Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0
NPL	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	47	41	2	1	1	0	1
NPL	2.34	2.34	1.25	0.35	1.46	55.81	1.10
Listrik, gas & air	2	2	0	0	0	0	0
NPL	-	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	52	45	1	1	4	0	1
NPL	6.40	5.92	-	39.40	8.50	-	-
Perdagangan, restoran, dan hotel	1,199	534	46	193	212	126	89
NPL	3.58	2.84	4.22	5.58	2.84	4.70	3.49
Pengangkutan, perdagangan dan komunikasi	26	22	1	0	3	0	0
NPL	0.91	0.68	0.82	-	3.06	-	-
Jasa-jasa dunia usaha	164	106	3	31	0	23	1
NPL	3.97	5.50	-	1.16	5.28	1.24	2.86
Jasa-jasa sosial/masyarakat	49	9	0	0	0	0	39
NPL	0.70	2.46	-	-	-	-	0.31
Lain-lain	1,871	844	92	289	210	216	221
NPL	1.32	1.38	1.49	2.19	1.28	1.56	0.54
<i>Nominal (miliaran Rp.)</i>							
<i>Pangsa &amp; NPL (%)</i>							

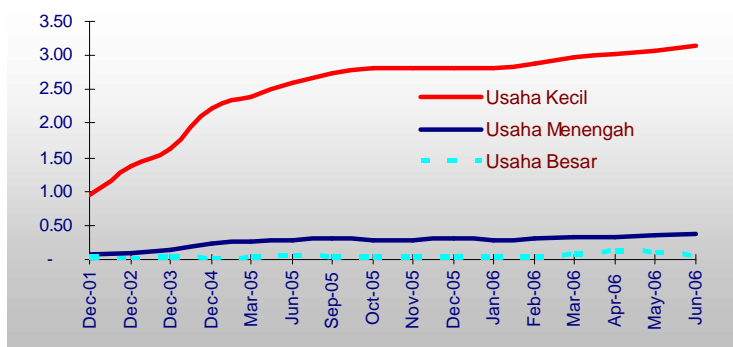
Di sisi lain, risiko kredit yang diukur dari rasio NPL yaitu perbandingan antara jumlah kredit non lancar dengan total kredit yang disalurkan, dalam 2 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan risiko kredit. Berdasarkan lokasinya, bank umum di Lombok Timur dan Bima mengindikasikan perbaikan risiko kredit dengan turunnya rasio NPL bank umum di daerah tersebut, sedangkan bank umum di daerah lain di NTB relatif mengalami kenaikan risiko kredit dengan meningkatnya rasio NPL bank umum.

Secara regional NTB, pada posisi triwulan II 2006 rasio NPL tertinggi dicapai oleh bank umum yang berlokasi di daerah Bima sebesar 3,23%, ini menandakan risiko bisnis di Kota/Kabupaten Bima cenderung lebih tinggi dari daerah lainnya di regional NTB, sedangkan rasio NPL terendah terjadi pada bank umum di daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Dari sisi jenis penggunaannya, risiko kredit non lancar yang disalurkan dalam bentuk modal kerja, relatif paling berisiko yang terefleksikan dari posisi rasio NPL saat ini, disusul kredit investasi dan terkecil pada kredit konsumsi. Secara sektoral, rasio kredit non lancar terbesar ditempati sektor konstruksi, disusul sektor jasa-jasa dunia usaha dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara umum, kredit bermasalah secara sektoral tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai angka 55,81%, disusul sektor konstruksi di Kabupaten Bima dan Sumbawa yang mencapai angka 39,40% dan 8,50% masing-masing. Ke depan, bank umum harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya terutama di beberapa daerah untuk sektor-sektor dimaksud yang memiliki risiko kredit tinggi.

Di sisi lain, perkembangan kredit yang disalurkan oleh bank umum pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) melalui

Grifik 3.12 - Perkembangan kredit UKM yang disalurkan bank umum (triliun Rp)



pendekatan plafon kredit ( $\leq$  Rp500 juta untuk kredit usaha kecil dan  $>$  Rp500 hingga Rp5 miliar untuk kredit usaha menengah) menunjukkan trend yang meningkat terutama pada akhir triwulan II 2006, meskipun agak melambat awal tahun 2006 untuk kredit usaha kecil, sedangkan kredit pada sektor usaha menengah dan usaha besar cenderung stabil.

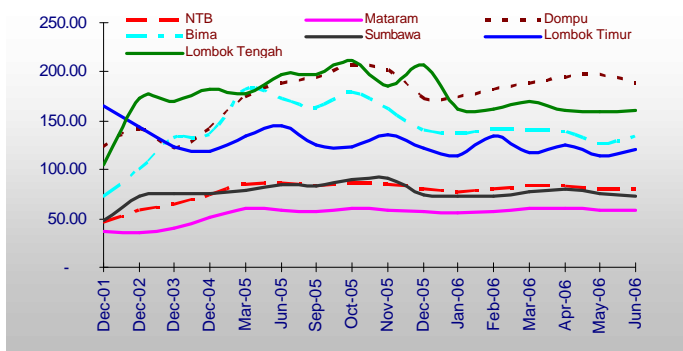
Dari total Rp 3,56 triliun kredit yang disalurkan bank umum di NTB pada posisi triwulan

II 2006, sebanyak 88,05% disalurkan ke sektor usaha kecil (termasuk konsumsi), 10,92% ke sektor usaha menengah (termasuk konsumsi) dan sisanya sebesar 1,03% ke sektor usaha besar. Patut dicermati kenyataan bahwa hanya 39,88% kredit sektor usaha kecil yang digunakan untuk kegiatan produktif, lain halnya dengan sektor usaha menengah yang 96,59% kredit disalurkan ke sektor produktif. Guna mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini ke depan, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha di sektor usaha menengah yang fokus pada kegiatan produktif.

### 3.2.5. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Dalam 3 tahun terakhir, perkembangan rasio perbandingan antara kredit yang diberikan oleh Bank Umum terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (LDR) di NTB menunjukkan arah yang cukup baik (meningkat) dimana pada posisi akhir triwulan II 2006 tercatat sebesar 80,99% sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 83,03%. Penurunan di triwulan berjalan mengindikasikan peningkatan penyaluran kredit lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga. Hal tersebut menandakan perlambatan pertumbuhan ekonomi di sektor riil pada triwulan berjalan yang memerlukan antisipasi pemerintah propinsi maupun daerah untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang positif pada triwulan sebelumnya.

Grifik 3.13 - Perkembangan LDR bank umum (%)

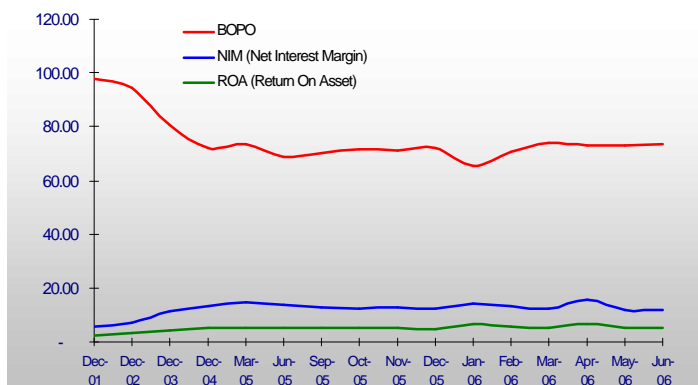


Tabel 3.6 - Rasio LDR bank umum per Juni 2006

Daerah	LDR
Dompu	189.04
Lombok Tengah	160.93
Bima	134.81
Lombok Timur	120.12
Sumbawa	73.01
Mataram	59.26
NTB	80.99

Secara regional, penyaluran kredit berdasarkan lokasi kantor bank hingga triwulan II 2006 menunjukkan 4 daerah kabupaten/kota di NTB rasio LDR-nya melampaui angka 100% yaitu Kabupaten Dompu (189,04%), Lombok Tengah (160,93%), Kabupaten/Kota Bima (134,81%) dan Lombok Timur (120,12%). Dapat disimpulkan bahwa di keempat daerah tersebut lebih banyak penyaluran dana dibandingkan dengan penghimpunan dana. Sedangkan di 2 daerah lainnya yaitu Kota Mataram/ Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa/ Sumbawa Barat terjadi sebaliknya, yang menunjukkan bahwa kedua daerah ini merupakan penyangga sumber dana bagi keempat daerah lainnya tersebut.

Grifik 3.14 - Perkembangan profitabilitas bank umum



### 3.2.6. Profitabilitas & Efisiensi Bank Umum

Pada triwulan II 2006 bank umum telah mampu memperbaiki efisiensi biaya operasional yang ditunjukkan dengan perbaikan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang tercatat 73,63% turun dibandingkan triwulan sebelumnya 74,07%.

Namun demikian, menurunnya rasio BOPO belum diimbangi peningkatan pendapatan bunga yang memadai sehingga memicu turunnya rasio profitabilitas *net interest margin* (NIM) pada triwulan berjalan sebesar 11,78% turun dibandingkan triwulan sebelumnya 12,17%. Tingginya *cost of fund* diperkirakan juga menjadi salah satu sumber penurunan profitabilitas bank umum.

Secara keseluruhan, tingkat pengembalian atas aktiva produktif bank umum tetap stabil dicerminkan oleh rasio *return on asset* (ROA) yang terjaga pada tingkat 11,78% sama seperti triwulan sebelumnya.

### 3.3. Bank Umum Syariah

Perkembangan bank umum syariah di Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan kinerja yang positif hingga posisi triwulan II 2006. Total aset hingga akhir triwulan berjalan tercatat Rp 97,17 miliar meningkat 14,36% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 3.7 - Indikator utama bank umum syariah di NTB

Keterangan	Dec-03	Dec-04	Dec-05	Jan-06	Feb-06	Mar-06	Jun-06
Asset *)	27.60	56.61	85.84	87.76	85.66	84.97	97.17
DPK *)	22.71	34.85	70.15	72.15	70.21	68.99	71.68
Finance *)	10.67	48.08	63.67	62.66	66.64	73.37	84.12
NPF (%)	-	0.09	0.44	0.28	0.26	0.52	0.56
FDR (%)	38.66	84.92	74.17	71.40	77.80	86.35	86.57

\*) miliar Rp.

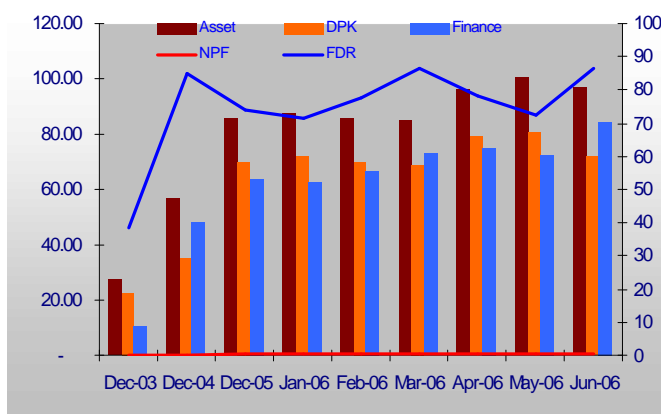
DPK yang berhasil dihimpun oleh bank umum syariah meningkat menjadi Rp 71,68 miliar pada triwulan berjalan, yang menandakan semakin bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank umum syariah.

Perkembangan lebih pesat ditunjukkan dari pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah, pada posisi triwulan II 2006 dana sebesar Rp 84,12 miliar telah disalurkan sebagai pembiayaan.

Namun yang patut dicermati adalah meningkatnya rasio *non performing finance* (NPF) yang mengindikasikan meningkatnya risiko kredit pada bank umum syariah. Pada triwulan berjalan rasio NPF tercatat 0,56% sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,52%. Ke depan, sikap kehati-hatian (*prudent*) dan selektif dalam pemilihan calon debitur yang baik karakternya/kelayakannya perlu mendapat perhatian.

Trend positif yang ditunjukkan oleh peningkatan rasio *finance to deposit* (FDR) mengindikasikan semakin membaiknya fungsi intermediasi yang dilakukan oleh perbankan umum syariah. Rasio FDR pada akhir triwulan II 2006 tercatat sebesar 86,57% dengan kecenderungan terus meningkat.

Grafik 3.15 - Perkembangan bank umum syariah di NTB



### 3.4. Perkembangan BPR

Tabel 3.8 - Indikator utama BPR di NTB

Keterangan	Dec-02	Dec-03	Dec-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Dec-05	Mar-06	Jun-06
Asset	135	178	228	229	245	258	267	276	292
DPK	67	92	122	121	131	136	144	149	156
Kredit	100	130	160	174	185	196	200	215	227
LDR (%)	148.47	141.78	131.67	143.48	141.73	143.96	139.27	144.69	145.34
NPL (%)	14.91	15.59	12.15	13.37	13.54	12.78	12.30	12.30	13.39

Selain LDR & NPL, miliar Rp.

Perkembangan kinerja BPR hingga triwulan II 2006 cukup baik ditunjukkan oleh peningkatan indikator kinerja utama BPR seperti total aset, DPK, kredit maupun LDR. Namun demikian, kecenderungan peningkatan rasio NPL yang mencapai 13,39% pada triwulan berjalan perlu mendapat perhatian khusus untuk dimitigasi demi terjaganya stabilitas sektor keuangan regional.



### 3.4.1. Kelebagaan

Dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di NTB tidak mengalami perubahan, dimana terdapat 65 kantor pusat dengan komposisi 46 BPR dimiliki pemerintah daerah sedangkan sisanya 19 BPR dimiliki swasta dengan jumlah kantor cabangnya sebanyak 3 kantor.

Wilayah operasional BPR mencakup wilayah kota Mataram sebanyak 5 kantor (4 KP dan 1 KC), Kabupaten Lombok Barat sebanyak 15 kantor (14 KP dan 1 KC), Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 11 kantor (11 KP), Kabupaten Lombok Timur sebanyak 11 kantor (11 KP), Kabupaten Sumbawa sebanyak 14 kantor (14 KP), Kabupaten Dompu sebanyak 4 kantor (4 KP) dan di Kabupaten Bima sebanyak 8 kantor (7 KP dan 1 KC).

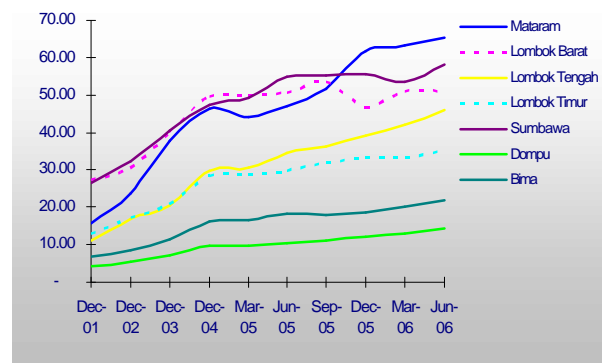
Ditinjau dari kegiatan usahanya, sebanyak 63 kantor pusat dan 3 kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, sedangkan 2 kantor pusat BPR lainnya dengan kegiatan usaha berdasarkan syariah.

### 3.4.2. Aset

Kinerja BPR hingga Juni 2006 ditandai dengan peningkatan total aset mencapai Rp 292 miliar atau meningkat 5,65% dibandingkan triwulan sebelumnya. Dominasi total aset di sektor *rural banking* masih dipegang oleh BPR milik pemerintah daerah yang memiliki 52,53% total aset BPR di NTB.

Secara regional, hampir semua BPR di wilayah kabupaten/kota menunjukkan trend peningkatan aset, kecuali Kabupaten Sumbawa yang sempat mengalami penurunan di triwulan sebelumnya dan BPR di kabupaten Lombok Barat mengalami kontraksi di akhir 2005, sebagai akibat penurunan DPK dan konsolidasi kredit.

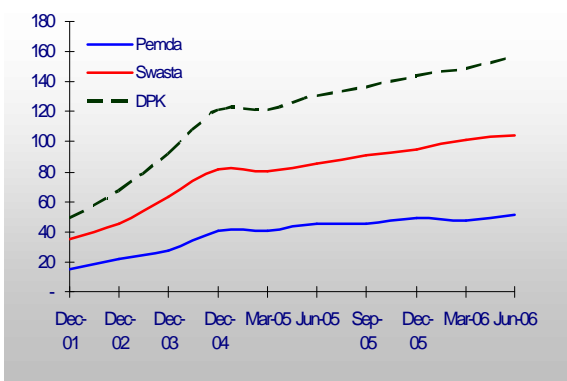
Grafik 3.16 - Perkembangan aset BPR per wilayah (miliar Rp)



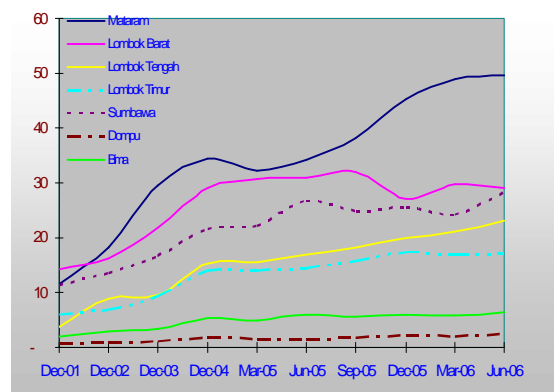
### 3.4.3. Dana Pihak Ketiga

Secara keseluruhan, total DPK yang berhasil dihimpun BPR meningkat 4,91% (q-t-q) mencapai Rp 156 miliar hingga akhir

Grafik 3.17 - Perkembangan DPK BPR di NTB (miliar Rp)



Grafik 3.18 - Peningkatan DPK BPR per wilayah (miliar Rp)



triwulan II 2006. Berlawanan dengan mayoritas aset total yang dikuasai oleh BPR milik pemerintah daerah, hampir 67% dari total DPK yang berhasil dihimpun dikelola oleh BPR milik swasta. Dapat disimpulkan bahwa upaya BPR swasta lebih aktif dalam penggalangan dana masyarakat dibandingkan dengan BPR milik pemda yang cenderung mengandalkan sumber dana dari pemilik yang bersumber dari dana APBD.

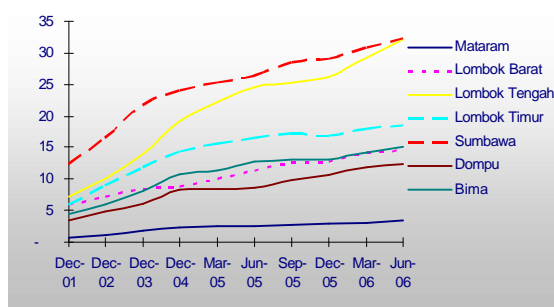
Dari sisi regional per wilayah, hanya Kabupaten Sumbawa dan Lombok Tengah yang mengalami peningkatan dalam penghimpunan DPK, sedangkan Kabupaten Lombok Barat mengalami sedikit penurunan dari Rp 30 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi Rp 29 miliar pada triwulan berjalan. Untuk kabupaten/kota lainnya relatif tidak mengalami perubahan penghimpunan DPK untuk 2 triwulan terakhir ini.

#### 3.4.4. Perkembangan Kredit yang diberikan

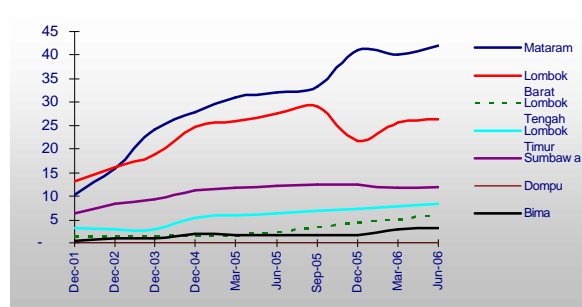
Keterangan	Dec-02	Dec-03	Dec-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Dec-05	Mar-06	Jun-06
Pemda	54	72	88	95	103	109	112	121	128
Swasta	46	58	73	78	83	87	89	94	98
Kredit-BPR	100	130	160	174	185	196	200	215	226
NPL									
Pemda	14.16	14.87	13.66	13.42	13.58	14.01	13.33	14.21	15.59
Swasta	15.81	16.48	10.33	13.31	13.49	11.23	11.00	9.83	10.51
NPL-BPR	14.91	15.59	12.15	13.37	13.54	12.78	12.30	12.30	13.39

Penyaluran kredit pada triwulan kedua 2006 mengalami peningkatan 5,4% (q-t-q) mencapai Rp 226 miliar, walaupun demikian pertumbuhan yang terjadi di triwulan berjalan mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,5%. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, BPR milik pemerintah daerah masih mendominasi penyaluran kredit di NTB. Namun demikian, meningkatnya risiko kredit BPR yang terefleksikan dari meningkatnya rasio NPL, sebagian besar dipicu oleh tingginya rasio NPL BPR milik pemerintah daerah yang mencapai 15,59% pada triwulan berjalan, lebih besar dari BPR swasta yaitu 10,51%.

Grafik 3.19 - Perkembangan kredit BPR Pemda (miliar Rp)



Grafik 3.20 - Perkembangan kredit BPR Swasta (miliar Rp)

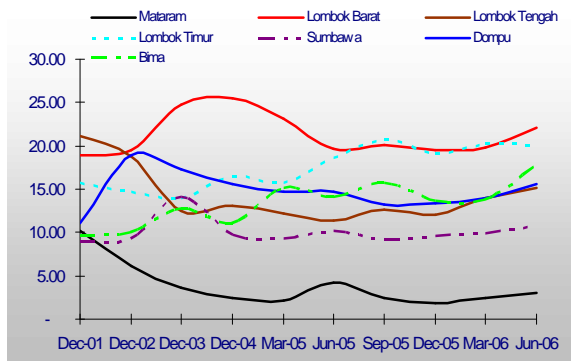


Secara regional, BPR yang dimiliki oleh Pemda menunjukkan trend peningkatan penyaluran kredit hampir di semua wilayah kabupaten/kota, kecuali di Kota Mataram yang cenderung stagnan. Sedangkan untuk BPR milik swasta hampir di semua wilayah kabupaten/kota mengalami stagnasi penyaluran kredit kecuali kota Mataram dan kabupaten Lombok Tengah.

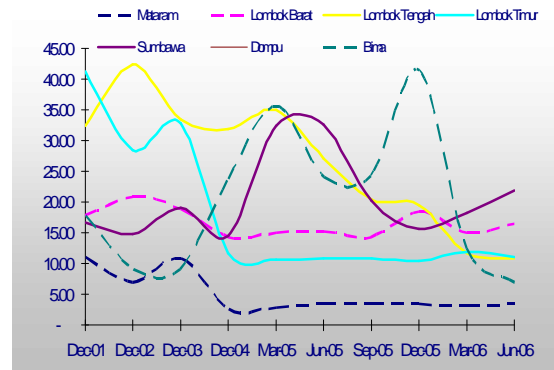
Secara regional, BPR milik swasta di Bima menunjukkan perbaikan risiko kredit yang cukup signifikan dengan turunnya rasio NPL dari 12,29% di triwulan sebelumnya menjadi 6,94% pada triwulan berjalan. Namun demikian, memburuknya risiko kredit dialami BPR milik swasta di Sumbawa yang mencapai rasio NPL 21,91% pada triwulan II 2006 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 18,26%.

Sementara itu, BPR milik pemerintah daerah mengalami kenaikan rasio NPL di seluruh wilayah kabupaten/kota di NTB yang memicu

Grafik 3.21 - Perkembangan NPL kredit BPR Pemda (%)



Grafik 3.22 - Perkembangan NPL kredit BPR Swasta (%)

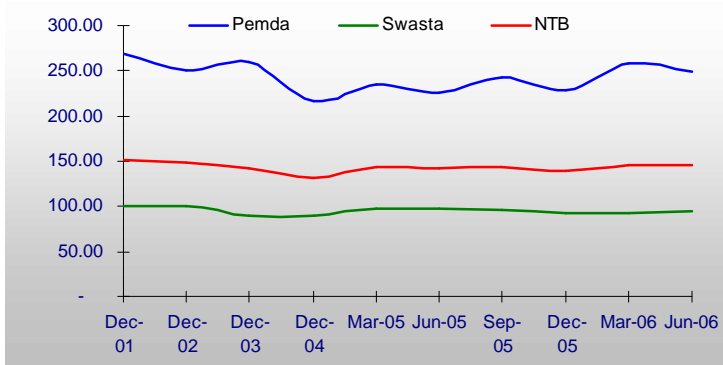


kenaikan NPL BPR milik pemerintah daerah menjadi 15,59% pada posisi triwulan II 2006.

### 3.4.5. Loan to Deposit Ratio

Hingga akhir triwulan II 2006, rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) BPR di NTB masih tinggi mencapai angka sebesar 145,34%.

Grafik 3.23 - Perkembangan LDR BPR di NTB



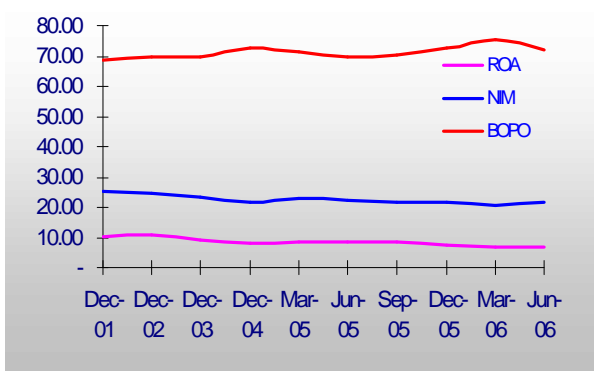
Tingginya rasio tersebut dipicu oleh tingginya rasio LDR BPR yang dimiliki pemerintah daerah di mana pada posisi terakhir telah mencapai angka 248,76%, sedangkan BPR milik swasta yang relatif stabil pada kisaran 90% dimana pada posisi triwulan II 2006 tercatat sebesar 94,17%.

Ketergantungan BPR milik pemerintah daerah atas dana dari pemilik yang bersumber dari APBD ditunjukkan oleh tingginya rasio LDR dengan pertumbuhan DPK yang relatif rendah. Ke depan, dengan adanya ide penggabungan usaha BPR milik

pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong BPR untuk lebih aktif menghimpun DPK tidak hanya bergantung pada dana APBD.

### 3.4.6. Profitabilitas & Efisiensi BPR

Grafik 3.24 - Perkembangan profitabilitas & efisiensi BPR di NTB (%)



Pada triwulan II 2006, BPR mampu memperbaiki tingkat efisiensi yang diukur dari rasio BOPO yang menurun menjadi 71,78% dibandingkan rasio BOPO yang tercatat 75,54% pada triwulan sebelumnya.

Membainya efisiensi BPR telah mendorong perbaikan profitabilitas BPR yang ditunjukkan dengan meningkatnya rasio NIM pada triwulan berjalan mencapai 21,62%.

Namun demikian, membaiknya efisiensi dan profitabilitas BPR belum mampu memperbaiki tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh aset produktif BPR secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari rasio ROA yang masih

menunjukkan trend penurunan dan menyentuh angka 6,93% pada akhir triwulan II 2006.

### 3.5. Perkembangan Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran di NTB berkembang seiring dengan dinamika aktivitas ekonomi regional yang menunjukkan trend positif. Pada triwulan II 2006, jumlah transaksi *real time gross settlement* (RTGS) dalam lembar transaksi kirim dan terima tercatat meningkat 45,6% dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian secara nominal terjadi penurunan -39,56% (q-t-q) karena pada triwulan lalu terjadi penyetoran kembali uang hasil perputaran di triwulan IV 2005 yang membutuhkan dana tunai untuk kegiatan musiman terutama hari raya idul fitri dan natal.

Sementara itu, aliran uang tunai yang tercatat di KBI Mataram pada triwulan berjalan menunjukkan *net outflow* sebesar 230 miliar yang dipicu oleh realisasi BOT dan BOS tahap II untuk Propinsi NTB. Di sisi lain, perbandingan jumlah uang yang tidak layak edar terhadap aliran uang masuk mengalami peningkatan di triwulan II 2006 sebesar 14,21% (q-t-q) walaupun tidak sebesar triwulan yang lalu.

## 3.5.1. Transaksi Keuangan Secara Tunai

## 3.5.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)

**Tabel 3.10 - Perkembangan aliran uang di KBI Mataram**  
Miliar Rp.

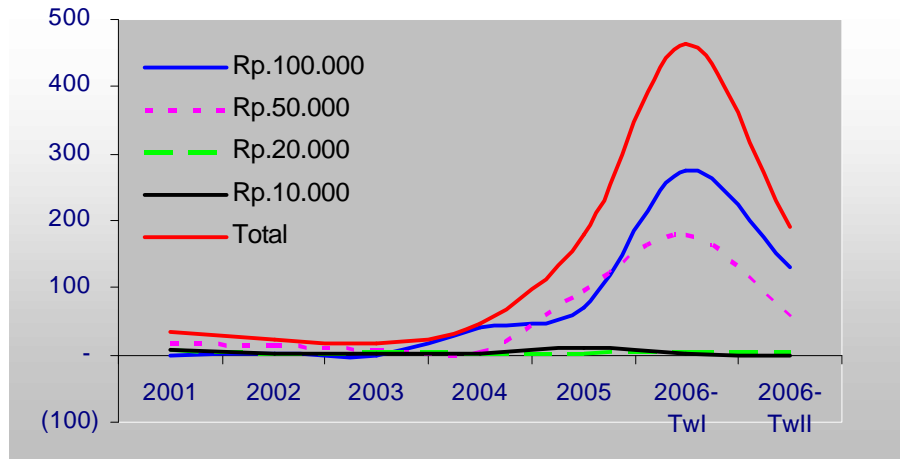
Posisi	Inflow	Outflow	Net Inflow	PTTB	% PTTB thd inflow
<b>2002</b>	<b>2,622</b>	<b>2,379</b>	<b>244</b>	<b>601</b>	22.91
<b>2003</b>	<b>2,834</b>	<b>3,022</b>	<b>(188)</b>	<b>674</b>	23.78
<b>2004</b>	<b>3,248</b>	<b>3,341</b>	<b>(93)</b>	<b>690</b>	21.25
<b>2005</b>	<b>3,600</b>	<b>3,835</b>	<b>(236)</b>	<b>1,018</b>	28.29
<i>Tw.I</i>	814	698	115	188	23.13
<i>Tw.II</i>	818	937	(119)	244	29.83
<i>Tw.III</i>	840	1,107	(267)	314	37.38
<i>Tw.IV</i>	1,128	1,093	35	272	24.11
<b>2006</b>					
<b>Tw.I</b>	<b>1,082</b>	<b>922</b>	<b>160</b>	<b>266</b>	24.58
<b>Tw.II</b>	<b>1,112</b>	<b>1,342</b>	<b>(230)</b>	<b>158</b>	14.21
<i>Apr</i>	331	379	(48)	56	
<i>Mei</i>	375	462	(86)	55	
<i>Jun</i>	405	501	(95)	47	
y-o-y	35.94	43.22	93.28	(35.25)	
q-t-q	2.77	45.55	(243.75)	(40.60)	

Aliran uang keluar di NTB pada triwulan II 2006 melebihi aliran uang masuk yang secara total menimbulkan *net outflow* sebesar Rp 230 miliar. Penyebabnya, pemerintah daerah melakukan dana bantuan langsung tunai (BLT) tahap II yang bersumber dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) di penghujung triwulan berjalan. Untuk Kota Mataram setidaknya 22 ribu kepala keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penerima BLT telah menerima dana sejumlah Rp 300 ribu per KK, di tempat lain Kabupaten Lombok Barat dana BLT telah sedikit meringankan tidak kurang dari 100 ribu KK. Pencairan dana BLT yang dilakukan melalui kantor pos juga berlangsung lancar di kabupaten/kota lainnya di NTB. Di sisi lain, pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap II di bulan April juga ikut memicu *net outflow* pada triwulan berjalan.

Indikasi tingginya uang tidak layak edar tampak dari masih tingginya rasio uang tidak layak edar yang akan dimusnahkan atau disebut Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) terhadap aliran uang masuk (*inflow*). Untuk triwulan II 2006 rasio PPTB terhadap *inflow* tercatat 14,21% menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pemusnahan uang tidak layak edar dilakukan dalam rangka *Clean Money Policy* yang bertujuan memelihara kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat. Ke depan, perlu lebih ditingkatkan upaya sosialisasi ke masyarakat bagaimana cara memegang uang kertas yang baik dan benar serta upaya untuk mendorong peningkatan bertransaksi secara non tunai untuk mengurangi besaran uang tidak layak edar (UTLE).

### 3.5.1.2. Uang Palsu

Grafik 3.25 - Perkembangan temuan uang palsu (lembar) rata-rata per triwulanan



Trend peningkatan temuan uang palsu secara triwulanan mencapai puncaknya pada triwulan yang lalu terutama untuk pecahan besar (Rp 100.000 dan Rp 50.000). Pada triwulan berjalan tercatat jumlah uang palsu sebesar Rp 15.880.000 atau ekuivalen dengan 190 lembar uang, di mana 68% merupakan pecahan Rp 100.000.

Semakin maraknya peredaran uang palsu memerlukan penanganan khusus, di antaranya penyuluhan mengenai uang palsu ke berbagai lapisan masyarakat sebagai upaya membantu KB Mataram dan aparat terkait untuk mengidentifikasi keberadaan uang palsu yang merugikan negara. Tabel berikut menggambarkan jumlah temuan uang palsu yang tercatat di bank indonesia Mataram dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3.11 - Uang palsu yang ditemukan di Kantor Bank Indonesia Mataram

THN	PECAHAN								JMLAH	
	Rp.100.000		Rp. 50.000		Rp. 20.000		Rp. 10.000			
	Nominal	lbr	Nominal	Lbr	Nominal	lbr	Nominal	Lbr	Nominal	Lbr
2002	300,000	3	3,100,000	62	260,000	13	110,000	11	3,770,000	89
2003	200,000	2	1,400,000	28	500,000	25	90,000	9	2,190,000	64
2004	15,900,000	159	900,000	18	180,000	9	30,000	3	17,010,000	189
2005	28,100,000	281	19,300,000	386	160,000	8	470,000	47	48,030,000	722
2006										
Tw-I	27,600,000	276	8,950,000	179	100,000	5	30,000	3	36,680,000	463
Tw-II	13,000,000	130	2,800,000	56	80,000	4	-	-	15,880,000	190

### 3.5.2. Transaksi Keuangan Secara Non Tunai

#### 3.5.2.1. Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, aktivitas transaksi keuangan melalui RTGS dengan nominal minimal Rp 100 juta menunjukkan trend peningkatan. Pada triwulan II 2006 jumlah transaksi kirim dan terima masing-masing meningkat 31,77% (q-t-q) dan 77,99% (q-t-q). Hal ini mengindikasikan kecenderungan

**Tabel 3.12 - Transaksi RTGS di Kantor Bank Indonesia Mataram**  
*Nom. (milyar rp.)*

Posisi	Transfer Send		Transfer Received		Total	
	Lbr.	Nom.	Lbr.	Nom.	Lbr.	Nom.
<b>2004</b>	<b>4,208</b>	<b>4,825</b>	<b>2,168</b>	<b>3,752</b>	<b>6,376</b>	<b>8,577</b>
<b>2005</b>	<b>4,572</b>	<b>4,648</b>	<b>2,202</b>	<b>4,174</b>	<b>6,774</b>	<b>8,821</b>
<i>Tw. I</i>	1,027	858	551	818	1,578	1,675
<i>Tw. II</i>	1,110	1,061	559	1,049	1,669	2,110
<i>Tw. III</i>	1,228	1,100	544	1,139	1,772	2,239
<i>Tw. IV</i>	1,207	1,629	548	1,168	1,755	2,797
<b>2006</b>	<b>3,020</b>	<b>2,595</b>	<b>1,579</b>	<b>1,387</b>	<b>4,599</b>	<b>3,982</b>
<i>Tw. I</i>	1,303	1,519	568	963	1,871	2,482
<i>Tw. II</i>	1,717	1,076	1,011	424	2,728	1,500
y-o-y (%)	54.68	1.41	80.86	(59.58)	63.45	(28.91)
q-t-q (%)	31.77	(29.16)	77.99	(55.97)	45.80	(39.56)

penggunaan sarana RTGS dalam aktivitas transaksi bisnis yang bernilai nominal besar semakin meningkat. Namun demikian secara nominal, nilai transaksi menurun -39,56% (q-t-q) dan tercatat sejumlah Rp 1.500 miliar. Tingginya nilai nominal transaksi triwulan yang lalu diperkirakan dipicu *seasonal effect* yaitu masuknya dana perimbangan maupun dana yang akan digunakan untuk membayar kelanjutan dari kompensasi BBM (bantuan langsung tunai).

#### 3.5.2.2. Transaksi Kliring

Transaksi non tunai di bawah Rp 100 juta yang dilakukan melalui kegiatan kliring untuk triwulan II 2006 mengalami penurunan 5,48% (q-t-q) walaupun demikian secara nominal jumlah transaksi meningkat 2,01% (q-t-q) yang tercatat Rp 712 miliar. Diperkirakan aktivitas perekonomian di NTB bergerak positif ditandai oleh meningkatnya *nominal size* dari transaksi giral selama triwulan berjalan walaupun relatif masih belum secepat yang diharapkan pemerintah propinsi maupun daerah.

Secara tahunan, meskipun terjadi penurunan baik nominal maupun jumlah transaksi, semata-mata timbul karena belum betul-betul pulihnya perekonomian NTB akibat kenaikan BBM di triwulan IV 2005 lalu.

**Tabel 3.13 - Data Perputaran Kliring di KBI Mataram**

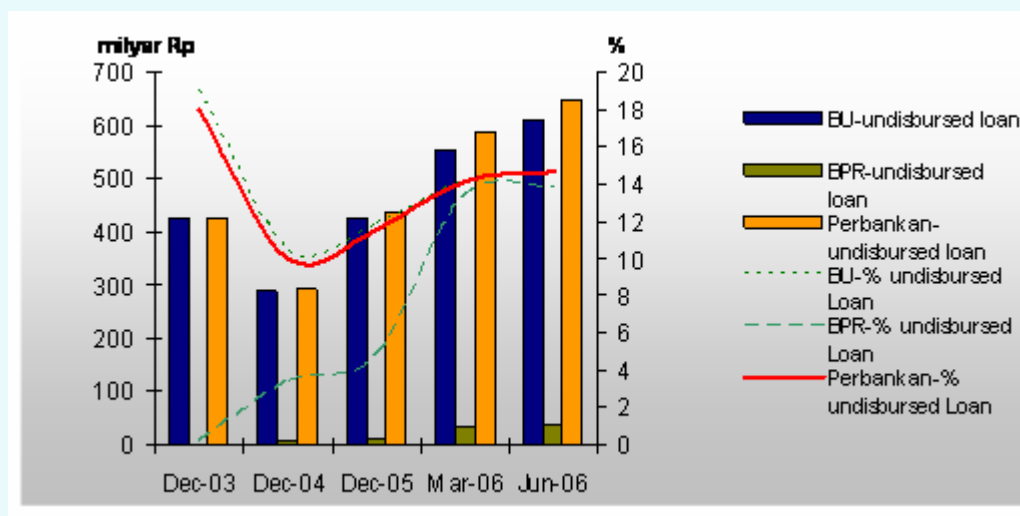
Posisi	Perputaran Kliring	
	Lbr.	Nominal *)
2001	139,081	5,150
2002	148,047	4,639
2003	150,099	2,441
2004	171,127	2,586
2005	171,316	3,064
<i>Tw. I</i>	39,226	673
<i>Tw. II</i>	40,940	723
<i>Tw. III</i>	45,077	785
<i>Tw. IV</i>	46,073	883
2006		
<i>Tw. I</i>	40,904	698
<i>Tw. II</i>	38,662	712
q-t-q	(5.48)	2.01
y-o-y	(5.56)	(1.52)

\*) miliar rupiah

## BOKS – 2

### TREND PENINGKATAN UNDISBURSED LOAN DI TRIWULAN II 2006

- ☞ Posisi Triwulan II 2006, sektor perbankan di Propinsi NTB mengalami peningkatan persetujuan kredit mencapai Rp 4,4 triliun meningkat 6,4% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan makin membaiknya fungsi intermediasi perbankan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
- ☞ Namun demikian,, membaiknya fungsi intermediasi belum mampu diimbangi oleh peningkatan kapasitas perekonomian oleh debitur di Propinsi NTB. Hal ini mengindikasikan kondisi fiskal dan ekonomi di NTB belum mampu mendorong sektor riil untuk ekspansi. Salah satu indikasinya tercermin dari realisasi anggaran pembangunan APBD Propinsi/Kota/Kabupaten yang masih berada pada level 20% atau lebih rendah. Sampai dengan penghujung triwulan II 2006, jumlah plafon kredit yang belum digunakan (undisbursed loan) meningkat 10,33% mencapai Rp 648 miliar dari total Rp 4,436 miliar plafon kredit yang telah disetujui.
- ☞ Ke depan, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kegiatan produktif terutama di sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) sesuai dengan karakteristik perekonomian Propinsi NTB. Diharapkan penggunaan plafon kredit dapat lebih optimal untuk membiayai kegiatan produktif di sektor UMKM demi bergeraknya roda perekonomian ke arah yang positif. Upaya ini akan semakin optimal apabila sisi fiskal pmda dapat dioptimalkan sesuai rencana, khususnya dalam realisasi anggaran belanja publik.
- ☞ Dengan bergulirnya roda perekonomian, diharapkan kesejahteraan rakyat Propinsi NTB dapat mengalami peningkatan secara berkesinambungan.



Grafik Perkembangan Undisbursed Loan Perbankan NTB Triwulan II-2006

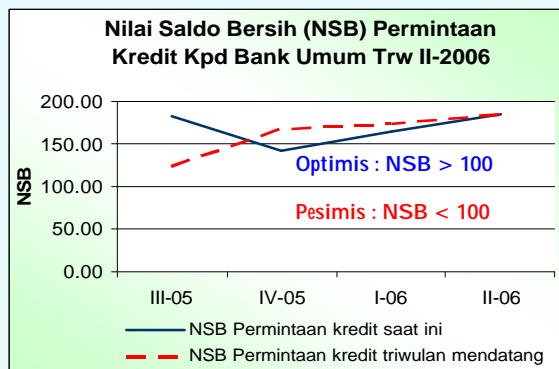


**BOKS – 3**

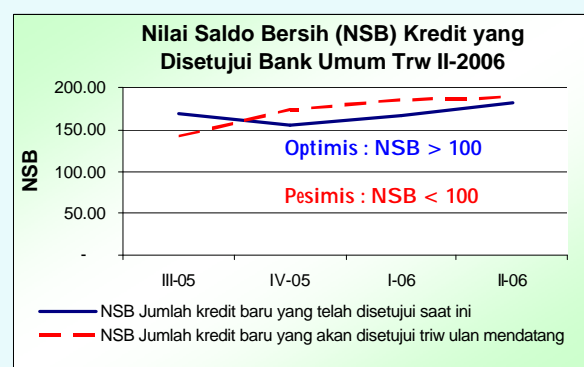
**SURVEI OPINI PIMPINAN/PEJABAT BANK UMUM  
TRIWULAN II 2006  
TERHADAP PEMBERIAN KREDIT**

- ☞ Ke depan, diperkirakan sektor riil mulai bergerak ke arah yang positif ditunjukkan dengan peningkatan permintaan kredit kepada bank umum pada triwulan II 2006. Peningkatan permintaan kredit tersebut, secara umum direspon secara baik oleh bank umum dengan peningkatan jumlah kredit baru yang disetujui. Hingga triwulan II 2006 plafon kredit yang disetujui bank umum mencapai Rp 4,173 miliar meningkat 6,42% dibandingkan triwulan yang telah lalu.
- ☞ Ekspektasi triwulan mendatang masih disikapi secara optimis baik permintaan dan realisasi kredit baru maupun penghimpunan dana pihak ketiga, walaupun hanya mengalami sedikit peningkatan.
- ☞ Penyaluran kredit pada triwulan mendatang lebih diprioritaskan ke kredit modal kerja (69,70% responden), sedangkan secara sektoral difokuskan ke sektor perdagangan (78,79% responden) termasuk hotel dan restoran.

Grafik 1.



Grafik 2



- ☞ Dalam penyaluran kredit terdapat beberapa sub sektor yang diminati maupun dihindari oleh perbankan. Hampir di seluruh Kab/Kota di Propinsi NTB, sub sektor perdagangan sembako menjadi sub sektor favorit untuk penyaluran kredit karena dinilai memiliki risiko kredit yang relatif rendah. Selain itu sub sektor kelontong maupun hasil bumi menjadi sasaran penyaluran kredit oleh perbankan di Propinsi NTB.
- ☞ Di sisi lain, sub sektor konstruksi di Kab/Kota Bima, Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat dianggap berisiko tinggi dan dihindari perbankan untuk penyaluran kredit. Sub sektor peternakan unggas di Kabupaten Lombok Timur maupun di Kab/Kota Dompu juga dihindari untuk penyaluran kredit, sub sektor tersebut memiliki risiko tinggi dengan berjangkitnya virus flu burung belakangan ini, diperburuk oleh masih rendahnya pengawasan penyakit unggas di Propinsi NTB.

**Tabel 1. Penyaluran kredit baru per kota/kabupaten di NTB**

No.	Kota/Kabupaten	Sub sektor penyaluran kredit baru Triwulan I 2006 Perdagangan sembako, hasil bumi, bahan bangunan, kelontong, konsumtif.
2	Kab. Dompu	perdagangan sembako, kelontong, hasil bumi, bahan bangunan dan <i>sparepart</i> kendaraan.
3	Kab. Sumbawa & Kab. Sumbawa Barat	perdagangan sembako, hasil bumi, bahan bangunan, budi daya udang/pembenihan, pembuatan gedung, lantai jemur, transportasi.
4	Kab. Lombok Tengah	Perdagangan sembako, usaha kelontong, perdagangan hasil bumi, pupuk.
5	Kab. Lombok Timur	Perdagangan sembako, kelontong, konveksi, industri batuapung, pertanian (termasuk bawang putih/merah), hasil laut.
6	Kota Mataram & Kab. Lombok Barat	Perdagangan sembako, kelontong/retail (customer goods), supermarket, hotel, tembakau, bahan bangunan, konstruksi ruko/pasar/perumahan, konsumtif (KPR, kendaraan), perdagangan hasil bumi, spareparts kendaraan, koperasi, kontraktor proyek pemerintah, transportasi, percetakan.

**Tabel 2. Pemberian kredit yang dihindari per daerah kota/kabupaten di NTB**

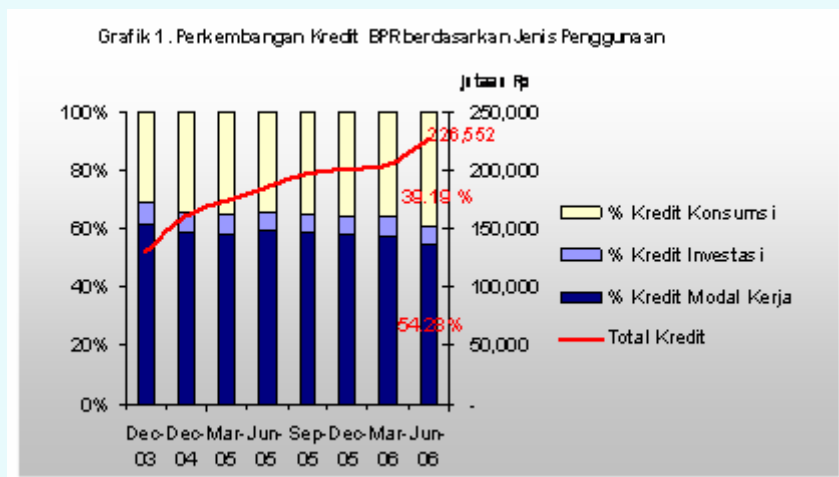
No.	Kota/Kabupaten	Sektor/sub sektor yang paling dihindari bank pada Triwulan II 2006 dan rencana Triwulan III 2006
1	Kab./Kota Bima	Transportasi, konstruksi, Budi daya udang, Perdagangan kayu (Logging), Jasa Hiburan, peternakan unggas, industri pengolahan, listrik, gas & air, tambak, pertanian (bawang).
2	Kab. Dompu	Peternakan unggas, angkutan, illegal logging, perikanan darat, pertambangan, jasa wartel, jasa hiburan, tambak udang.
3	Kab. Sumbawa & Kab. Sumbawa Barat	Konstruksi, jasa hiburan, pertambangan/penggalian, listrik, gas & air, Perikanan/tambak udang, industri pengolahan, pengangkutan, pergudangan & komunikasi.
4	Kab. Lombok Tengah	Transportasi, perhotelan, RMU/heller, pengadaan alat pengolahan tanah.
5	Kab. Lombok Timur	Peternakan unggas, tanaman perkebunan tahunan, pertanian bawang putih, jasa perhotelan, transportasi, RMU/heller.
6	Kota Mataram & Kab. Lombok Barat	Pertambangan, penggalian pasir/batu apung, peternakan unggas, peternakan, perikanan, pertanian, properti, perikanan, transportasi, listrik, gas dan air bersih, industri pengolahan plastik dan tekstil, illegal logging, tanaman keras, entertainment, angkutan darat & perhotelan, PJTKI, perdagangan hasil hutan.

## BOKS - 4

### POTENSI LINKAGE PROGRAM MENGGERAKKAN RODA PEREKONOMIAN PROPINSI NTB DI TRIWULAN MENDATANG

☞ Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi andalan Pemda NTB untuk memutar roda perekonomian dengan harapan dapat segera meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat NTB. Untuk meningkatkan aktivitas usaha sektor UMKM, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semakin aktif mengucurkan kredit yang mencapai Rp 226 miliar hingga Tw II-2006.

☞ Trend positif peningkatan kredit BPR menunjukkan meningkatnya fungsi intermediasi BPR yang perlu mendapat dukungan dana dari perbankan umum yang relatif mengalami eksesi likuiditas. Penyaluran kredit dari Bank Umum (BU) ke BPR diwujudkan melalui inisiatif yang diluncurkan Bank Indonesia yakni, Linkage Program.



☞ Hingga Semester II-2006, berdasarkan survei yang dilakukan KBI Mataram dari 65 BPR di NTB terdapat 48 BPR yang menyatakan kebutuhan kredit dari BU. Kebutuhan total dana tersebut diperkirakan hingga akhir tahun 2006 sebesar Rp 20 miliar. Sampai dengan penghujung bulan Juni 2006, jumlah kredit disetujui dan direalisasi dari linkage program sebesar Rp 5 miliar. Hal ini mengindikasikan di triwulan mendatang potensi kredit linkage program masih cukup besar.

☞ Trend menunjukkan porsi kredit untuk kegiatan konsumsi cenderung meningkat mencapai 39% pada triwulan berjalan namun dengan laju melambat. Sebaliknya porsi untuk kegiatan produktif berupa modal kerja cenderung turun mencapai 54% dengan laju melambat pula.

☞ Diharapkan akan timbulnya turning point di mana porsi kredit untuk kegiatan produktif bergerak ke arah positif dengan akselerasi meningkat, sehingga kredit dari Linkage Program dapat disalurkan oleh BPR untuk penggunaan yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB.

## BAB IV PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT

### APBD 2006

Dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2006 yang telah disampaikan oleh pemerintah Propinsi NTB dan Kabupaten/Kota di NTB, tampak ketergantungan pemerintah daerah atas dana alokasi umum (DAU) sebagai sumber utama pendapatan

Tabel 4.1-APBD 2006 Propinsi, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima & Kota Bima (miliar Rp)

NO.	KETERANGAN	PROP	MTR	LOBAR	LOTENG	SBW	KSB	DOMPU	BIMA	KOTA BIMA
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>715.03</b>	<b>345.11</b>	<b>469.99</b>	<b>474.57</b>	<b>364.32</b>	<b>224.71</b>	<b>295.67</b>	<b>450.37</b>	<b>242.71</b>
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	237.90	22.54	31.73	20.17	21.44	17.55	9.56	19.46	6.17
a.	Pajak Daerah	179.49	10.01	21.02	6.26	6.63	0.79	1.90	1.84	1.89
b.	Retribusi Daerah	25.65	8.78	5.97	7.01	8.70	0.80	2.70	7.08	2.10
c.	Bagian Laba Usaha Daerah	15.85	0.88	2.47	1.63	2.22	-	2.97	0.92	0.11
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	16.90	2.87	2.27	5.27	3.89	15.96	1.99	9.62	2.06
2.	DANA PERIMBANGAN	477.13	322.57	437.36	454.40	342.88	207.16	279.21	400.91	233.79
a.	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	73.00	24.43	22.95	26.28	27.72	68.05	14.96	24.24	16.19
b.	Dana Alokasi Umum	404.13	247.25	372.24	387.02	272.56	103.76	231.61	330.94	183.58
c.	Dana Alokasi Khusus	-	37.85	34.79	36.22	32.41	28.75	25.63	36.36	28.84
d.	Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keu.dari Propinsi	-	13.05	7.38	4.88	10.19	6.60	7.01	9.37	5.18
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	0.90	-	-	-	6.91	30.00	2.75
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>750.03</b>	<b>352.36</b>	<b>473.65</b>	<b>468.63</b>	<b>381.45</b>	<b>273.71</b>	<b>299.53</b>	<b>449.87</b>	<b>244.00</b>
1.	APARATUR DAERAH	310.95	118.37	236.66	145.86	150.20	118.79	193.26	283.70	127.39
a.	Belanja Administrasi Umum	256.45	72.82	205.08	123.48	107.56	80.04	147.29	245.24	107.21
b.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	45.86	18.87	26.16	16.58	22.04	11.85	40.49	15.19	13.63
c.	Belanja Modal	8.65	26.68	5.42	5.80	20.60	26.90	5.48	23.27	6.55
2.	PELAYANAN PUBLIK	289.11	209.34	222.21	284.90	206.93	132.09	75.15	137.32	102.13
a.	Belanja Administrasi Umum	44.20	102.11	81.52	165.58	115.54	4.38	0.01	3.20	6.66
b.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	154.81	19.30	88.92	51.46	34.85	46.13	36.08	87.69	53.94
c.	Belanja Modal	90.10	87.93	51.77	67.86	56.54	81.58	39.06	46.43	41.52
3.	BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	139.88	22.14	12.71	36.87	23.65	18.67	22.13	25.85	12.98
4.	BELANJA TIDAK TERSANGKA	10.09	2.50	2.07	1.00	0.67	4.16	8.99	3.00	1.50
	<b>SURPLUS (DERST)</b>	<b>(35.00)</b>	<b>(7.25)</b>	<b>(3.66)</b>	<b>5.94</b>	<b>(17.13)</b>	<b>(49.00)</b>	<b>(3.86)</b>	<b>0.50</b>	<b>(1.29)</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>35.00</b>	<b>7.25</b>	<b>3.66</b>	<b>(5.94)</b>	<b>17.13</b>	<b>49.00</b>	<b>3.86</b>	<b>(0.50)</b>	<b>1.29</b>
1.	PENERIMAAN DAERAH	46.50	11.50	10.61	1.06	24.03	55.17	18.83	2.90	28.84
2.	PENGELUARAN DAERAH	11.50	4.25	6.95	7.00	6.90	6.17	14.97	3.40	27.55
<b>IV</b>	<b>NON ANGGARAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	PENERIMAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PENGELUARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Biro keuangan Propinsi & Bagian Keuangan Kabupaten/Kota

yang disusul pajak daerah sebagai sumber pendapatan terbesar kedua. Untuk Propinsi NTB, Rp 404,13 miliar atau 57% dari total pendapatan APBD 2006 sebesar Rp 715,03 miliar berasal dari dana alokasi umum, serta Rp 179,49 berasal dari pajak daerah. Diperkirakan kedua sumber pendapatan tersebut akan menjadi tumpuan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk beberapa tahun ke depan kecuali pemda dapat meningkatkan pendapatan dari sumber lainnya seperti pendapatan asli daerah (PAD). Hal serupa juga ditunjukkan oleh kabupaten/kota lainnya di NTB yang masih harus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah lain demi menjaga kesinambungan pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Di sisi lain, dari total anggaran belanja APBD 2006 Propinsi NTB sebesar Rp 750,03 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk belanja administrasi umum aparatur daerah yakni Rp 256,45 miliar atau lebih dari sepertiga total anggaran belanja Propinsi NTB.

Besarnya dana yang dianggarkan untuk belanja administrasi umum ditujukan untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya meningkat pada tahun ini setelah adanya gelombang penerimaan PNS baru. Patut dicermati besarnya dana yang alokasikan untuk belanja modal, hanya Rp 90 miliar untuk belanja modal pelayanan publik atau kurang dari 12% total anggaran belanja pemerintah Propinsi NTB. Minimnya dana yang ditujukan bagi belanja modal tentunya akan mengurangi kemampuan pemda untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi regional NTB. Secara keseluruhan, trend yang sama ditunjukkan oleh APBD 2006 Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi NTB.

NO.	KETERANGAN	PROP	MTR	DOMPU	KOTA BIMA *)	RATA2
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>37.48</b>	<b>46.05</b>	<b>51.34</b>	<b>44.94</b>	<b>44.95</b>
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.84	18.69	0.64	59.38	25.14
a.	Pajak Daerah	26.05	18.60	4.87	15.72	16.31
b.	Retribusi Daerah	13.56	11.29	(28.67)	119.06	28.81
c.	Bagian Laba Usaha Daerah	13.13	17.81	49.23	316.22	99.09
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	3.92	50.00	(2.15)	65.14	29.23
2.	DANA PERIMBANGAN	50.06	54.17	63.59	65.20	58.25
a.	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	7.25	8.15	(0.51)	110.69	31.39
b.	Dana Alokasi Umum	61.73	47.47	66.09	55.35	57.66
c.	Dana Alokasi Khusus	-	378.45	104.72	143.99	156.79
d.	Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keu.dari Propinsi	-	17.81	105.43	34.81	39.51
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	(100.00)	(100.00)	(54.78)	(87.55)	(85.58)
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>28.92</b>	<b>38.86</b>	<b>44.85</b>	<b>15.97</b>	<b>32.15</b>
1.	APARATUR DAERAH	17.33	26.96	37.08	(7.09)	18.57
a.	Belanja Administrasi Umum	24.81	29.00	29.98	(11.42)	18.09
b.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	1.20	26.21	78.43	46.85	38.17
c.	Belanja Modal	(39.24)	22.19	6.76	(3.68)	(3.49)
2.	PELAYANAN PUBLIK	57.19	51.04	58.46	53.71	55.10
a.	Belanja Administrasi Umum	470.83	21.12	100.00	165.91	189.47
b.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	45.66	21.83	132.35	77.20	69.26
c.	Belanja Modal	28.90	128.42	21.54	24.28	50.79
3.	BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	14.15	7.01	44.69	106.94	43.20
4.	BELANJA TIDAK TERSANGKA	(2.18)	107.98	136.29	200.00	110.52
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(43.25)</b>	<b>(59.55)</b>	<b>(82.25)</b>	<b>(97.69)</b>	<b>(70.69)</b>
<b>III</b>	<b>PEM BIAYAAN</b>	<b>(43.25)</b>	<b>(57.99)</b>	<b>(62.03)</b>	<b>(89.29)</b>	<b>(63.14)</b>
1.	PENERIMAAN DAERAH	(39.37)	(36.93)	34.02	88.55	11.57
2.	PENGELUARAN DAERAH	(23.39)	326.32	312.62	692.75	327.08
<b>IV</b>	<b>NON ANGGARAN</b>	-	-	-	-	-
1.	PENERIMAAN	-	-	-	-	-
2.	PENGELUARAN	-	-	-	-	-

Bila kita bandingkan dengan APBD tahun yang lalu, total pendapatan APBD 2006 secara keseluruhan mengalami peningkatan

NO.	DAERAH	DAU		
		2005 **)	2006 *)	Peningkatan%
1	Propinsi Nusa Tenggara Barat	249.89	404.15	61.73
2	Kab. Bima	203.51	330.94	62.62
3	Kab. Dompu	139.45	231.81	66.24
4	Kab. Lombok Barat	243.89	372.24	52.62
5	Kab. Lombok Tengah	260.80	387.04	48.41
6	Kab. Lombok Timur	308.86	465.49	50.71
7	Kab. Sumbawa	179.55	272.56	51.80
8	Kota Mataram	167.66	247.25	47.47
9	Kota Bima	118.17	183.58	55.35
10	Kab. Sumbawa Barat	40.27	103.76	157.66
	<b>TOTAL</b>	<b>1,912.05</b>	<b>2,998.81</b>	<b>56.84</b>

\*) sumber: www.djpk.dapkeu.go.id  
 \*\*) sumber: APBD per daerah

rata-rata 44,95% yang dipicu oleh besarnya penambahan pendapatan dari DAU dan DAK (dana alokasi khusus). Secara regional, peningkatan DAU rata-rata sebesar 56,84% dengan peningkatan tertinggi terjadi pada daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai angka 157,66% dan terendah terjadi di Kota Mataram sebesar 47,47% (tabel 4.3). Sedangkan peningkatan DAK rata-rata sebesar 181,77% dengan peningkatan tertinggi terjadi di daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan terendah di Kabupaten Lombok Timur (tabel 4.4).

DAK yang dialokasi untuk bidang pertanian sebesar Rp 31 miliar mengalami peningkatan empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Besarnya dana tersebut tidak lepas dari inisiatif tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk mendorong sektor pertanian/pedesaan sebagai roda penggerak perekonomian karena dipandang memiliki imbas langsung terhadap pertumbuhan sektor riil. Selain itu, DAK untuk bidang pengairan bidang air bersih juga mengalami peningkatan tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan penduduk NTB yang saat ini berada di peringkat terendah dalam Indeks Pengembangan Manusia (IPM).

Sementara itu, sektor pendidikan mendapatkan porsi terbesar (23%) dari total DAK 2006. Diharapkan dalam realisasinya dana tersebut dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas pendidikan serta perluasan kesempatan sekolah untuk seluruh lapisan penduduk NTB menuju terwujudnya peningkatan kompetensi agar dapat mampu menaikkan taraf hidup sekaligus meningkatkan IPM penduduk NTB.

### REALISASI APBD TRIWULAN II 2006

**Tabel 4.4 - Dana Alokasi Khusus (DAK) 2006 di Nusa Tenggara Barat (miliar rp.)**

No.	Daerah	ALOKASI PER BIDANG									Total
		Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang Infrastruktur			Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Pertanian	Bidang Praspem	Bidang Lingkungan Hidup	
				Jalan	Irigasi	Air Bersih					
1	Kab. Bima	7.73	5.96	6.75	2.08	1.39	3.24	5.91	3.00	0.30	36.36
2	Kab. Dompu	6.25	5.31	5.04	1.77	1.17	2.87	2.92	-	0.30	25.63
3	Kab. Lombok Barat	8.51	7.79	7.49	1.59	2.35	2.73	3.53	-	0.80	34.79
4	Kab. Lombok Tengah	7.55	6.15	6.39	4.33	1.37	3.08	5.65	-	1.70	36.22
5	Kab. Lombok Timur	9.39	5.97	5.46	1.56	1.20	3.08	3.51	-	-	30.17
6	Kab. Sumbawa	8.54	7.42	6.26	2.18	1.33	3.11	3.27	-	0.30	32.41
7	Kota Mataram	8.92	8.62	6.29	1.02	3.44	3.22	2.06	2.00	2.28	37.85
8	Kota Bima	7.44	5.45	6.02	1.52	2.07	1.44	1.60	3.00	0.30	28.84
9	Kab. Sumbawa Barat	5.51	4.66	6.04	1.10	1.08	1.76	3.30	3.00	2.30	28.75
<b>TOTAL</b>		<b>69.84</b>	<b>57.33</b>	<b>55.74</b>	<b>17.15</b>	<b>15.40</b>	<b>24.53</b>	<b>31.75</b>	<b>11.00</b>	<b>8.28</b>	<b>291.01</b>
Penambahan DAK dari 2005 (%)											
1	Kab. Bima	103.42	199.50	152.81	20.23	107.46	155.12	418.42	100.00	100.00	174.00
2	Kab. Dompu	82.22	196.65	93.10	27.34	95.00	147.41	158.41	100.00	100.00	111.64
3	Kab. Lombok Barat	126.20	303.63	165.60	27.20	298.31	145.95	212.39	100.00	100.00	176.29
4	Kab. Lombok Tengah	73.17	202.96	118.84	99.54	110.77	154.55	400.00	100.00	100.00	150.31
5	Kab. Lombok Timur	105.02	203.05	89.58	(27.44)	114.29	154.55	350.00	100.00	100.00	113.52
6	Kab. Sumbawa	147.54	271.00	121.20	14.14	125.42	119.01	319.23	100.00	100.00	149.69
7	Kota Mataram	168.67	425.61	205.34	100.00	100.00	261.80	100.00	100.00	100.00	378.45
8	Kota Bima	91.26	159.52	90.51	(10.59)	100.00	48.45	100.00	100.00	100.00	143.99
9	Kab. Sumbawa Barat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	(25.00)	100.00	618.75
<b>Total</b>		<b>128.29</b>	<b>271.07</b>	<b>153.94</b>	<b>39.43</b>	<b>320.77</b>	<b>165.48</b>	<b>421.35</b>	<b>175.00</b>	<b>100.00</b>	<b>181.77</b>

sumber : [www.djapk.depkeu.go.id](http://www.djapk.depkeu.go.id)

Pada triwulan sebelumnya, berdasarkan data terkini Pemerintah Propinsi NTB, menunjukkan realisasi keuangan APBD sebesar 19,8% sedangkan realisasi fisik mencapai 27,68%. Masih rendahnya serapan anggaran diperkirakan terjadi karena pelaksanaan pembangunan yang semakin besar dilaksanakan melalui

pihak ketiga yang diputuskan melalui tender, hal ini membutuhkan sejumlah waktu. Selain itu beberapa faktor musiman juga turut menghambat serapan anggaran.

Dari data yang berhasil dihimpun, realisasi pendapatan APBD 2006 hingga triwulan II 2006, untuk Propinsi NTB tercatat 48,11%, Kab. Sumbawa Barat mencapai 37,08%, sedangkan untuk Kab. Dompu hanya sebesar 16,36%. Masih rendahnya realisasi pendapatan di Kabupaten Dompu patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat agar tidak mengganggu realisasi belanja pada triwulan-triwulan mendatang.

Di sisi lain, realisasi belanja untuk Propinsi NTB dan Kab. Sumbawa Barat berada di kisaran 20% lebih tinggi dibandingkan realisasi Kab. Dompu yang baru mencapai 9,76%. Di saat lambannya akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, pengeluaran belanja pemerintah daerah terutama belanja modal diharapkan mampu menstimulus kegiatan produktif di daerah setempat.

Dari data realisasi yang telah disampaikan pemerintah Propinsi NTB, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Dompu menunjukkan belum terealisasinya sebagian besar anggaran pembangunan yang terakumulasi dalam sisa lebih anggaran tahun berjalan dalam komponen pengeluaran daerah di pos pembiayaan. Untuk Prop. NTB, jumlah tersebut mencapai Rp 259 miliar, jumlah yang signifikan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di NTB.

Lambannya realisasi anggaran pembangunan menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi di sektor riil. Hal ini diperkuat oleh peningkatan jumlah plafon kredit yang

belum digunakan (*undisbursed loan*) yang mencapai Rp 453 miliar atau 10,33% dari total plafon kredit yang disetujui perbankan di NTB hingga penghujung triwulan II 2006. Penyebabnya, sektor riil belum mampu menyerap eksekusi likuiditas sektor perbankan yang telah disalurkan melalui pemberian kredit seiring membaiknya fungsi intermediasi perbankan di Propinsi NTB.

Pada triwulan III 2006, anggaran pendapatan diperkirakan terealisasi rata-rata sebesar 73,06% dan anggaran belanja diperkirakan baru terealisasi rata-rata sebesar 38,97%, sedangkan pembiayaan diperkirakan dapat direalisasi sebesar 70,33% dari yang direncanakan (tabel 4.6).

Besarnya peningkatan DAU dan DAK pada tahun 2006 yang rata-rata meningkat masing-masing sebesar 56,84% dan 181,77% diperkirakan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Seperti yang ditunjukkan oleh keseriusan Pemerintah Daerah Sumbawa dalam penanganan bidang pengairan dan pengembangan sumber daya air (PSDA). Dana yang dialokasikan untuk kedua bidang itu mencapai Rp 5,7 miliar yang digunakan untuk proyek pembangunan dua unit bendung desa serta rehabilitasi enam unit bendungan lainnya secara simultan.

Secara keseluruhan, sepanjang dilakukannya optimalisasi pengeluaran anggaran belanja terutama belanja pada sektor pelayanan publik, roda pertumbuhan ekonomi regional diperkirakan akan bergulir lebih cepat di triwulan-triwulan mendatang.

**Tabel 4.5 Realisasi APBD 2006 Hingga Triwulan II 2006**  
Propinsi NTB, Kab.Sumbawa Barat, dan Kab. Dompu (milyar Rp)

NO.	URAIAN	REALISASI		
		PROP	KSB	DOMPU
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>343.99</b>	<b>73.49</b>	<b>48.36</b>
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.06	4.04	1.23
	2. DANA PERIMBANGAN	241.93	69.45	47.13
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>155.86</b>	<b>41.09</b>	<b>29.24</b>
	1. APARATUR DAERAH	91.47	30.11	26.73
	2. PELAYANAN PUBLIK	28.54	7.60	0.79
	3. BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	35.85	3.34	1.71
	4. BELANJA TIDAK TERSANGKA	-	0.04	0.01
	<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	<b>188.13</b>	<b>32.40</b>	<b>19.12</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>(188.12)</b>	<b>(32.40)</b>	<b>(19.12)</b>
	1. PENERIMAAN DAERAH	71.36	55.17	0.36
	2. PENGELUARAN DAERAH	259.48	87.57	19.48

Sumber : Biro Keuangan Prop.NTB

**Tabel 4.6 Perkiraan realisasi APBD 2006**  
Propinsi NTB, Kota Mataram & Kab.Sumbawa Barat (%)

NO.	URAIAN	REALISASI	
		sd Tw III	sd Tw IV
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>73.06</b>	<b>111.55</b>
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.78	104.30
	2. DANA PERIMBANGAN	73.43	112.24
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	103.08	103.08
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>38.97</b>	<b>86.83</b>
	1. APARATUR DAERAH	40.39	84.58
	2. PELAYANAN PUBLIK	30.28	91.69
	3. BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN	61.36	90.70
	4. BELANJA TIDAK TERSANGKA	2.22	22.17
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>70.33</b>	<b>100.00</b>
	1. PENERIMAAN DAERAH	66.27	100.00
	2. PENGELUARAN DAERAH	22.22	100.00

Sumber : Biro Keuangan Prop.NTB, Bagian Ekonomi Kota Mataram & Kab. Sumbawa Barat (dialah)

## BAB V

### PERKEMBANGAN INVESTASI DI NUSA TENGGARA BARAT

Perkembangan data investasi terkini yang diperoleh dari BKPM Propinsi NTB adalah data rencana dan realisasi investasi kumulatif di Propinsi NTB sampai dengan triwulan II-2006. Secara umum, perkembangan investasi langsung di Propinsi NTB belum banyak mengalami perkembangan yang berarti. Hingga triwulan ini, secara kumulatif, tidak terdapat perubahan pada rencana maupun realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN, (masih sama dengan posisi akhir tahun 2005), yaitu sebesar Rp 3,573 triliun dan Rp 1.016 triliun. Sedangkan rencana Penanaman Modal Asing (PMA) sampai dengan triwulan II-2006 di NTB mengalami sedikit peningkatan, namun dari rencana tersebut, belum ada yang terealisasi hingga saat ini. Pada triwulan ini, nilai rencana PMA sebesar US\$ 5,655 miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar US\$ 9,935 juta (5.65%) dari rencana investasi sampai dengan akhir tahun 2005 sebesar US\$ 5,645 miliar.

Tabel 5.1

Rekapitulasi Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA & PMDN Di Propinsi NTB (s.d Semester I-2006)							
No	Sektor	Rencana Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK	Realisasi Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK
1	Tanaman pangan	2,250,000	0.06	100	125,000	0.01	11
2	Perikanan	481,711,877	13.48	7,889	146,316,915	14.40	1,893
3	Peternakan	53,013,900	1.48	275	6,060,198	0.60	113
4	Perkebunan	40,426,280	1.13	3,754	14,504,810	1.43	94
5	Kehutanan	1,766,875	0.05	322	20,584,000	2.03	638
6	Pertambangan	70,000	0.00	10	20,000	0.00	11
7	Industri	1,252,562,807	35.06	3,742	69,676,597	6.86	465
8	Perhotelan	1,678,728,448	46.99	8,235	716,997,275	70.58	1,494
9	Pengangkutan	38,744,500	1.08	886	32,859,500	3.23	492
10	Jasa Lainnya	23,554,044	0.66	464	8,764,517	0.86	119
<b>Total</b>		<b>3,572,828,731</b>	<b>100</b>	<b>25,677</b>	<b>1,015,908,812</b>	<b>100</b>	<b>5,330</b>
PMA							
1	Perkebunan	21,269	0.38	2,706	73,528	2.38	1,132
2	Perikanan	25,773	0.46	1,954	11,501	0.37	667
3	Pertambangan	2,276,112	40.25	2,487	2,900,920	93.91	4,280
4	Industri	2,703,784	47.81	13,469	652	0.02	39
5	Perhotelan	580,191	10.26	4,383	61,732	2.00	973
6	Jasa lainnya	47,978	0.85	1,702	40,857	1.32	546
<b>Total</b>		<b>5,655,107</b>	<b>100</b>	<b>26,701</b>	<b>3,089,190</b>	<b>100</b>	<b>7,637</b>

Sumber Data : BKPM Propinsi NTB, di olah

Sejak tahun 70-an sampai dengan akhir tahun 2005, nilai investasi yang dapat terealisasi di NTB masih sangat rendah, hanya sebesar 28,43% untuk PMDN dan 54,72% untuk PMA. Dari rencana investasi kumulatif PMDN sebesar Rp3,57 triliun, hanya Rp1,02 triliun yang terealisasi. Demikian pula dengan rencana kumulatif PMA sebesar US\$5,65 miliar, hanya terealisasi sebesar US\$3,09 miliar.

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa sektor yang paling diminati oleh investor asing adalah sektor pertambangan, perkebunan dan perhotelan. Jumlah tenaga kerja yang diserap PMA mencapai 7.637 orang, yang didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan.



Sementara itu, investor lokal lebih cenderung berinvestasi ke sektor perhotelan, perikanan, industri, pengangkutan dan kehutanan. Penyerapan tenaga kerja oleh PMDN berjumlah 5.330 orang, yang terbanyak di sektor perikanan dan perhotelan.

Dari data BKPM Propinsi NTB, diketahui bahwa pada triwulan II-2006, tambahan rencana investasi yang diminati oleh investor asing berjumlah 12 proyek (SP baru) dan beberapa proyek perluasan terutama dibidang perikanan, perhotelan, perdagangan ekspor impor, dan jasa lainnya. Perusahaan calon investor asing yang telah mendapat persetujuan tersebut berasal dari negara Italia, Singapura, Jepang, Spanyol, Belanda, Swiss, Inggris, Australia dan Amerika. Alokasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 387 orang, terdiri dari 364 tenaga kerja Indonesia dan 23 tenaga kerja asing.

Tabel 5.2

Rekapitulasi Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA & PMDN Di Propinsi NTB (s.d Desember 2005)							
No	Sektor	Rencana Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK	Realisasi Investasi PMDN (ribu Rp) dan PMA (ribu US\$)	Pangsa (%)	TK
1	Tanaman pangan	2,250,000	0.06	100	125,000	0.01	11
2	Perikanan	481,711,877	13.48	7,889	146,316,915	14.39	1,893
3	Peternakan	53,013,900	1.48	275	6,060,198	0.60	113
4	Perkebunan	40,426,280	1.13	3,754	14,504,810	1.43	94
5	Kehutanan	1,766,875	0.05	322	20,584,000	2.12	638
6	Pertambangan	70,000	0.00	10	20,000	0.00	11
7	Industri	1,252,562,807	35.06	3,742	69,676,597	6.85	465
8	Perhotelan	1,678,728,448	46.99	8,235	716,997,275	70.51	1,494
9	Pengangkutan	38,744,500	1.08	886	32,859,500	3.23	492
10	Jasa Lainnya	23,554,044	0.66	464	8,764,517	0.86	119
<b>Total</b>		<b>3,572,828,731</b>	<b>100.00</b>	<b>25,677</b>	<b>1,015,908,812</b>	<b>100</b>	<b>5,330</b>
PMA							
1	Perkebunan	21,269	0.38	2,706	73,528	15.14	1,132
2	Perikanan	21,773	0.39	1,954	11,501	8.71	667
3	Pertambangan	2,276,112	40.32	2,487	2,900,920	56.26	4,280
4	Industri	2,703,784	47.90	13,469	652	0.47	39
5	Perhotelan	575,256	10.19	4,383	61,732	12.70	973
6	Jasa lainnya	46,978	0.83	1,702	40,857	6.72	546
<b>Total</b>		<b>5,645,172</b>	<b>100</b>	<b>26,701</b>	<b>3,089,190</b>	<b>100</b>	<b>7,637</b>

Sumber Data : BKPM Propinsi NTB, di olah

Rendahnya investasi di NTB dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagaimana informasi dari BKPM Propinsi NTB, dari sisi eksternal, faktor penghambat investasi di NTB antara lain di bidang sosial politik, keamanan dan penolakan buruh terhadap Undang-Undang Perburuhan, yang menyebabkan para investor masih menunggu waktu yang tepat untuk berinvestasi. Sementara dari sisi internal, kendala yang dihadapi adalah dukungan infrastruktur yang masih kurang memadai, seperti bandara internasional yang masih terbatas, belum memadainya pelabuhan dan alat transportasi di daerah ini.

Sebagai daerah yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, alternatif pilihan bidang investasi di NTB sangat luas. Rencana investasi yang telah maupun yang masih dalam tahap perencanaan antara lain :

- ✍ Fokus pembangunan tahun 2007 terutama diarahkan pada pembangunan infrastruktur daerah, terutama daerah terisolir di Pulau Sumbawa, termasuk daerah lingkaran selatan. Selain itu, pembangunan akan diarahkan pula pada pelabuhan perintis di Teluk Elong,

Lombok Timur; Pelabuhan Lunyuk, Pelabuhan Maluku, hingga pembangunan pelabuhan di Dompu. Diharapkan pelabuhan ini dapat menghubungkan Pulau Lombok bagian selatan dengan Pulau Sumbawa bagian selatan. Pelabuhan berstandar dan bertaraf nasional juga akan dibangun di Dermaga Awang, Lombok Tengah.

- ✍ Rencana pembangunan kilang minyak dengan kapasitas yang sangat besar akan dibangun di Lombok Tengah. Tempat tersebut akan dijadikan pusat pengolahan minyak mentah yang didatangkan/dibawa dari luar. Pemilihan tempat di daerah Lombok Tengah dilatarbelakangi beberapa alasan, antara lain daerah tersebut merupakan daerah yang sangat strategis, baik dilihat dari kawasan maupun jalur transportasi darat dan laut. Lokasi perairan Lombok Tengah bagian selatan ini bisa dilalui oleh kapal besar yang akan mengangkut minyak mentah dan minyak jadi untuk dipasarkan.
- ✍ Rencana pembangunan pelabuhan industri Dermaga Labuhan Haji, namun saat ini belum mendapat persetujuan Pemerintah Propinsi. Rencana ini telah dianggarkan dalam anggaran untuk pembantuan dermaga tahun 2007.
- ✍ Rencana pembangunan Dam Pandandure telah dianggarkan di APBD Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi masing-masing 20%. Tahun ini anggaran untuk konstruksi telah tersedia.
- ✍ Salah satu upaya untuk mendorong kegiatan investasi di NTB dilakukan dengan pengoptimalan sarana dan prasarana transportasi. Terkait dengan hal tersebut, direncanakan pengoperasian kapal cepat di Pelabuhan Badas, Sumbawa dan rute penyeberangan Benete, Kabupaten Sumbawa barat dan pelabuhan telong-elong Kecamatan Jero Waru Lombok Timur. Dengan demikian, maka pintu masuk ke Sumbawa dan Lombok akan semakin lebar. Investor tidak lagi kesulitan dalam hal transportasi untuk melakukan penjajakan maupun penanaman modal di daerah ini.
- ✍ Untuk meningkatkan sektor perikanan di NTB dan memudahkan pengiriman ikan ke berbagai daerah, direncanakan pembangunan pelabuhan pusat perikanan tangkap nasional di awal tahun 2007, akan dipusatkan di perbatasan Kabupaten Sumbawa-Dompu atau di Teluk Saleh (merupakan salah satu dari 6 pelabuhan perikanan nasional). Selama ini pengiriman ikan harus melalui pelabuhan di Surabaya. Saat ini NTB sudah memiliki pelabuhan perikanan nusantara yang berada di Teluk Awang, Lombok Tengah yang telah beroperasi sejak tahun 2005. Pelabuhan ini diharapkan mampu menopang kesejahteraan masyarakat pesisir dan meningkatkan PAD disektor kelautan.
- ✍ Kegiatan pengeboran pada lokasi tambang minyak di Cekungan Tengah, Lombok Barat bagian utara akan segera dilaksanakan untuk mengetahui jumlah cadangan minyak di daerah tersebut. Direncanakan akan direalisasikan pada akhir Juli 2006. Rencana ini telah mendapatkan persetujuan dan BP Migas Pusat. Apabila jumlah cadangan minyak tersebut telah diketahui, maka akan dapat mengundang sejumlah investor yang siap menanamkan modal datang ke NTB, untuk mengkaji kemungkinan pembangunan kilang minyak di daerah tersebut.
- ✍ Rencana pengembangan LTDC (*Lombok Tourism Development Cooperation*) yang berada di Pantai Kuta - Lombok Tengah. Diharapkan proyek ini dapat mengundang investor di bidang kepariwisataan.
- ✍ Tahun 2006 ini direncanakan akan dibangun dua pelabuhan laut, yaitu di Elong-elong, Lombok bagian selatan dan Long Elang di Pulau Sumbawa bagian selatan. Sumber biaya pembangunannya berasal dari APBD dan APBN.

- ✍ Pelaksanaan pembangunan dermaga penyeberangan Kayangan II telah selesai dan telah diresmikan. Dampak positif yang dari dibangunnya dermaga tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, aktivitas transportasi dan pariwisata di NTB. Sebagai propinsi kepulauan, konsep pengembangan transportasi dengan daerah daratan berbeda. Keberadaan dermaga penyeberangan ini sangat vital dan strategis, seiring peningkatan frekuensi dan volume angkutan yang sangat tinggi.
- ✍ Rencana pembangunan Dam Mujur dan rehabilitasi bendungan Batu Jahe telah disetujui Pemerintah Pusat.
- ✍ Pada tahun 2006 ini, prasarana penunjang Bandara Internasional Lombok Tengah akan segera dibangun. Proyek yang akan direalisasikan antara lain pembuatan jalan raya yang menghubungkan tanak awu dengan berbagai kota di Lombok. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi berfungsinya Bandara Internasional Lombok Tengah dan pembangunan pelabuhan perikanan nusantara di Awang, Lombok Tengah yang akan dimulai pada tahun 2007. Prasarana yang akan dibangun tersebut meliputi akses Bandara-Mataram, Bandara-Selong, Bandara-Kuta, Bandara-Selong Belanak, Bandara-Teluk Awang dan jalan lingkar Pulau Lombok.
- ✍ Rencana pembangunan pelabuhan kontainer di Ampenan. Peabuhan tersebut akan berfungsi sebagai tempat pengemasan barang dan pengiriman hasil industri keluar daerah dan juga untuk merangsang pertumbuhan industri di NTB.
- ✍ Untuk menunjang kebutuhan air multi sektor, pemerintah telah membangun sejumlah prasarana sumber daya air, diantaranya 8 buah bendungan, 168 embung, 1897 embung rakyat dan 489 sumur pompa air tanah. Selain itu dibangun pula saluran suplesi sepanjang 39,50 km di SSWS Dodokan-SWS Lombok. Prasarana pembangunan air tersebut sebagian besar difungsikan untuk melayani sawah irigasi yang mencapai 263.873 ha dengan budidaya tanaman padi seluas 355.825 ha dan palaiwija 205.184 ha.
- ✍ Rencana pembangunan pusat pelelangan mutiara internasional (International Pearl Trade Center - IPTC) di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 2006 ini, direncanakan untuk melakukan studi kelayakan program IPTC yang didanai dari APBD NTB.
- ✍ Rencana pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Induk di Pantai Induk, Gerung-Lombok Barat dan Perusahaan Listrik Tenaga Air (PLTA) di Lombok Timur.
- ✍ Rencana pembangunan kilang minyak di Teluk Ekas, Lombok Timur. Saat ini telah ada 2 investor yang berencana berinvestasi di daerah tersebut.

## BAB VI PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INFLASI REGIONAL

### 5.1. PROSPEK MAKRO EKONOMI REGIONAL (*ECONOMIC OUTLOOK*)

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Pada triwulan III-2006 menunjukkan prediksi sebagian besar responden memperkirakan bahwa kegiatan usaha kembali akan mengalami peningkatan, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) -6,46% dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut diperkirakan terjadi pada sebagian besar sektor ekonomi, terutama pada sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Indikasi meningkatnya perkiraan kegiatan usaha tercermin pada persepsi responden terhadap beberapa indikator, seperti ekspektasi positif terhadap volume permintaan dan meningkatnya nilai penjualan/pendapatan pada sektor pengangkutan & komunikasi dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan serta meningkatnya penggunaan tenaga kerja pada sebagian besar sektor ekonomi.

Perkiraan perkembangan kegiatan usaha pada triwulan III-2006 (SBT 7,63 %) akan dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan usaha sebagian besar sektor ekonomi terutama sektor pengangkutan & komunikasi dan sektor jasa-jasa. Ekspektasi responden menyatakan bahwa sektor industri pengolahan akan mengalami kontraksi sedangkan untuk sektor pertanian hampir semua subsektor mengindikasikan peningkatan kegiatan usaha kecuali subsektor tanaman bahan makanan yang mengalami kontraksi.

Sementara itu, gambaran beberapa indikator makro ekonomi yang disurvei menunjukkan bahwa harga jual pada triwulan mendatang diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan, terutama disebabkan oleh naiknya harga bahan baku dan biaya operasional perusahaan. Responden memperkirakan bahwa pada triwulan mendatang masih akan terjadi penyesuaian harga/tarif. Di sisi permintaan juga diprediksi mengalami peningkatan pada semua sektor ekonomi yang disurvei. Demikian pula dengan nilai penjualan / pendapatan operasional perusahaan pada triwulan III-2006 juga diprediksi akan semakin meningkat, terutama disektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan dan sektor pengangkutan & komunikasi. Secara umum, situasi bisnis akan semakin membaik. Seiring dengan itu, penggunaan jumlah tenaga kerja pada triwulan mendatang juga diprediksi akan sedikit meningkat.

Pada triwulan III-2006, baik secara triwulanan (q-t-q) maupun tahunan (y-o-y), perekonomian NTB diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan positif dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Secara triwulanan, masih stabilnya faktor *seasonal* yang sangat mempengaruhi struktur perekonomian NTB pada triwulan mendatang diperkirakan dapat mendukung peningkatan kegiatan ekonomi di NTB. Sektor pertanian yang merupakan sektor yang memberikan pengaruh yang cukup dominan terhadap kinerja perekonomian NTB, diprediksi akan masih akan tumbuh positif pada triwulan mendatang, karena masih berlangsungnya masa panen raya, sehingga persediaan barang-barang hasil produksi sektor ini cukup banyak. Hal ini karena iklim/cuaca pada triwulan mendatang cukup baik dan mendukung kegiatan di sektor pertanian. Seluruh sub sektor di sektor pertanian diperkirakan meningkat pertumbuhannya, baik sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya dan perikanan, kecuali sub sektor kehutanan yang selalu mengalami kontraksi selama beberapa periode terakhir. Demikian pula sektor lainnya juga diperkirakan memberikan dorongan pertumbuhan terhadap perekonomian NTB. Sementara itu, bila ditinjau secara tahunan (y-o-y), pertumbuhan ekonomi NTB terutama akan didorong oleh pertumbuhan pada sebagian besar sektor ekonomi. Mulai stabilnya kondisi ekonomi makro nasional dan regional yang tercermin dari stabilnya nilai tukar dan tingkat inflasi yang cenderung menurun, terutama dibandingkan dengan kondisi pasca kenaikan

BBM pada tahun 2005. Selain sektor pertanian, sektor lain yang mendominasi struktur perekonomian NTB yaitu sektor pertambangan dan penggalian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi pada triwulan mendatang. Saat ini terdapat kecenderungan sektor ini menurun dalam volume produksi yang dihasilkan dan diekspor ke luar negeri. Meskipun sampai dengan Juni 2006 terdapat peningkatan nilai komoditi konsentrat tembaga yang diekspor, namun hal itu lebih disebabkan karena pengaruh kenaikan harga produk tersebut di luar negeri, seiring dengan terus membungunya harga minyak mentah dunia, mengingat hampir seluruh hasil produksi komoditi ini ditujukan untuk diekspor ke luar negeri. Tingginya pangsa komoditi konsentrat tembaga ini terhadap nilai ekspor NTB dan terhadap total PDRB NTB menyebabkan pergerakannya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Kecenderungan penurunan hasil produksi konsentrat tembaga ini telah tampak jika membandingkan volume produksinya pada triwulan ini dengan triwulan yang sama pada tahun 2005, sehingga pencapaian angka pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan ini sangat rendah, hanya sebesar 1,40% (y-o-y). Pada triwulan mendatang, diperkirakan ekspor produksi konsentrat tembaga dari PT. Newmont Nusa Tenggara masih sedikit mengalami kontraksi, sehingga akan berdampak terhadap masih rendahnya pertumbuhan ekonomi NTB.

Dari sisi penyaluran kredit perbankan di NTB, pertumbuhan penyaluran kredit yang disalurkan kepada sektor riil pada triwulan III-2006, masih dipengaruhi oleh perubahan arah kebijakan pemberian kredit perbankan dari kredit konsumtif kepada kredit modal kerja dan investasi. Kecenderungan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Perubahan arah kebijakan tersebut dapat terlihat dari perubahan pangsa kredit konsumsi yang semakin menurun, posisi Desember 2004, Desember 2005 dan Juni 2006 masing-masing sebesar 56,25%, 51,99% dan 51,55%. Sementara pangsa kredit modal kerja dan investasi cenderung meningkat, dari posisi Desember 2004, Desember 2005 dan Juni 2006 masing-masing sebesar 43,74%, 48,01% dan 48,45%. Faktor-faktor tersebut akan mendorong kinerja perekonomian ke arah pertumbuhan dengan kisaran angka 3-4% (y-o-y) pada triwulan III-2006.

## 5.2. PROSPEK INFLASI






Inflasi Kota Mataram pada triwulan mendatang dapat diprediksi dari arah kecenderungan pergerakan angka inflasi yang trendnya terus menunjukkan penurunan sejak awal tahun 2006. Tekanan inflasi pada triwulan mendatang diperkirakan akan lebih stabil pada kisaran angka yang rendah, namun tetap berpotensi sedikit mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya karena pengaruh komponen *administered price* sebagai akibat kebijakan pemerintah menaikkan kembali harga BBM untuk industri yang telah mulai berlaku pada akhir triwulan II-2006 serta adanya rencana penetapan kenaikan harga eceran tertinggi pupuk hingga sebesar 12% yang dapat memicu ekspektasi kenaikan harga di masyarakat. Kenaikan harga BBM untuk industri yang ditetapkan secara berjenjang untuk tiap jenis bahan bakar berbeda-beda. Rate kenaikan tersebut bervariasi antara 2,27% - 12,89% untuk jenis bahan bakar premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel dan minyak bakar.

Dari sisi inflasi *volatile food*, apabila kondisi cuaca/iklim stabil dan tidak terjadi gangguan/ shock seperti bencana alam, kegagalan panen karena serangan hama atau gangguan lainnya, pada triwulan mendatang, tekanan inflasi di NTB kemungkinan diperkirakan akan stabil berada diposisi yang rendah. Mengingat karakteristik daerah yang sangat dipengaruhi faktor musiman dan pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor yang tertinggi kontribusinya. Di samping itu, kondisi geografis wilayah NTB yang terpisah oleh lautan dari daerah lainnya, menjadikan ketergantungan daerah ini pada sarana dan prasarana transportasi sangat tinggi, terutama terkait dengan banyaknya kebutuhan barang masyarakat NTB yang didatangkan dari luar daerah. Dibangunnya pelabuhan dan rehabilitasi pelabuhan yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa membawa dampak yang positif terhadap pergerakan harga barang-barang di NTB secara umum.

Melihat faktor-faktor tersebut dan kondisi geografis daerah NTB sehingga penetapan kenaikan harga BBM industri sangat berpengaruh terhadap harga barang-barang di NTB, serta penetapan kenaikan harga pupuk yang mendorong kenaikan harga barang hasil produksi pertanian sebagai sektor dominan kedua dalam struktur PDRB NTB, maka secara kumulatif (y-t-d) angka inflasi Kota Mataram pada triwulan mendatang diprediksi akan lebih tinggi dari perkiraan semula dan berada pada kisaran 2,5% ( $\pm 0,5\%$ ). Sedangkan secara tahunan (y-o-y), yang membandingkan angka inflasi triwulan berjalan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, angka inflasi masih dominan dipengaruhi oleh inflasi *administered price* karena kebijakan kenaikan harga BBM, sehingga inflasi y-o-y masih berada dalam kisaran angka yang cukup tinggi sebesar 13% ( $\pm 1\%$ ). Inflasi yang cukup tinggi masih akan terjadi pada beberapa kelompok, terutama kelompok transportasi dan komunikasi, kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan angka inflasi yang lebih rendah dari triwulan II-2006. Sementara itu, secara triwulanan (q-t-q), inflasi Kota Mataram sangat dipengaruhi oleh faktor *seasonal* sesuai dengan karakteristik geografis wilayah NTB. Dengan asumsi faktor musiman bersifat normal dan tidak ada faktor eksternal lainnya yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian NTB, serta prediksi iklim/cuaca masih cukup baik dan mendukung kegiatan di sektor pertanian sebagai basis perekonomian NTB, inflasi q-t-q Kota Mataram akan berada pada kisaran yang rendah yaitu 1% ( $\pm 1\%$ ).

### 5.3 ISU-ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI

#### 1. Pemerintah Daerah

-  Beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dan prioritas dari pemerintah daerah dalam bidang investasi antara lain :
  -  Terkait dengan banyaknya prasarana jalan raya dan jembatan yang mengalami kerusakan, terutama di Pulau Sumbawa, jalan yang mengalami kerusakan tersebut belum menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2006. Ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah seperti di ruas jalan Brang Rea Sempe, Teladan-Kelawis, Ropang-Lawin, Sebasang-Lito. Kondisi geografis NTB dimana peranan prasarana transportasi sangat vital guna mendukung perekonomian daerah, menjadikan masalah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah.
  -  Kemudahan untuk pelayanan investasi yang baik perlu diberikan untuk investasi di daerah terpencil yang memiliki potensi dan peluang untuk pengembangan usaha. Pemda hendaknya terus menerus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, baik dari segi keamanan dan kepastian berusaha. Disamping itu, kualitas pelayanan kepada investor melalui pelayanan satu pintu juga perlu ditingkatkan.
  -  Untuk mendorong investasi di sektor pertambangan dan penggalian, serta adanya beberapa calon investor asing yang berminat melakukan penelitian di Pulau Sumbawa, perlu dilakukan pemetaan zona-zona tentang daerah yang mempunyai kecenderungan mengandung mineral dan sumber daya lain yang terkandung didalamnya. Dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitar perlu diberikan kepada calon investor yang berminat disektor ini, mengingat penelitian ini belum dapat dilakukan sendiri karena diperlukan peralatan yang canggih serta biaya yang sangat tinggi.
-  Terkait dengan masalah krisis listrik yang hingga saat ini masih terjadi di daerah Lombok Timur sejak tidak beroperasinya Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Rinjani di Lombok Timur, sehingga sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan bisnis

masyarakat di daerah tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya khusus, diprioritaskan dan bekerja sama dengan PT. PLN dalam masalah pengadaannya. Jika diperlukan dialokasikan dana khusus dari mata anggaran lain yang belum prioritas dalam APBD tahun 2006 melalui persetujuan DPRD guna keperluan tersebut. Dana tersebut digunakan untuk pemberian bantuan genset yang mencukupi kebutuhan untuk penyediaan listrik di daerah tersebut dan fokus terhadap realisasi rencana-rencana pembangunan pembangkit listrik seperti PLTU di Lombok Barat dan PLTA di Lombok Timur, terutama dari sisi alokasi anggaran pemerintah untuk tahun 2007 dan seterusnya. Alternatif pembangunan proyek listrik berbiaya murah seperti dengan tenaga batu bara perlu menjadi bahasan dan dapat realisasikan di NTB yang dapat dikategorikan daerah krisis energi ini.

🌳 Lahan kering yang cukup luas di NTB (hingga mencapai sekitar 1,8 juta ha) belum dikelola secara baik. Lahan kering tersebut akan sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian NTB apabila dapat dimanfaatkan, dengan cara-cara antara lain dengan menanam tanaman yang dapat tumbuh di daerah tersebut seperti pohon jarak yang telah diketahui kegunaannya dan sedang digalakkan penanamannya diberbagai daerah, ataupun dengan cara dijadikan sebagai areal peternakan untuk memenuhi permintaan terhadap hewan ternak asal NTB yang cukup tinggi, baik dari daerah lain maupun dari mancanegara.

🌳 Sehubungan dengan rencana gerakan penanaman jarak di Pulau Lombok dan Sumbawa, perlu dipikirkan cara meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari hasil penanaman jarak tersebut, seperti mengolah sendiri biji jarak tersebut, sehingga tidak dijual dalam bentuk bahan mentah (biji jarak). Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB NTB. Selain itu, penjualan seluruh hasil produksi jarak perlu di upayakan oleh pemerintah agar terserap secara maksimal sehingga tidak merugikan masyarakat yang menanam jarak.

## 2. Pemerintah Daerah - Kantor BI Mataram - Perbankan NTB

– Untuk mengurangi jumlah uang tidak layak edar di Propinsi NTB, perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah Daerah, KBI Mataram serta Perbankan di NTB untuk mendorong terwujudnya *less cash society* di Propinsi NTB. Langkah-langkah konkrit yang dapat ditempuh sebagai berikut:

- a. Identifikasi area- area di mana uang kartal banyak dipergunakan, seperti :
  - Pasar tradisional, di mana jual beli menggunakan uang tunai.
  - Pengguna jasa angkutan umum perkotaan maupun antar daerah yang menggunakan uang tunai.
- b. Mengembangkan cara pembayaran regional non tunai yang efektif dan efisien.
  - Penggunaan *prepaid card* yang berisikan sejumlah saldo untuk keperluan transaksi ekonomi.
  - Modifikasi kartu ATM sebagai *prepaid card* untuk transaksi ekonomi di area yang selama ini cenderung menggunakan uang tunai, seperti di pasar tradisional maupun dalam penggunaan jasa transportasi publik.
- c. Implementasi cara pembayaran tersebut terutama pada area-area di mana uang kartal banyak dipergunakan.
  - Ke depan, masyarakat dapat menggunakan *prepaid card* di mana saldo akan didebit sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan. Misalnya ketika menggunakan jasa transportasi publik, pengguna hanya perlu melakukan 'swipe' pada mesin sensor yang otomatis mendebit saldo pengguna dan mengkredit saldo penyedia jasa transportasi.

Inisiatif ini tentunya memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat serta dana investasi yang tidak sedikit. Bila melihat ke belakang, pada akhir 2005, KBI Mataram telah memusnahkan uang tidak layak edar hingga Rp 1,018 miliar. Uang sejumlah itu

akan lebih efektif dan efisien bila digunakan untuk investasi mengembangkan metode pembayaran non tunai seperti dipaparkan di atas. Bila inisiatif ini dapat diimplementasikan, diharapkan jumlah uang tidak layak edar akan menurun secara signifikan dan mengurangi beban keuangan negara. Juga, kenyamanan metode pembayaran non tunai dapat mendorong aktivitas perekonomian seiring dengan meningkatnya daya beli konsumen.